MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
DI KALANGAN ANAK MUDA MILENIAL INDONESIA

BADAN PENGKAJIAN MPR RI
2020

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
DI KALANGAN ANAK MUDA MILENIAL INDONESIA

2020

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ISBN 978-602-5676-68-0

www.mpr.go.id mprgoid mprgoid mprgoid MPR RI

INI BARU INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

DI KALANGAN ANAK MUDA MILENIAL INDONESIA

BADAN PENGKAJIAN MPR RI
2020

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
DI KALANGAN ANAK MUDA MILENIAL INDONESIA

ISBN : 978-602-5676-68-0

PENGARAH
Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

PENANGGUNGJAWAB
Drs. Yana Indrawan, M.Si.

TIM PENULIS/PENELITI
Idris Hemay, Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim, Mohalli, Junaidi Simun, dan Rita Pranawati **(CSRC UIN Hidayatullah Jakarta)**

EDITOR
Chaider S. Bamualim

PENYELARAS BAHASA
Efrida Yasni

LAYOUT & COVER
Hidayat alfannanié

BADAN PENGKAJIAN MPR RI
Jl. Gatot Subtroto No. 6 Jakarta 10270
Telp. (021) 5789-5231, 5789-5232 | (021)-5789-5230

PENGANTAR
DIREKTUR CSRC UIN JAKARTA

Laporan dihadapan pembaca ini merupakan hasil Kajian Akademik tentang "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Anak Muda Milenial Indonesia". Kajian Akademik ini dilaksanakan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta atas dukungan Pusat Pengkajian Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Kajian ini dilakukan dalam rangka untuk menggali pandangan kalangan anak muda milenial tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Secara khusus tujuan penyelenggaraan kajian akademik ini adalah: *Pertama*, untuk mendalami padangan kalangan anak muda milenial mengenai pancasila dan strategi revitalisasi nilai-nilainya di kalangan generasi milenial. *Kedua*, untuk mendalami berbagai bentuk praksis yang bertujuan untuk mendukung revitalisasi nilai-nilai pancasila di kalangan anak muda milenial. *Ketiga*, Untuk mendapatkan bahan pengembangan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset yang bertujuan untuk revitalisasi nilai-nilai pancasila di kalangan anak muda milenial

Hasil kajian akademik ini dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang bagaimana Persepsi Anak Muda Milenial Terhadap Pancasila dan Strategi Revitalisasi Pancasila di Kalangan Anak Muda Milenial. Penting untuk

diketahui oleh pembaca, bahwa kajian ini terlaksana merupakan hasil kerja keras banyak pihak, terutama tim yang bergabung dalam proyek kajian ini. Kami ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan bagi sejumlah nama yang tergabung dalam tim yang telah memperlihatkan kerja keras, komitmen, dan tanggung jawab terhadap kesuksesan kajian akademik, terutama kepada Irfan Abubakar, MA. sebagai ketua tim peneliti, Dr. Chaider S. Bamualim, MA. sebagai tim perencana, para peneliti; Rita Pranawati, Junaidi Simun dan Mohalli yang telah bekerja keras dalam mensukseskan kajian ini. Efrida Yasni sebagai tim pengawas dan Rheza Chintya Widiawati sebagai panitia pelaksana, serta Hidayat al-Fannanie sebagai layouter.

Disamping itu, kami ucapkan terima kasih kepada para nara sumber wawancara mendalam yang telah bersedia untuk meluangkan waktu diwawancara yang telah memberikan pikiran dan sumbangan sarannya untuk menghasilakan kajian akademik yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan anak muda milenial. Para peserta FGD yang telah datang dari berbagai kampus, sekolah, agama dan etnis: Livia Amalia (UIN Jakarta), Kurratul Aini (UNPAM), Fajar Syahrullah, (UIN Jakarta), Citra Nurani Rahmatika (IIQ), Ahmad Saeroji (UIN Jakarta), Nurhasana (IPTIQ), Andriana Dina Baba (UNPAM), Anastasya Junita (Instut Stiami), Desnita Gulo (UNPAM), Roby Sugara (STABN Sriwijaya), Septiana (STAB Nalanda), Kiswati (STAB Nalanda), Anastacia P Novlina (Universitas Indonesia), Ni Made Inten Supriyanti (Universitas Indonesia), Alvin Septian (Universitas Gunadarma), Aldi Destian (Bina Nusantara), Caluin Natadihardja (Pradita Institute), Sabila Aisya Putri (SMA 5 Depok), Aprilia Shakila (SMA 5 Depok), Brama Fawwas Aydin (SMA Madania Bogor), Raditya Naufal Daniswara (SMA 1 Depok), Robby Surya Januar (SMA 1

Depok), Ilham Al Fathoni (MA, embangunan UIN Jakarta), Rahma (MA Pembangunan UIN Jakarta), Putri Cahyaning (MA Pembangunan UIN Jakarta), Bernard Peter (SMA Dua Mei), Ester Tri Utami (SMA Katolik Mater Dei), Alexandra Alessia (SMA Katolik Mater Dei), I Putu Hari W (SMK Dua Mei), dan Frudence Kindness Dylana (SMAN 3 Tangsel). Dalam FGD mereka telah berkontribusi dalam memberikan informasi situasi terkini tentang bagaimana Persepsi Anak Muda Milenial Terhadap Pancasila. Dan mereka berhasil mengkaji dan mendiskusikan Strategi Revitalisasi Pancasila di Kalangan Anak Muda Milenial.

Beberapa nama lain yang perlu kami berikan apresiasi dan sanjungan khusus adalah Prof. Dr. Amany Lubis, MA. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menaruh perhatian besar atas suksesnya kajian akademik ini. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan Drs. Yana Indrawan, M.Si (Kepala Biro Pusat Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI) kepada kami untuk melaksanakan Kajian Akademik ini. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih atas bantuan banyak pihak yang namanya tidak dapat kami urut satu persatu di sini.

Kami telah berusaha melakukan yang terbaik yang kami mampu lakukan, namun hasil kajian ini mungkin tak luput dari pelbagai kelemahan dan kekurangan. maka sumbang saran dan masukan yang kritis-konstruktif untuk penyempurnaan laporan ini akan kami terima dengan pikiran dan hati yang terbuka.

Desember 2019

ttd.

Idris Hemay, M.Si
Direktur CSRC UIN Jakarta

Daftar Isi

Kata Pengantar Direktur CSRC UIN Jakarta | i
Daftar Isi | v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang | *1*
B. Tujuan |*10*
C. Pertanyaan Penelitian | *11*
D. Lingkup Kegiatan | *11*
E. Indikator *Output* Kegiatan | *12*
F. Metodelogi | *13*
G. Jadwal Pelaksanaan | *18*
H. Biaya Anggaran | *20*
I. Penyelenggara Kegiatan | *20*

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL

A. Revitalisasi Pancasila | *21*
B. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara | *29*
C. Globalisasi dan Generasi Milenial | *35*

BAB III: PERSEPSI ANAK MUDA MILENIAL TERHADAP PANCASILA

A. Pancasila di Mata Anak Muda Milenial | *44*
B. Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Anak Muda Milenial | *47*
C. Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa dan Negara | *61*
D. Pancasila Dalam Perspektif Ajaran Agama dan Nilai Kebangsaan | *67*

BAB IV : REVITALISASI PANCASILA DI KALANGAN ANAK MUDA MILENIAL

A. Problem dan Kendala Penerapan Pancasila | *74*
B. Bentuk-bentuk Praksis Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila | *85*
C. Pancasila versus Khilafah | *92*
D. Revitalisasi Pancasila di Media Sosial | *98*

BAB V : STRATEGI REVITALISASI PANCASILA UNTUK KALANGAN ANAK MUDA MILENIAL

A. Strategi Revitalisasi Pancasila Melalui Nilai-Nilai Ajaran Agama | *114*
B. Strategi Revitalisasi Pancasila Melalui Nilai-Nilai Budaya dan Kebangsaan | *121*
C. Strategi Revitalisasi Pancasila Melalui Dunia Digital | *125*
    1. Video dan Film Pendek Tentang Pancasila | *131*
    2. Meme Pancasila | *135*
    3. Instagram Pancasila | *140*
    4. Komik Pancasila | *143*
D. Revitalisasi melalui Kurikulum Pendidikan Sekolah | *145*

BAB VI : PENUTUP: KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan | *153*
B. Rekomendasi | *162*

Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hari-hari ini, struktur demografi Indonesia sedang didominasi oleh penduduk usia produktif dengan relatiftingginya pertumbuhan penduduk usia muda. Fenomena 'bonus demografi' ini harus dipandang sebagai (*window of opportunity*) untuk mempercepat laju pembangunan. Seluruh energi dan sumber daya negara, terutama sumber daya manusia dan anggaran, dapat digunakan secara lebih terfokus untuk meningkatan pertubuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan sampai tiba pada fase puncaknya, di mana rasio ketergantungan (*dependency ratio*) antara jumlah penduduk usia non-produktif terhadap jumlah penduduk produktif berada di titik terendah.

Salah satu unsur terpenting dari struktur penduduk usia produktif adalah generasi milenial. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017, jumlah generasi milenial mencapai 88 juta jiwa atau 33,75 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah itu jauh lebih besar dari generasi sebelumnya seperti generasi X (25,74%) dan generasi *baby boom*+veteran (11,27%). Juga masih lebih besar dibanding generasi pasca milenial yang muncul belakangan atau generi Z (29,23%).[1]

---

[1] Lihat Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia 2018", Jakarta: BPS. Lihat juga Bappenas, BPS, dan UNFPA, Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045: Hasil SUPAS 2015, Jakarta: BPS 2018.

Sebagai kelompok demografi usia produktif yang paling dominan, generasi milenial merupakan modal terbesar pembangunan yang dapat menentukan nasib bangsa ke depan. Mereka adalah penggerak roda pembangunan yang paling potensial mewujudkan kemajuan dan kemandirian bangsa. Setiap dinamika sejarah yang digerakkannya selalu berpengaruh terhadap perjalanan bangsa. Dengan kata lain, merekalah yang memiliki peran besar di era bonus demografi dewasa ini.

Dalam studi kependudukan, bonus demografi kemungkinan hanya terjadi sekali sepanjang perjalanan bangsa. Hal ini mengingat bonus demografi hanya terjadi ketika jumlah penduduk produktif berada di atas 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Karena itu, peluang ini perlu dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan bangsa di segala bidang. Sebaliknya, jika peluang itu disia-siakan maka sumber daya manusia yang berlimpah ini, berpotensi menjadi beban negara, seperti dengan tingginya angka pengangguran di tengah ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dan kompetitif, meluasnya perilaku konsumtif, dan sebagai akibatnya dapat menjadi penyebab merebaknya kriminalitas dan kekerasan antar warga negara.

Generasi milineal atau generasi digital atau yang juga diesebut generasi Y/Net Gen[2] memiliki keunggulan

[2] Istilah milenial (millennial) pertama kali dicetuskan oleh William Strauss dan Neil Howe tahun 1987 dan dipopulerkan dalam bukunya Millennials Rising: The Next Great Generation (2000). Istilah itu merujuk pada generasi yang lahir dalam rentang tahun 1982 sampai tahun 2000. Sementara, istilah generasi digital (*digital generation*) dibuat oleh Tapscott (1998) dan menunjuk pada generasi yang lahir antara tahun 1976 sampai 2000. Di samping istilah itu ada juga istilah generasi Y/Net Gen bagi yang lahir antara 1981-195. Namun dari semua istilah itu, Howe dan Strauss bersama Lancaster dan Stillman (2000) serta Martin dan Tulgan (2000) menyebut dan menyamakan generasi milenial dan generasi Y meski rentang kelahirannya berbeda.

dibanding generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Mereka tidak hanya akrab dengan teknologi, tetapi juga handal dalam menggunakannya. Generasi ini begitu mudah dan kreatif dalam mengoperasikan *gadget* atau gawai baru tanpa menggunakan buku panduan. Lebih dari itu, mereka bahkan dapat menggunakannya untuk mengakses informasi, berselancar di media *online* dan media sosial, menikmati hiburan *streaming*, juga mengakses situs pendidikan, bertransaksi online, memesan transportasi *online* dan sebagainya.

Dibesarkan di tengah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sejumlah penelitian menunjukkan ciri-ciri generasi milenial, antara lain: kreatif, informatif, komunikatif, terhubung dan mudah bersosialisasi dengan *gadget*, ingin serba cepat, berani, suka hal-hal baru, mudah pindah pekerjaan, dinamis, dan cepat bereaksi (reaktif). Mereka juga lebih suka nonton *live streaming* ketimbang televisi, minat baca buku menurun dan lebih suka membaca di *smartphone*, memiliki akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sejenisnya sebagai media komunikasi dan sumber informasi, juga inovatif dalam memanfaatkan peluang bisnis berbasis teknologi.[3] Sedangkan dari segi kualitas, generasi milenial memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dengan kualitas kesehatan yang lebih baik dari generasi sebelumnya.[4]

---

[3] Lihat misalnya yang dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG) bersama University of Berkley tahun 2011 di Amerika Serikat, atau penelitian Gallup dalam How Millennials Want to Work and Live, juga penelitian oleh Youth Lab, lembaga studi mengenai anak Muda Indonesia yang melakukan penelitian di lima kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Makasar, Medan, dan Malang.

[4] *Statistik Gender Tematik: Profile Generasi Milenial Indonesia*, hal. 35-49.

Tumbuh menjadi generasi milenial yang piawai memanfaatkan teknologi canggih tentu menguntungkan dan memberi mereka peluang dan kesempatan berkarir sesuai dengan *passion* mereka. Namun rupanya, kemajuan teknologi yang begitu cepat telah menimbulkan disrupsi di berbagai bidang, baik industri, ekonomi, politik, budaya, media maupun pendidikan. Disrupsi secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, cara produksi dan distribusi, juga relasi individu dan organisasi dalam hubungan satu sama lain.

Di bidang ekonomi, misalnya, disrupsi mengguncang melalui apa yang disebut revolusi industri 4.0, dengan ditemukannya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), robotika, 3D *printing*, dan *virtual reality*. Akibatnya, banyak tenaga kerja dipangkas dan digantikan dengan robot dan mesin. Di bidang ekonomi, bisnis ritel dan transportasi *online* menjamur sehingga mengancam pusat-pusat pembelanjaan. Di bidang politik, mobilisasi kepentingan melalui media sosial terjadi secara masif, bahkan tak terkendali, diperburuk fenomena *hoax* dan ujaran kebencian yang mengganggu hubungan antar warga-negara. Di bidang budaya, komunikasi dan hubungan sosial antar warga secara langsung menjadi berkurang, konsekuensi dari makin intensifnya komunikasi di dunia maya. Akibatnya nilai budaya *silaturrahim*, kesopanan danai-nilai tradisional kesantunan lambat laun makin terkikis. Begitu pula, budaya kerja keras yang mengedepankan proses tidak lagi diganderungi karena lebih memilih hal yang instan dan serba cepat sehingga membentuk perilaku konsumtif.

Pada tataran yang lebih mendasar, penetrasi teknologi yang serba disruptif telah memengaruhi mental dan

kepribadian generasi milenial menjadi pribadi yang khas, memaksa mereka hidup dalam realitas baru yang seringkali berjarak dengan sistem nilai dalam tatanan lama. Banjir informasi di media sosial dan media online, dibantu aplikasi mesin pencarian (*search engine*) di internet turut membentuk cara pandang, sikap dan perilaku generasi milenial. Padahal tak jarang konten informasi medsos bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dianut dan disepakati bersama oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Akibatnya, belakangan ini mulai tumbuh subur gejala seperti konservatisme agama, radikalisme, ekstremisme, intoleransi, juga politik identitas, *hoax*, ujaran kebencian, dan paham *post-truth* yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Terkait sikap generasi milenial terhadap Pancasila, sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang mengembirakan sekaligus mendebarkan. Meskipun penelitian itu tidak secara spesifik tertuju pada generasi milenial dan sebagian hanya fokus pada kelompok usia di segmen tertentu, tetapi sebagai data awal penting disajikan sebagai gambaran umum persepsi milenial terhadap Pancasila. Hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2017, misalnya, menemukan bahwa 90,5 persen responden dari generasi milenial (kategori usia 27 - 29 tahun) mendukung falsafah dan dasar Negara Pancasila serta secara tegas menolak mengganti dasar Negara Indonesia dengan ideologi lain.[5] Begitu pula temuan riset

---

[5] Centre for Strategic and International Studies (CSIS), "*Ada apa dengan Milenial?, Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik Generasi Milenial*", (Jakarta, CSIS, 2 November, 2017), hal. 29.

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta tahun 2018, menyatakan bahwa 99,9 persen warga Indonesia menilai Pancasila sesuai dan cocok sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[6]

Walaupun secara normatif menerima Pancasila sebagai dasar negara, tetapi secara substantif penghayatan generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila perlu mendapatkan perhatian. Dari riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mensurvei 1.522 siswa, 337 mahasiswa, dan 264 guru beragama Islam di 34 provinsi tahun 2017, misalnya, terungkap hasil yang perlu menjadi catatan bagi kita semua. Bahwa sebanyak 51,1 persen responden siswa dan mahasiswa memiliki pandangan yang tidak toleran terhadap kelompok berbeda, terutama terhadap kelompok minoritas seperti Syi'ah dan Ahmadiyah.[7] Temuan ini diperkuat hasil penelitian CSRC UIN Jakarta sebelumnya bahwa generasi muda Muslim milenial terpelajar cenderung menganut sikap dan perilaku keberagamaan yang konservatif, komunal, skriptural, dan puritan.[8]

Gejala ini tidak bisa diabaikan mengingat keberadaannya, secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengganggu prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan

---

6 Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) dan MPR RI, "Survei Nasional Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI 2018," hal. 101.

7 Laporan survei PPIM UIN Jakarta, November 2017.

8 Chaider S. Bamualim (ed), "Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme" (Tangerang Selatan: CSRC UIN Jakarta, 2018), hal. 247.

bernegara yang telah disepakati, atau bahkan dapat mengancam eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila diabaikan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara bisa saja dilupakan dan ditinggalkan oleh generasi milenial, atau bahkan digantikan dengan ideologi lain. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menguatkan kembali pemahaman dan penghayatan Pancasila perlu dilakukan oleh segenap elemen bangsa terutama terhadap kalangan generasi milenial. Generasi ini merupakan pemegang tonggak sejarah perjalanan bangsa, kini dan nanti, sehingga di tangan merekalah sesungguhnya nasib negara Indonesia ditentukan.

Keberadaan Pancasila selama ini telah menjadi kekuatan pemersatu dan mengikat perbedaan ke dalam—meminjam istilah Yudi Latif—"*universum simbolik*" yang menjadi titik temu berbagai nilai dan berfungsi sebagai pijakan kebersamaan (*common denominator*).[9] Dengan kata lain, Pancasila adalah ruh bangsa, dasar pikiran, cita bangsa dan cita hukum yang secara khas dimiliki oleh negara-bangsa Indonesia. Pancasila memuat konsepsi dan cita-cita kebangsaan yang modern dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, agama, keyakinan, budaya dan bahasa yang tersebar di seluruh wilayah yang begitu luas, tetapi prinsip-prinsip Pancasila tidaklah membuat kemajemukan itu menjadi tercerai-berai.

Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi menjadi produk konsensus nasional pertama

---

[9] Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 321.

mengenai dasar dan ideologi negara. Seluruh pengaturan terkait penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mengacu pada rumusan Pancasila. Begitu juga, seluruh upaya mencapai cita-cita dan tujuan bangsa di berbagai bidang harus diorganisasi di bawah sistem kehidupan nasional yang bernafaskan Pancasila.

Rumusan Pancasila termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat: "...dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Rumusan tersebut secara yuridis sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Rumusan tersebut juga bersifat final dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang memiliki hukum derajat tinggi. Meskipun UUD NRI 1945 beberapa kali mengalami perubahan, tetapi kenyataannya Pancasila tetap tercantum dalam konstitusi.[10]

Namun demikian, kendati secara yuridis-konstitusional keberadaan Pancasila dinyatakan final serta unsur-unsur nilai di dalamnya digali dari jiwa masyarakat, secara

---

[10] MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), hal. 87-88.

praktik pengamalan dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mesti terus ditingkatkan. Layaknya ideologi pada umumnya, Pancasila akan senantiasa diuji dan dihadapkan pada dinamika keadaan dan tantangan zaman yang terus berubah, seperti halnya di era kemajuan teknologi yang makin disruptif ini. Menyadari besarnya tantangan itu berarti meletakkan kerja ideologi Pancasila sebagai sebuah proses "menjadi" yang harus terus diperjuangkan setiap waktu dan zaman.

Atas dasar pemikiran di atas, mengingat pentingnya revitalisasi Pancasila di kalangan generasi milenial, maka dipandang perlu melakukan kajian akademik untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana sesungguhnya generasi milenial memandang Pancasila, juga bagaimana mereka menilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tidak hanya itu, perlu pula mendapatkan umpan balik (*feedback*) mengenai cara-cara apa saja yang menurut generasi milenial efektif untuk menguatkan kembali pemahaman dan penghayatan Pancasila pada generasi mereka. Hal ini penting mengingat generasi milenial adalah generasi yang khas dengan karakter berbeda dari generasi sebelumnya. Pendekatan terhadap mereka tidak bisa lagi bersifat indoktriner karena secara psikologis karakter mereka tidak suka dipaksa, ditekan, apalagi ditakut-takuti atau diancam. Metode dan medium yang digunakan pun tentunya akan berbeda sesuai dengan *passion* dan gaya milenial.

Melalui kajian semacam itu diharapkan dapat ditemukan strategi yang meliputi metode, konten, dan medium yang pas dengan generasi milenial sehingga internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan mudah dapat

dilakukan. Selanjutnya, dari kajian itu dapat digali apa saja bentuk-bentuk praksis yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti untuk mendukung revitalisasi Pancasila. Dengan demikian, upaya-upaya program yang disusun nantinya tidak hanya bersifat struktural dari atas ke bawah (*top down*) melainkan juga bersifat kultural dari bawah ke atas (*bottom up*).

Dengan cara ini, maka generasi milenial ditempatkan sebagai subjek dengan asumsi bahwa merekalah yang paling mengerti masalah/kebutuhan mereka sendiri, dan mereka juga yang paling memahami apa yang harus diperbuat untuk menyelesaikan/mewujudkannya. Tugas pemerintah adalah menyediakan sumber daya, mengarahkan, dan membuka akses terhadap berbagai peluang di masa depan, terutama bagi kokohnya jiwa kebangsaan generasi milenial.

B. Tujuan

Secara umum, kegiatan kajian akademik ini bertujuan untuk menggali pandangan generasi muda milenial tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Secara khusus tujuan penyelenggaraan kajian akademik ini adalah:

1. Untuk mendalami padangan kalangan anak muda milenial mengenai pancasila dan strategi revitalisasi nilai-nilainya di kalangan generasi milenial.
2. Untuk mendalami berbagai bentuk praksis yang bertujuan untuk mendukung revitalisasi nilai-nilai pancasila di kalangan anak muda milenial.
3. Untuk mendapatkan bahan pengembangan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset yang bertujuan untuk revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan muda milenial.

C. Pertanyaan Penelitian

Beberapa pertanyaan kunci yang diajukan sebagai permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan anak muda milenial mengenai Pancasila sebaga dasar dan ideologi negara beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari?
2. Apa saja bentuk praksis yang selama ini dijalankan yang berguna untuk mendukung revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda milenial?
3. Bagaimana strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang sesuai bagi kalangan anak muda milenial dan apa saja rekomendasi strategis yang tepat untuk dikembangkan dalam kebijakan?

D. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pelaksanaan survei nasional ini adalah:

1. Literatur review kajian revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda milenial. Literatur review menjadi kerangka penting dalam menyusun kisi-kisi variabel pertanyaan dalam wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini akan menelusuri informasi terkait dengan tema kajian baik bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, media cetak dan elektronik
2. Workshop desain kajian akademik. Workshop desain kajian akademik bertujuan untuk mendiskusikan secara mendalam, desain operasional kajian, instrumen kisi-kisi pertanyaan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan kisi-kisi-kisi pertanyaan *Focus Group Discussion* (FGD).

3. Melakukan 2 kali *Focus Group Discussion* (FGD) di Jakarta dengan melibatkan 30 anak muda milenial lintas agama. FGD pertama akan melibatkan 15 peserta dari kalangan mahasiswa dan FGD kedua akan melibatkan 15 peserta dari kalangan siswa.
4. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 10 narasumber anak muda milenial di DKI Jakarta dan sekitarnya.
5. Melakukan transkrip dan *coding* data hasil FGD dan wawancara mendalam.
6. Melakukan analisis data hasil FGD dan hasil wawancara mendalam (*in-depth* interview).
7. Membuat laporan yang didalamnya memuat uraian latar belakang kajian, proses pelaksanaan, analisis, kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai lampiran laporan juga disampaikan data dasar hasil kajian.
8. Workshop finalisasi laporan hasil kajian akademik

E. Indikator *Output* Kegiatan

Output/hasil yang diharapkan dari program ini di antaranya:

1. Penelitian yang mencakup nara sumber sekitar 40 anak muda milenial yang terdiri dari siswa SMA dan mahasiswa di perguruan tinggi.
2. Dokumen desain penelitian yang menyoroti kerangka kerja konseptual penelitian, metodologi yang mencakup pengumpulan dan analisis data, dan pedoman wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD).
3. Laporan penelitian secara komprehensif, yang terdiri

dari beberapa bagian:

a. Ringkasan eksekutif yang memuat temuan kunci dan rekomendasi.
b. Pendahuluan yang mencakup analisis konteks, metodologi penelitian dengan uraian yang jelas tentang pemilihan responden/narasumber yang diwawancarai, dan pendekatan dalam analisis data.
c. Temuan kajian hasil wawancara dan FGD, analisis temuan, dan kesimpulan.
d. Rekomendasi yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan (MPR, BPIP, dan Kementerian Agama).
e. Lampiran, yang terdiri dari data yang dikumpulkan, nara sumber yang diwawancarai, bibliografi, dan biografi singkat peneliti.

F. Metodologi

1. Pendekatan

   Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang topik kajian ini, metodologi yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur, *Focus Group Discussion* (FGD) dan Wawancara Mendalam. Pengumpulan data menggunakan FGD akan diperdalam dalam wawancara mendalam.

2. Studi Literatur

   Dalam kajian akademik ini, secara sekuensial, studi literatur dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, studi literatur yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai aspek dan variabel yang akan dianalisis

terkait dengan topik kajian akademik ini. Karena topik kajian akademik ini berkaitan dengan revitalisasi nilai-nilai pancasila di kalangan anak muda milenial, ada tiga perspektif yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, yakni perspektif Pancasila, sosiologi, dan studi politik. Ketiga instrumen ini digunakan untuk membedah permasalahan kajian akademik ini. Tahap kedua, studi literatur yang bertujuan untuk memberi penilaian atas temuan empirik dari hasil FGD dan wawancara mendalam. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengkomparasikan dengan konsep ataupun berbagai teori yang relevan dalam lingkup Pancasila, sosiologi, dan studi ilmu politik. Selain itu, data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber juga dapat memperjelas hasil kajian akademik ini. Data sekunder ini termasuk peran media massa sebagai entitas yang berpengaruh terhadap pembentukan opini publik.

3. *Focus Group Discussion* (FGD)

   FGD ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dasar mengenai situasi terkini revitalisasi nilai-nilai Pancasila nilai-nilai pancasila di kalangan anak muda milenial. Di samping itu, FGD akan mendalami padangan kalangan anak muda milenial mengenai pancasila dan strategi revitalisasi nilai-nilainya di kalangan generasi milenial. FGD juga akan mendalami berbagai bentuk praksis yang bertujuan untuk mendukung revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda milenial.

   Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa FGD akan dilaksanakan dua kali di Jakarta dengan melibatkan

30 anak muda milenial lintas agama (usia 16 tahun s.d 34 tahun) yang terdiri dari mahasiswa dan siswa SMA kelas 3. FGD pertama akan melibatkan 15 peserta dari kalangan mahasiswa dan FGD kedua akan melibatkan 15 peserta dari kalangan siswa. Adapun peserta FGD dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1. Daftar peserta FGD Pertama

No.	Peserta	Jumlah
1	Mahasiswa Islam	7
2	Mahasiswa Protestan	2
3	Mahasiswa Katolik	2
4	Mahasiswa Hindu	2
5	Mahasiswa Budha	1
6	Mahasiswa Khonghucu	1
7	Tim kajian	5
	Total	20

Berdasarkan tabel di atas, peserta FGD pertama berjumlah 20 orang peserta mahasiswa lintas agama dan tim kajian yang terdiri dari: 7 peserta yang beragama Islam, 2 peserta yang beragama protestan, 2 orang yang beragama katolik, 2 orang yang beragama Hindu, 1 orang yang bergama Budha dan 1 orang yang beragama Khonghucu. FGD pertama akan mengumpulkan data yang melibatkan narasumber sesuai kriteria di atas.

Tabel 2. Daftar peserta FGD Kedua

No.	Peserta	Jumlah
1	Siswa Islam	7
2	Siswa Protestan	2
3	Siswa Katolik	2
4	Siswa Hindu	2
5	Siswa Budha	1
6	Siswa Khonghucu	1
7	Tim kajian	5
	Total	20

Berdasarkan tabel di atas, peserta FGD kedua berjumlah 20 orang peserta siswa lintas agama dan tim kajian yang terdiri dari: 7 peserta yang beragama Islam, 2 peserta yang beragama protestan, 2 orang yang beragama katolik, 2 orang yang beragama Hindu, 1 orang yang bergama budha dan 1 orang yang beragama khonghucu. FGD kedua akan mengumpulkan data yang melibatkan narasumber sesuai kriteria di atas.

4. Wawancara mendalam (*in-depth* interview)

   Wawancara mendalam adalah satu metode riset yang dimaksudkan untuk menelusuri secara lebih jauh hasil FGD ataupun hasil studi literatur. Wawancara mendalam dalam studi ini akan menelusuri pandangan anak muda milenial lintas agama. Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap 10 narasumber anak milenial (usia 16 tahun s.d 34

tahun) di Jakarta dan sekitarnya. Adapun 10 narasumber wawancara mendalam dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Daftar narasumber wawancara mendalam

No.	Peserta	Jumlah
1	Mahasiswa Islam	2
2	Mahasiswa Protestan	1
3	Mahasiswa Katolik	1
4	Mahasiswa Hindu	1
5	Mahasiswa Budha	1
6	Mahasiswa Khonghucu	1
7	Siswa Islam	1
8	Siswa Protestan	1
9	Siswa Katolik	1
Total		10

Dalam riset ini, wawancara mendalam akan dilakukan untuk mendalami fenomena yang diperoleh dari hasil FGD. Pendalaman ini sebagian besar untuk menjawab pertanyaan mengapa atas suatu peristiwa apa (peristiwa atau fenomena tertentu). Pendalaman ini sekaligus dapat menjadi semacam analisis terhadap fenomena yang dimaksud.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam wawancara mendalam ini menganut prinsip snow ball. Yakni wawancara akan terus dilakukan sehingga tidak ada lagi informasi baru yang belum tergali.

Dengan kata lain, sepanjang masih ditemukan data yang berbeda antara satu narasumber dengan narasumber yang lain, wawancara mendalam akan terus dilakukan selama periode penghimpunan data bahkan penulisan. Dengan demikian narasumber untuk suatu topik tertentu tidak hanya satu orang melainkan lebih dari itu.

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara mendalam dilakukan dengan cara membuat kategori atas jawaban narasumber. Jawaban yang sama dikelompokkan pada kategori yang sama. Dengan demikian, akan diperoleh perspektif yang sama dan yang berbeda antara satu narasumber dengan narasumber yang lain. Dalam penyajian hasil laporan riset, beberapa pernyataan narasumber dapat dikutip untuk mempertegas analisis.

G. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan kajian akademik ini dilakukan dalam kurun dua bulan terhitung sejak persetujuan resmi kegiatan ini (September-November). Jadwal kegiatan disusun oleh pelaksana studi kajian ini setidaknya mencakup aspek:

NO	AKTIVITAS	SEPTEMBER				OKTOBER				NOV.	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
A.	PERENCANAAN										
1	Literatur review										
2	Desain Operasional (DO)										
3	Kisi-kisi FGD dan pesertanya										
4	Kisi-kisi *Indept Interview* dan nara sumbernya										
4	Workshop Desain kajian Akademik										
B.	TURUN LAPANGAN										
1	*Focus Group Discussion (FGD)*										
2	Wawancara mendalam (*Indept Interview)*										
3	Transkrip hasil FGD dan wawancara										
4	Coding hasil FGD dan wawancara										
5	Analisis data hasil FGD dan wawancara mendalam										
C.	LAPORAN TAHAP PERTAMA										
D.	PENULISAN LAPORAN										
1	Penulisan laporan										
2	Workshop finalisasi laporan hasil kajian akademik										
3	Finalisasi Laporan										
4	Laporan Akhir Kajian										
E.	LAPORAN TAHAP KEDUA										

H. Biaya Anggaran Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan kajian akademik ini disediakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dalam tahun anggaran 2019. Biaya yang disediakan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta). Jumlah ini sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) [*terlampir*].

I. Penyelenggara Kegiatan

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Ciputat Jakarta 15419
Phone. (+62 21) 744 5173
Fax. (+62 21) 749 0756
Email: info@csrc.or.id
www.csrc.or.id

Bab II
KAJIAN KONSEPTUAL

A. REVITALISASI PANCASILA

Dalam sejarah berbangsa dan bernegara, penerapan dan pengamalan Pancasila berlangsung dinamis, diterpa berbagai macam tantangan dan ujian. Tiap rezim pemerintahan, mulai Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, mengadopsi caranya masing-masing dalam merespon situasi semacam itu. Di masa pemerintahan Soekarno, misalnya, ujian terhadap Pancasila datang dalam beberapa tahap. *Pertama*, pada fase awal kemerdekaan. Penetapan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dimana sila-sila Pancasila dirumuskan, tidak serta-merta menyudahi perdebatan mengenai dasar negara, serta tidak pula menghentikan ambisi berbagai pihak untuk memaksakan ideologi lain selain Pancasila.

Beberapa contoh peristiwa berikut dapat menjadi bukti argumen di atas. Sebut saja peristiwa pemberontakan DI/TII pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo dimulai tahun 1948 di Jawa Barat dan pemberontakan PKI Madiun 1948. DI/TII memaksakan Islam sebagai dasar Negara, sementara PKI medesakkan Komunisme sebagai dasar Negara. *Kedua*, pemberontakan berbasis ideologis tersebut membuktikan bahwa argumen mengenai 'finalnya' Pancasila sebagai dasar Negara ternyata masih perlu terus diuji. Artinya, keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara tidak menghentikan kemungkinan munculnya gerakan perjuangan ideologi alternatif selain Pancasila.

Kedua, fase antara tahun 1950 sampai 1959. Awal dekade 1ini ditandai oleh kemunculan pemikiran dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Perspektif atas interpretasi itu dapat dikelompokkan ke dalam dua kubu. Yaitu: mereka yang berupaya menempatkan Pancasila sebagai pandangan dunia atau falsafah bangsa (weltanschauung); dan mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sekadar kompromi politik antara golongan nasionalis (Sidik Djojosukarto dan Sutan takdir Alisyahbana dkk) dan golongan Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk). Perdebatan antar kedua kubu mencerminkan repetisi atas peristiwa persidangan dalam BPUPKI dan PPKI.[1]

Perdebatan sengit terus berlangsung di sidang konstituante. Sidang ini menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959 sehingga konstituante tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Kondisi itu kemudian menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang memaksa Presiden Soekarno turun tangan dengan membuat Dekrit Presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959 dan diumumkan pada tanggal 5 Juli 1959. Meskipun pada periode ini Pancasila tetap merupakan dasar negara, kenyataan politiknya secara esensial bisa diklaim lebih bercorak liberal. Ini dapat dilihat dari bagaimana sila keempat diterapkan, dimana esensi dan rohnya yang seharusnya lebih mencerminkan nilai-nilai "musyawarah-mufakat," dalam kenyataannya, putusan-putusan lebih mengutamakan

[1] Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, 2013, hal. 9.

suara terbanyak (*voting*). Pada periode ini muncul pemberontakan seperti PRRI dan Permesta yang menyuarakan keluar dari dari NKRI.

Ketiga, fase antara 1959 sampai 1965. Sebagai kelanjutan dari keluarnya Dekrit Presiden, dan cerminan rasa khawatir terhadap implikasi pergerakan politik Islam, pemerintah kemudian berupaya menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang hegemonik. Ikhtiar tersebut dilakukan ketika Ir. Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin "Manipol/USDEK" (Manifesto politik Undang-Undang Dasar 1945: Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).

Manipol itu muncul pertama kali dalam pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS1960 tentang GBHN.[2] Isi manifesto politik itu sendiri merupakan rumusan panitia yang dipimpin oleh D.N. Aidit yang disetujui oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara.[3]

Namun demikian, keberadaan Manipol tersebut tidak lantas menyudahi polemik ideologis yang terjadi. Sebaliknya, bagai api dalam sekam, Manipol itu membuka

---

[2] As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hal. 30.

[3] Ismaun, *Tinjauan Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Carya Remaja, 1978), hal.105.

pintu masuk bagi mereka yang berseberangan paham untuk melakukan pergerakan dengan taktik gerilya di dalam kekuasaan Ir. Soekarno. Mereka memanfaatkan jargon-jargon yang digunakan Soekarno, padahal dengan agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh sebagian besar kekuatan politik, tidak hanya PKI, melainkan juga kelompok anti Komunisme.[4]

Walaupun kepentingan politiknya berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis di bawah satu payung besar bernama Pancasila (doktrin Manipol/USDEK), pada saat yang sama, golongan antikomunis mengonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih "murni" dengan menyingkirkan paham Komunisme yang tidak bertuhan (ateisme).[5] Puncaknya, dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut marutnya perpolitikan yang diwarnai ketegangan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Kominis Indonesia (PKI), dan kelompok Islam, akhirnya Soekarno akhirnya sebagai Presiden melalui sidang MPR.

Di masa pemerintahan Soeharto, terdapat upaya keras untuk membelokkan arah pemahaman Pancasila. Begitu kuatnya upaya tersebut sehingga menjadikannya sebagai *political force*. Terbukti, pada tahun 1968 Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 tertanggal 13 April 1968 yang berisi panduan dalam

---

4 As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hal. 33.

5 As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hal. 34.

pengucapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 1978 disahkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*). Di dalamnya tidak hanya diatur keharusan mengamalkan Pancasila, tetapi juga disebutkan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila yang terdiri dari 36 butir yang harus dilaksanakan "secara bulat dan utuh" oleh segenap bangsa.

Meski oleh sebagian golongan Islam, upaya itu sempat ditolak karena dianggap meng-agama-kan Pancasila, tetapi Soeharto tetap bersikeras untuk membentengi Pancasila. Selanjutnya, pada Agustus 1982 Pemerintahan Orde Baru menerapkan "Azas Tunggal" yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai Azas Tunggal, dimana partai politik diwajibkan mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.[6] Sebagai konsekuensinya, Pancasila tidak saja sebagai dasar negara, sebagai falsafah hidup berbangsa, tetapi lebih jauh digunakan untuk menekan perbedaan politik. Ia menjadi alat represi ideologi politik dan memberangus lawan politik di pentas publik. Skrining ideologi mulai dari partai politik, organisasi massa, hingga ke urusan pribadi menjadi fenomena yang mencolok selama Orde Baru.

Melalui cara itu, pemerintahan Soeharto memang berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Akan tetapi, pengamalan Pancasilanya dianggap justru bertentangan dengan Pancasila. Pancasila ditafsirkan secara monopolistis sesuai kepentingan rezim

---

[6] Dodo, dkk (ed), *Konsistensi Nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya*, (Yogyakarta: PSP Press, 2010), hal. 43-44.

penguasa, sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila digunakan sebagai alat doktrinal dan legitimasi politik. Titik kulminasi keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional yang menimbulkan berbagai gerakan rakyat di bawah kepeloporan mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya "reformasi" di segala bidang politik, ekonomi dan hukum.[7]

Pada era reformasi, muncul euforia untuk melakukan penataan perangkat-perangkat negara dengan tuntuan adanya liberalisasi politik. Pada masa ini, dipengaruhi trauma indoktrinasi Pancasila sebelumnya—juga oleh sebab derasnya arus globalisasi—bangsa Indonesia tidak begitu apresiatif bahkan cenderung 'fobia' terhadap Pancasila. Semangat generasi Reformasi oleh BJ Habibie digambarkan sebagai "semangat menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru". Akibatnya, muncul 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai "*grundnorm*" (norma dasar) sebagai payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga dari beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, dan afiliasi politik.[8]

Meskipun dewasa ini Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sah, tetapi pada hakekatnya esensi-esensinya tidak secara kuat mendasari kebijakan-kebijakan pembangunan nasional. Kondisi itu kemudian berdampak cukup fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sosial, masyarakat

---

7 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: Paradigma, 2000), hal. 245.

8 Lihat Pidato Presiden Ketiga Habibie, 1 Juni 2011.

kehilangan kendali atas dirinya, sehingga sering terjadi konflik horisontal dan vertikal yang melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan negara bangsa. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, sehingga terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor dan diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik cenderung mengeksploitasi kepentingan Negara untuk kepentingan kelompok dan golongan, sementara hasrat kekuasaan begitu kuat pengaruhnya, tetapi sayangnya bukan untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, tetapi demi kepentingan pribadi dan kelompok.[9]

Dari latar belakang ini, muncullah kegelisahan dan keprihatinan banyak pihak, terutama kaum elit dan warga Negara yang waras, yang berkeinginan keras untuk menghadirkan kembali Pancasila ke tengah jiwa kehidupan masyarakat. Pada tahun 2004, misalnya, intelektual Muslim Azyumardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas nasional. Seruan demikian tampak signifikan karena proses amandeman UUD 1945 saat itu sempat memunculkan gagasan menghidupkan kembali Piagam Jakarta.[10] Selain keadaan di atas, juga terjadi terorisme yang mengatasnamakan agama. Tidak

---

9 Arief Hidayat, "*Negara Hukum Pancasila* (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)" makalah disampaikan pada Kongres Pancasila IV di UGM Yogyakarta 2012.

10 As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, hal.51.

lama kemudian muncul gejala Perda Syariah di sejumlah daerah. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan publik selama reformasi yang mempertanyakan arah gerakan reformasi dan demokratisasi. Seruan Azyumardi Azra direspon sejumlah kalangan dan membuat diskursus mengenai revitalisasi Pancasila meluas dalam berbagai kegiatan akademik serta menghiasi wacana publik.

Artinya, wacana mengenai revitalisasi Pancasila pasca reformasi 1998 baru mengemuka setelah kurang lebih satu dekade energi bangsa Indonesia difokuskan untuk mengisi dan menjalankan agenda reformasi. Wacana itu muncul seiring meningkatnya kekhawatiran berbagai pihak terhadap situasi kebangsaan yang menunjukkan gejala perpecahan dan pertentangan. Sejak saat itu, lahir berbagai istilah konseptual seperti reaktualisasi, rejuvenasi, dan revitalitalisasi Pancasila. Meskipun istilah itu berbeda-beda, tetapi semangat dan tujuannya tidak jauh beda, yaitu upaya untuk kembali kepada nilai-nilai Pancasila.

Secara umum, revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti 'proses, cara atau perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.' Dalam hal ini, revitalisasi Pancasila berarti menghidupkan atau menggiatkan kembali pemahaman dan penghayatan Pancasila dan mengamalkan nilai-nilainya dalam berbangsa dan bernegara. Dari definisi ini revitalisasi dapat ditafsirkan ke dalam berbagai perspektif.

Dalam perspektif hukum, misalnya, Arief Hidayat, mengartikan revitalisasi Pancasila sebagai upaya internalisasi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dan rambu-rambu hukum nasional. Revitalisasi Pancasila

sebagai idelogi juga dimaknai sebagai upaya mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, mulai dari pembentukan hukum hingga pelaksanaan dan penegakan hukum. Menurutnya, revitalisasi perlu dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma berhukum guna memperkecil jarak antara *das sollen* dan *das sein*, sekaligus memastikan nilai-nilai Pancasila senantiasa bersemayam dalam hukum.[11]

Sebagai upaya yang baru muncul belakangan, konsep dan kerangka kerja revitalisasi Pancasila masih perlu terus diterjemahkan dan diterapkan. Itulah sebabnya, definisi konseptual revitalisasi Pancasila berikut definisi operasionalnya masih sangat terbatas, sehingga dalam kajian akademik ini lebih mengambil pengertian umum revitalisasi Pancasila, yaitu upaya menghidupkan atau menggiatkan kembali pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di kalangan generasi milenial.

B. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Sejak disahkannya pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi menjadi konsensus nasional pertama mengenai dasar dan ideologi negara. Seluruh pengaturan terkait penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mengacu pada rumusan Pancasila. Begitu juga, seluruh upaya mencapai cita-cita dan tujuan bangsa di berbagai bidang harus diorganisasi di bawah sistem kehidupan nasional yang bernafaskan Pancasila.

---

[11] Arief Hidayat, "Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum" dalam Seminar Nasional Hukum, Vol.3 No.1 Tahun 2016.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat adalah sebagai berikut: "... dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Rumusan tersebut secara yuridis sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Rumusan tersebut juga bersifat final dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang memiliki hukum derajat tinggi. Meskipun UUD NRI 1945 beberapa kali mengalami perubahan, tetapi kenyataannya Pancasila tetap tercantum dalam konstitusi.[12]

Sebagai konsensus nasional yang lahir di tengah pergulatan ideologi dunia dan digali dari karakteristik bangsa Indonesia, Pancasila memuat konsepsi dan cita-cita kebangsaan yang modern dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, agama, keyakinan, budaya dan bahasa yang tersebar di seluruh wilayah yang begitu luas, tetapi prinsip-prinsip Pancasila tidaklah membuat kemajemukan itu menjadi tercerai-

---

[12] MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), hal.87-88.

berai.

Sebaliknya, kehadiran Pancasila justru menjadi kekuatan pemersatu dan mengikat perbedaan ke dalam—meminjam istilah Yudi Latif—"universum simbolik" yang menjadi titik temu berbagai nilai dan berfungsi sebagai pijakan kebersamaan (*common denominator*).[13] Dengan kata lain, Pancasila adalah ruh bangsa, dasar pikiran, cita bangsa dan cita hukum yang secara khas dimiliki oleh negara-bangsa Indonesia.

Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini merupakan intisari kehidupan spiritual masyarakat Indonesia yang menganut banyak agama dan kepercayaan. Meski berbeda penyebutan, inti dari semuanya ialah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esa artinya tunggal, tak dapat dibagi. Sebab, Tuhan yang disembah berbagai ras dan suku bangsa sesuai agama dan kepercayaannya serta menurut peristilahannya masing-masing memang hanya satu, tunggal, tak dapat dibagi.

Oleh karena itu, sila pertama ini menjadi dasar spiritual dan moral bangsa, baik dalam kontek kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat, dalam rangka mewujudkan cita-cita kenegaraan.[14] Semua perilaku atau tindakan kehidupan berbangsa dan bernegara pertama-tama disandarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran Tuhan atau bahkan menyangkal keberadaan

---

[13] Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila,* (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 321.

[14] Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 90.

Tuhan haruslah ditolak.

Sila kedua berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan adalah pengertian abstrak manusia dalam arti hakikat atau esensinya. Sehubungan dengan ini dikenal juga istilah perikemanusiaan, menunjuk pada pengertian jiwa yang merasakan adanya hubungan antara manusia dengan manusia lain di atas harkat dan martabat yang sama. Adil berarti sama, seimbang, tidak membeda-bedakan. Keadilan sifatnya intuitif, bisa ketahui dan dirasakan melalui hati nurani. Meski tidak belajar khusus tentang keadilan, hati nurani dapat membedakan perilaku mana yang adil dan tidak adil. Sedangkan beradab berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai moral kemanusiaan (kebalikannya biadab). Dengan demikian, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan kewajiban atau tuntutan agar setiap manusia diperlakukan secara adil dan beradab sesuai dengan kodratnya selaku manusia. Sebaliknya, semua pandangan, sikap atau kebiasaan yang bertentangan dengan kodrat kemanusiaan haruslah ditolak. Sila kedua ini oleh Soekarno disebut juga internasionalisme karena memuat prinsip kemanusiaan universal.[15]

Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata "satu" yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Kata "Indonesia" mengacu pada bangsa sekaligus negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, Persatuan Indonesia menunjuk pada komitmen dan kehendak segenap tumpah darah Indonesia untuk hidup satu bangsa, satu nusa atau

[15] Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 108-109.

tanah air serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Meski bangsa Indonesia terdiri dari bermacam suku, agama, bahasa yang terpencar di berbagai pulau, tetapi komitmen dan kehendak itu telah menyebabkan Indonesia menjadi satu kesatuan. Komitmen dan kehendak itu secara mendalam tergambar dalam prinsip persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, masalah apa pun yang berpotensi meretakkan dan memecahkan kesatuan berbangsa, harus dihindari dengan sekuat tanaga.

Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Kerakyatan berasal dari "rakyat" yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan sering juga disebut kedaulatan rakyat di mana rakyat adalah satu-satunya yang berdaulat. Hikmah kebijaksanaan artinya arif dan bijaksana (bahasa Arab hikmah: kebijaksanaan). Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran rasional dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperhatikan kepentingan rakyat secara jujur dan bertanggungjawab. Sedangkan permusyawaratan/perwakilan bisa dartikan sebagai pelaksanaan demokrasi. Permusyawaratan (bahasa Arab musyâwarah: musyawarah) adalah pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, bulat hati dan pikiran untuk permufakatan. Adapun perwakilan adalah cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sistem perwakilan. Sila keempat ini merupakan prinsip dasar sistem pemerintahan yang

harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[16]

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini mencerminkan tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Keadilan sosial memiliki banyak aspek, termasuk aspek agama, budaya, pendidikan, politik, hukum, dan aspek ekonomi. Negara mempunyai kewajiban mengupayakan keadilan demi terciptanya kesejahteraan, material maupun spiritual. Ini adalah konsekuensi dari tiga sila sebelumnya yang didasarkan atas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, apalah arti sila keempat tanpa sila ketiga, dan apalah arti sila ketiga tanpa adanya pemahaman sila kedua, dan apalah arti sila kedua jika tidak ada sila pertama? Menaruh kepercayaan pada Tuhan berarti bersedia menjalankan perintah-Nya untuk menciptakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan antar sesama. Jadi, memahami sila kelima sebagai sebuah tujuan juga tidak lepas disusunnya Pancasila secara hirarkis piramidal.

Kelima sila tersebut mengandung nilai-nilai fundamental, esensi-esensi dan hakekat kesepakatan yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlepas dari perdebatan sengit seputar perumusan Pancasila, pada akhirnya segenap founding fathers bersikukuh untuk bersikap satu suara untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Egosime primordial-keagamaan ditenggelamkan di bawah kebijaksanaan yang mengatasi sekat-sekat ideologis dan kepentingan. Sejak saat itu,

---

[16] Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 169-171.

semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada Pancasila.

C. Globalisasi dan Generasi Milenial

Seperti dinyatakan di muka, bahwa satu penyebab dikesampingkannya Pancasila pada era Reformasi ialah karena derasnya arus globalisasi yang mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi maupun sosial budaya. Globalisasi dengan segala muatan nilainya telah memengaruhi cara pandang serta gaya hidup masyarakat. Di sini gempuran ideologi liberalisme dan kapitalisme juga radikalisme dan ekstrimisme berikut ekses yang ditimbulkannya mulai merasuk ke ruang pribadi warga.

Fenomena globalisasi samakin tak terkendalikan karena ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Merujuk pada pendapat Marshall McLuhan, sebagaimana dikutip oleh Fayakhun Andriyadi,[17] sepanjang sejarah manusia telah menjalani empat periode perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. *Pertama, the tribal age*, dimana manusia hanya mengandalkan indera pendengaran dalam menjalankan sistem komunikasinya. *Kedua*, *the age of literacy*. Era ini ditandai dengan ditemukannya alfabet atau huruf. Di era literasi ini, komunikasi yang dijalankan manusia tidak lagi mengandalkan tuturan, tapi lebih kepada tulisan. *Ketiga, the print age*. Era ini memberikan pengaruh besar pada kemajuan pola dan sistem komunikasi manusia, ditandai dengan penemuan teknologi, terutama mesin cetak.

---

[17] Lihat Disertasi Fayakhun Andriyadi, "Demokrasi Era Digital: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial dalam Partisipasi Politik oleh Pendukung Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017", Disertasi Universitas Indonesia 2015, hal. 41-42.

Keempat, the electronic age. Era ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam alat atau teknologi komunikasi, seperti telegram, telepon, radio, film, televisi, komputer, dan internet. Di era ini sistem komunikasi jauh lebih efisien, terintegrasi, dan cepat. Era ini oleh Marshall McLuhan disebut sebagai "global village", kampung global yang mengimajinasikan pertemuan antar warga di berbagai belahan dunia.

Masih dalam aras penjelasan yang sama, disertasi Fayakhun juga mengutip Everett M. Rogers yang membagi sejarah evolusi komunikasi manusia dalam empat era, yaitu: era tulisan, era cetakan, era telekomunikasi, dan era interaktif .[18] Di era terakhir ini, alat-alat komunikasi dan informasi baru ditemukan demikian cepat, yang memiliki kelebihan khusus dibanding alat sebelumnya. Era interaktif ini mengalami perkembangan terus menerus. Inovasi terus dilakukan untuk menghasilkan temuan-temuan baru dalam bidang komunikasi dan informasi. Secara gradual, era interaktif ini berkembang dalam empat tahapan, yakni:[19]

Pertama, era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960, ketika microcomputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan-perusahaan komputer ke dunia industri. Kemampuan hitung yang demikian cepat membuat pemakaian komputer di masa ini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi. Karena terbukti penggunaan komputer jauh lebih efisien dibandingkan dengan tenaga manusia. Namun, penggunaan komputer di

---

[18] Lihat Disertasi Fayakhun Andriyadi, hal. 42-43.

[19] Indrajit Richardus Eko, *E-Commerse: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hal. 9.

era ini masih pada taraf yang sederhana dan terbatas.

Kedua, era teknologi informasi. Di awal tahun 1970, teknologi personal computer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti minicomputer. Tidak seperti di era komputerisasi, dimana dalam sebuah perusahaan komputer hanya "milik pribadi" divisi EDP (electronic data processing), di era teknologi informasi ini setiap individu di perusahaan dapat memanfaatkan kecanggihan komputer untuk berbagai kepentingan, seperti mengelola database atau data processing. Dengan seperangkat komputer yang dapat diletakkan di atas meja (desktop), informasi dan data dapat diperoleh dengan cepat. Pada era ini, komputer memasuki era barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif.

Ketiga, era sistem informasi. Tidak seperti kedua era sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologinya, di era ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasinya. Karena komputer dan teknologi informasi dianggap sebagai bagian dari komponen dari sistem tersebut. Sehingga yang menjadi kunci adalah bagaimana menciptakan dan menguasai informasi secara cepat dan akurat. Di sini, persepsi manusia terhadap teknologi sudah mulai mengalami pergeseran. Dari yang berorientasi pada perangkat material teknologinya menuju aspek optimalisasi fungsionalitasnya.

Keempat, era globalisasi informasi. Ini adalah era dimana informasi menjadi raja yang menentukan banyak aspek kehidupan manusia. Era ini sering dimasukkan ke dalam kategori sejarah evaluasi teknologi informasi. Sejak pertengahan tahun 1980, perkembangan di bidang teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) sedemikian pesatnya, sehingga kalau digambarkan secara

grafis, kemajuan yang terjadi terlihat seperti eksponensial. Banyak kalangan yang kaget dengan fakta pesatnya perkembangan internet.[20]

Pada taraf selanjutnya, perkembangan internet ternyata begitu cepat. Menurut Domminick, pengembangan internet terbagi dalam tiga bentuk.[21] *Pertama*, *world wide web* (WWW). Ini merupakan seperangkat protokol dan standar-standar yang digunakan untuk mengakses informasi yang tersedia di internet, dimana medium fisiknya digunakan untuk memindahkan data. Penemuan WWW bermula dari kebutuhan para ilmuwan yang terlibat dalam penelitian fisika di organisasi untuk penelitian nuklir Eropa (CERN) pada tahun 1989.[22]

Kedua, pengembangan internet mengalami kemajuan setingkat dengan diciptakannya *browser*. Pada tahun 1993, dikenal *browser* yang bernama mosaic. Kehadiran browser semakin mempermudah sistem informasi, karena pengguna internet bisa mempercepat proses pencarian informasi dengan menggunakan bantuan sistem ini. *Ketiga*, tahapan pengembangan internet ditandai dengan diciptakannya *search engine*, yang hingga saat ini salah satunya menjelma menjadi brand yang dikenal luas oleh pengguna internet, yaitu Yahoo! dan Google. Terciptanya search engine semakin meneguhkan digdaya internet dalam hal efisiensi pencarian, pengumpulan, dan kompilasi informasi dari berbagai

---

[20] Indrajit Richardus Eko, *E-Commerse: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, hal. 14.

[21] Joseph R. Domminic, *The Dynamic of Mass Communication*, (New York: McGraw Hills, 2009), hal. 278.

[22] Tim Berners-Lee, Information Management: A Proposal, Maret 1989, www.cds.cern.ch, (Diakses pada 4 November 2013).

sumber. Internet semakin dominan sebagai pusat data dan informasi.

Kini, globalisasi telah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 4.0. Revolusi ini secara fundamental mengubah cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini juga disebut akan mendisrupsi aktivitas manusia dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Di sektor ekonomi misalnya, telah terlihat bagaimana sektor jasa transportasi dari kehadiran taksi dan ojeg daring. Di bidang sosial, interaksi bergulir menjadi tanpa batas karena kemudahan akses internet dan teknologi. Hal sama juga terjadi dalam bidang politik. Melalui kemudahan akses digital, aksi politik kini dapat dihimpun melalui gerakan-gerakan berbasis media sosial dengan mengusung ideologi politik tertentu.[23]

Sebagaimana diuraikan Banu Prasetyo dan Umi Trisanti, dengan mengutip Klaus Shwab dalam The Fourth Industrial Revolution, sejauh ini dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu: 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara masal, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah, 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970an melalui penggunaan komputerisasi, dan 4) Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa intelegensia dan internet

---

[23] Banu Prasetyo dan Umi Trisanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial" dalam Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", hal. 1.

of thing sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.[24]

Akan tetapi di balik kemudahan yang ditawarkan, Revolusi Industri 4.0 menyimpan berbagai dampak negatif. Secara lebih mendasar, penetrasi teknologi yang serba disruptif telah memengaruhi mental dan kepribadian generasi milenial menjadi pribadi yang khas. Tanpa disadari kondisi tersebut telah memaksa mereka hidup dalam realitas baru yang seringkali berjarak dengan sistem nilai dalam tatanan lama. Banjir informasi di media sosial dan online serta tersedianya aplikasi mesin pencarian (search engine) di internet, turut berpengaruh dalam membentuk cara pandang, sikap dan perilaku. Padahal tak jarang konten informasi medsos terkadang bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai fundamental, ideologis dan fiilosofis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Akibatnya, belakangan ini mulai tumbuh subur gejala seperti konservatisme agama, radikalisme, ekstremisme, intoleransi, juga politik identitas, hoax, ujaran kebencian, dan paham post-truth yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan tersebut adalah generasi milenial. Istilah milenial (millennial) pertama kali dicetuskan oleh William Strauss dan Neil Howe tahun 1987 dan dipopulerkan dalam bukunya Millennials Rising: The Next Great Generation (2000). Istilah itu merujuk pada generasi yang lahir dalam rentang tahun 1982 sampai

---

[24] Banu Prasetyo dan Umi Trisanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial" dalam Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", hal. 1.

tahun 2000. Sementara, istilah generasi digital (digital generation) dibuat oleh Tapscott (1998) dan menunjuk pada generasi yang lahir antara tahun 1976 sampai 2000. Di samping istilah itu ada juga istilah generasi Y/Net Gen bagi yang lahir antara 1981-195. Namun dari semua istilah itu, Howe dan Strauss bersama Lancaster dan Stillman (2000) serta Martin dan Tulgan (2000) menyebut dan menyamakan generasi milenial dan generasi Y meski rentang kelahirannya berbeda.

Sebagai kelompok usia muda yang lahir dan besar di tengah kemewahan yang disediakan kemajuan teknologi digital, generasi ini memiliki keunggulan dibanding generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi komunikasi-informasi. Mereka tidak hanya akrab dengan teknologi melainkan juga mengandalkan teknologi di hampir semua sendi kehidupannya. Namun di balik semua keunggulan itu, generasi mileneal disebut juga sebagai generasi labil akibat proses pencarian jati diri. Teknologi yang cepat berkembang tanpa disadari telah menjadi candu bagi kehidupan mereka.

Generasi milenial bersosialisasi secara aktif di kehidupan dunia maya. Sedangkan kehidupan dunia maya ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, jejaring sosial yang tersedia menggiurkan; berguna untuk memperluas jejaring pertemanan, relasi bisnis, hingga rekan satu forum dengan kepentingan yang sama. Namun di sisi lain, kehidupan dunia maya juga bisa bermasalah jika digunakan secara tidak dewasa dan tidak dengan pengetahuan yang baik. Di sinilah kemudian berbagai pengaruh dari ideologi dan gaya hidup yang bertentangan dengan Pancasila mudah berpenetrasi dan berpengaruh. Saat ini gejala pengaruh itu sudah terlihat seperti gaya

hidup konsumerisme dan hedonisme, ekspresi kebebasan yang tanpa batas, hilangnya perilaku etis di media sosial, hingga menguatnya sikap dan perilaku radikal.

Bab III

PERSEPSI ANAK MUDA MILENIAL TERHADAP PANCASILA

Pancasila merupakan dasar negara, falsafah dan pandangan hidup serta nilai luhur segenap bangsa Indonesia, hasil dari kesepakatan dan permufakatan *par excellent* antara tokoh-tokoh nasional pendiri Negara Republik Indonesia yang cerdas dan hebat menjelang proklamasi kemerdekaan 1945. Dasar Negara yang kokoh itu berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang terkenal kaya akan keragaman suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan kebiasaan. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan seperangkat norma dasar yang juga berfungsi merekatkan dan menyatukan. Keragaman yang tidak dikelola dan disatukan akan dengan mudah dihancurkan.

Karenanya, tiap warga negara, sampai kapan pun, perlu memahami, menjiwai, dan mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, terutama kaum milenialnya. Namun demikian, memperkenalkan dan memahamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak muda milenial tidak lah mudah yang hidup dalam setting sosial dimana teknologi informasi dan media sosial berkembang dengan pesat dan menjadikan mereka *native digital*. Meskipun tidak selalu maksimal dalam hal pembelajaran di dalam ruang kelas, mereka cenderung kreatif dan memiliki literasi teknologi serta media sosial yang lebih baik. Pemerintah perlu menyikapi perkembangan ini secara tepat, karena strategi dan kebijkan yang diterapkan pemerintah jelas berdampak pada pembentukan pemahaman generasi muda tentang Pancasila.

Tulisan ini membahas pandangan anak muda tentang Pancasila serta pengamalan Pancasila dalam kehidupam mereka sehari-hari. Selain itu, tulisan ini juga membahas perspektif anak muda mengenai Pancasila sebagai ideologi dan alat pemersatu bangsa. Dan yang tidak kalah penting dalam tulisan ini adalah pembahasan mengenai pandangan anak muda perihal hubungan Pancasila, ajaran agama dan nilai kebangsaan.

A. Pancasila di Mata Anak Muda Milenial

Secara umum anak muda milenial memiliki kesepakatan umum bahwa Pancasila, sebagai kesepakatan brilian para *founding father*s, adalah dasar dan ideologi negara. Bagi mereka, dengan fungsi strategis tersebut, Pancasila dapat menjadi alat pemersatu yang kuat dan kokoh. Desnita, mahasiswi Protestan asal Nias, berpandangan bahwa Pancasila merupakan pondasi bangsa. Ibarat rumah, Pancasila merupakan pondasi penopang strukturnya. Jika pondasinya rubuh, maka struktur rumah akan rubuh. Jika generasi milenial tidak sadar akan fungsi Pancasila sebagai pondasi berbangsa dan bernegara, maka bangunan negara ini dapat runtuh.[1]

Pandangan Desnita sesungguhnya merujuk pada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia sebagaimana tujuan dirumuskannya Pancasila. Pancasila merupakan *weltanschuung* (pandangan dunia) atau falsafah hidup. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diharapkan jadi pijakan perilaku atau tindakan setiap warga negara.

---

[1] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik "Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Anak Muda Milenial Indonesia", CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 28 September 2019. Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", hal. 1.

Semua aspek kehidupan bangsa menyangkut kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya harus disandarkan pada nilai-nilai tersebut.

Pancasila merupakan sistem filsafat yang menginspirasi pemikiran berdirinya negara Indonesia. Ini sesuai dengan pidato Soekarno di depan Badan Penyelidik Usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945:

> Banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah—dalam bahasa Belanda—"philosofische grondslag" dari Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi... Paduka Tuan yang mulia! Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki? Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta philosofische grondslag, atau—jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk—Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu "Weltanschauung" di atas mana kita mendirikan negara Indonesia.[2]

Sebagai dasar dan pandangan hidup, Pancasila memuat konsepsi dan cita-cita kebangsaan modern yang secara khas dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kelahirannya memang diilhami oleh gagasan-gagasan besar ideologi dunia, tetapi perumusannya tetap digali dan berakar pada

---

[2] Simpatisan Pembela Pancasila, *Bung Karno & Pancasila: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, hal. 13-14 & 25.

gagasan, karakter, kepribadian, dan kebudayaan Indonesia. Keberadaannya berfungsi sebagai dasar pikiran, bintang penuntun, cita bangsa, dan cita hukum yang mengorganisasi kehidupan masyarakat ke dalam sistem kehidupan nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Frudence yang beragama Konghucu memahami Pancasila dalam bingkai sistem tersebut, yaitu sebagai ideologI bangsa yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.[3] Menurutnya, Pancasila dibuat sudah melewati proses panjang oleh para pendiri bangsa serta telah menjadi kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia. Jika terdapat ideologi lain yang bertentangan dan berpotensi merusak keperibadian itu, maka Pancasila akan menjadi tameng yang kuat dan tahan banting (*durable*) untuk menjaga Indonesia.

Bagi Frudence, pemaknaan terhadap sila kedua Kemanusian yang Adil dan Beradab adalah persamaan di depan hukum. Yakni pesamaan kedudukan dan perlakuan atas sesama manusia yang pada hakekatnya bersaudara, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sedangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia, merujuk pada realitas masyarakat yang heterogen yang disatukan oleh nilai hidup di bawah semboyan *bhinneka tunggal ika*. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dimaknai sebagai prinsip pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Sedangkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, walaupun

---

[3] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

Indonesia terdiri dari suku bangsa dan agama yang berbeda-beda, tetapi dapat senantiasa saling menghormati dan saling merangkul.

Robby Surya, siswa SMA di Depok, mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sudah komplit. Namun pengamalannya tergantung pada rakyatnya, apakah akan menaati atau justru sebaliknya.[4] Namun demikian, sebagai konsepsi dan cita-cita kebangsaan ia sama sekali tidak ragu akan ketepatan, keampuhan dan keandalan Pancasila dalam menuntun arah perjalanan bangsa serta menjamin persatuan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Pandangan serupa juga disampaikan Fajar Syahrullah, mahasiswa UIN Jakarta. Ia meyakini bahwa sampai hari ini Pancasila mampu menjadi titik persatuan dan mampu mengakomodir semua kepentingan elemen bangsa baik suku maupun agama. "Sampai saat ini saya yakin Pancasila masih tepat menjadi pegangan dan ideologi bangsa".[5] Karenanya, ia bersikap tegas menolak bentuk gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

B. Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Anak Muda Milenial

Secara ideologis, perumusan Pancasila ditujukan untuk menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap sila merupakan hasil refleksi dan abstraksi mendalam sekaligus ekstraksi pemikiran atas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ia menjadi titik temu berbagai keragaman anasir nilai yang

---

4 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

5 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 25 September 2019.

ada pada masyarakat Indonesia. Bangunan prinsipalnya dianggap mewakili seluruh fragmen nilai serta kompatibel dengan tata nilai yang berkembang pada saat itu bahkan sampai saat ini.

Karena digali dari tata nilai yang berkembang dalam masyarakat, maka pada dasarnya Pancasila merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup masyarakat Indonesia. Ibarat badan dan ruh, Pancasila adalah ruh bangsa Indonesia yang selama ini telah dijalani, dihayati, dan dipraktikkan. Sebagaimana dikemukakan Notonagoro, "lima unsur yang terdapat pada Pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat".[6]

Situasi semacam itu pula yang dialami Ahmad Saeroji, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari pengalamannya di Majalengka, ia menyadari bahwa cara hidup masyarakat Indonesia sudah menjalankan Pancasila, bahkan sebelum Pancasila dirumuskan. Salah satu contohnya, sejak dulu masyarakat di desanya sudah terbiasa hidup berdampingan dengan beda suku atau agama. Dengan kata lain, selama ini apa yang termuat dalam Pancasila sudah menjadi gaya hidup masyarakat sehingga bukanlah sesuatu yang baru lagi.

---

[6] Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, Cet ke-VII 2017), hal. 90.

> Sebenarnya cara hidup masyarakat kita itu sudah mempraktikkan Pancasila secara tidak langsung. Jadi tanpa dirumuskan pun sudah menjadi jalan. Di desa saya di Majalengka, saya berasal dari desa yang tertinggal. Yang sarjana itu masih jarang. Dan banyak yang Katolik, dan kalau ditanya kenapa bisa hidup berdampingan, ya itu sudah menjadi gaya hidup tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Di kampung saya bahkan ada anak seorang Katolik yang belajar ngaji dan tidak dilarang oleh ibunya, walaupun ini tidak lantas mengubah keyakinannya.[7]

Satu hal mendasar yang perlu digarisbawahi dari pernyataan tersebut adalah penilaian atas setiap perilaku tidak selalu dikembalikan pada niat atau motivasi dasarnya. Dalam kasus ini, menilai apakah seseorang Pancasilais atau tidak bukan hanya didasarkan pada kesadarannya untuk mengikuti nilai-nilai Pancasila. Lebih dari itu, sejauhmana perilaku itu mencerminkan dan merefleksikan esensi Pancasila. Artinya, meskipun tidak merasa sebagai sebuah kesadaran, tetapi perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila itu harus dianggap sebagai praktik tersendiri yang menjiwai Pancasila, seperti pengalaman Saeroji di atas.

Berbeda lagi dengan pengalaman Ni Made Intan Supriyanti, Mahasiswa Universitas Indonesia beragama Hindu. Ia mendapati nilai-nilai Pancasila diletakkan sebagai acuan ideologis yang diinternalisasi dalam praktik keagamaan. Misalnya dalam kegiatan keagamaan Pasraman yang sengaja manjadikan nilai Pancasila sebagai sumber nilai dan perilaku. Dalam kegiatan itu,

---

7 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 25 September 2019.

nilai Pancasila dipraktikkan dalam proses ibadah, sebagai perwujudan sila pertama. Selain itu, ada kegiatan gotong-royong di rumah suci, juga kegiatan musyawarah. Jadi Pancasila masih dirasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kegiatan gotong royong dalam kegiatan keagamaan di Bali sudah menjadi kebiasaan. Misalkan Pecalang atau polisi adat menjaga umat Muslim yang melaksanakan salat Jumat, idul fitri, dan sebagainya.[8] Pun begitu sebaliknya. Praktik ini dianggap menjadi kunci mengenali keragaman, saling menghargai dan menghormati, hidup rukun, dan bekerjasama satu sama lain.

Kiswati yang beragama Budha dan bersekolah di STAB Nalanda juga memiliki pengalaman serupa. Ia mengatakan bahwa temannya beragama Kristen asal Papua, dan mereka memiliki rasa saling menghormati dan memahami soal kewajiban masing-masing untuk beribadah. Bahkan mereka pun saling bertanya tentang agama masing-masing sehingga terbangun kesalingpahaman dan bukan kesalahpahaman.[9] Semua ini terjadi karena Kiswati dan teman-temannya menyadari bahwa Indonesia berlandaskan Pancasila yang menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing, tanpa memaksakan kehendak atau kebenaran agamanya atas pemeluk agama lain.

Namun demikian, menurut Anastia Novlina, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia asal Flores, upaya mengamalkan Pancasila bukan berarti tanpa hambatan. Pendirian rumah ibadah menjadi salah satu contoh

---

8 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 25 September 2019.

9 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 25 September 2019.

hambatan tersebut. Di Bekasi jadi salah satu contoh baik tentang pendirian rumah ibadah, tetapi di tempat lain tidak demikian. Gereja Katolik tempat Novlina beribadah, izin pendiriannya baru diberikan setelah berproses selama 40 tahun.[10] Karena itu, menurutnya, anak muda milenial harus tetap memiliki semangat toleransi, termasuk manakala memperjuangkan hak-hak minoritas. Anak muda milenial harus berani tampil untuk mendobrak intoleransi.

Hingga saat ini sosialisasi dan internalisasi Pancasila telah dilakukan secara masif dengan melibatkan banyak lembaga-lembaga negara, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat hingga lembaga terkecil dalam lingkup keluarga. Meskipun masih banyak ditemui sejumlah problem dan hambatan, tetapi upaya ini setidaknya telah berhasil menumbuhkan kesadaran pelbagai elemen masyarakat untuk mengacu dan menghayati nilai-nilai Pancasila. Hasilnya, sejumlah survei menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat tinggi.

Misalnya, dari hasil survei CSRC UIN Jakarta bekerjasama dengan MPR RI tahun 2018, ditemukan bahwa sebanyak 99,8 persen masyarakat setuju dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Artinya, masyarakat Indonesia mengakui dan menerima Pancasila sbagai konsensus nasional pertama, serta menilainya sesuai bagi kehidupan mereka. Tidak hanya itu, sebanyak 99,4 persen masyarakat juga memandang Pancasila masih cocok bagi bangsa Indonesia sebagai dasar bertindak

[10] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 25 September 2019.

dalam kehidupan sehari-hari.[11] Meskipun perkembangan zaman telah membawa arus perubahan pesat, tetapi masyarakat tetap meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila masih relevan dan kontekstual diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Kesadaran tersebut pada tingkat lebih lanjut telah menghasilkan perilaku yang merefleksikan Pancasila di kalangan anak muda milenial, baik karena hasil didikan dan kebiasaan pergaulan di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan sosial tempat tinggal mereka. Pada sejumlah kasus, misalnya, ada sejumlah mahasiswa yang memiliki pengalaman yang baik dalam hal keberagaman. Sebut saja Vioni Putri, Livia Amelia, Kiswati, dan Ahmad Saeroji. Mereka hidup dalam lingkungan yang beragam dalam hal agama, pandangan atau pilihan, tetapi dapat berdampingan secara baik. Bahkan mereka dapat ikut ke rumah ibadah agama lain, atau ikut pelajaran agama lain. Tidak terdapat kekhawatiran akan ancaman terkucilkan atau pindah agama, karena tumbuhnya sikap saling menghormti dan memahami.

Vioni Putri, mahasiswa Sosiologi Universitas Indonesia beragama Katolik, mengaku mengerti Pancasila dari praktik kehidupan sehari-hari. Ia tidak terlalu menyadari apakah perilakunya termotivasi oleh Pancasila atau tidak, karena selama ini ia merasa lebih banyak didorong oleh keinginan diri sendiri. Alih-alih memahami muatan filosofisnya secara utuh, Pancasila baginya bagaikan sebuah struktur yang jauh, yang tidak tersentuh.[12] Yang

---

[11] CSRC dan MPR RI, "Survei Nasional Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI 2018" hal.101-103.

[12] Wawancara Vioni Puteri, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

dipahaminya hanyalah sederhana, yaitu perlunya menghargai eksistensi orang lain, bersikap toleran serta belajar yang baik agar nantinya dapat berkontribusi pada negara.

Pada awalnya Vioni tumbuh dalam lingkungan sosial yang homogen dan menempuh pendidikan di sekolah Katolik. Ia baru berkenalan dengan lingkungan yang lebih heterogen setelah kuliah di UI. Pada mulanya canggung, karenasadar akan keberadaan dirinya sebagai minoritas. Namun, setelah lama berbaur dalam kehidupan kampus yang plural, kekhawatiran semacam itu berakhir, karena sikap dari teman-teman dan dosen-dosennya yang terbuka dan toleran. Teman-temannya yang beragama Islam, Kristen, Katolik, dan Budha terbiasa sharing soal masalah-masalah keagamaan dan kepercayaan. Pengalaman ini menambah pengetahuan mereka serta membantu membuat mendewasakan sikap mereka, terutama dalam menghadapi perbedaan. "Kita saling menghargai, misal jika ada adzan tidak terlalu berisik, jika mau makan dan berdoa merasa bebas saja," ungkapnya.

Hal serupa juga dialami Livia Amelia, Mahasiswa UIN Jakarta, beragama Islam. Livia aktif sebagai peserta Young Interfaith Peacemaker Community yang memberinya pelajaran berharga dan tak terlupakan. Bersama teman-temanya, ia berkunjung ke rumah ibadah agama lain guna meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap agama lain. Ia juga terbiasa berdiskusi, aktif dalam berbagai kajian keagamaan, membahas masalah-masalah keagamaan yang viral, serta saling bertanya tentang ajaran agama dan lain sebagainya.[13] Dengan cara itu,

[13] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

anggapan negatif terhadap agama lain yang biasa menghantui mulai terkikis. Ini membantu membuatnya lebih terbuka terhadap perbedaan, dan makin menyadari akan arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup yang dapat merawat dan menyatukan keberagaman.

Adalah juga menarik untuk memperhatikan pengalaman Citra Nurani yang merasa menjadi "We are Indonesia, we are one", dari proses-proses sosial yang sederhana. Citra terbiasa tinggal di lingkungan sosial yang majemuk di mana nilai-nilai silaturahim kuat, sebagaimana diwujudkan dalam tradisi saling mengunjungi. Meskipun beragama Islam, Citra tidak merasa sunkan untuk berbelasungkawa ke gereja bila ada warga Nasrani yang meninggal. Sikap baik dan ramah dari sahabat-sahabatnya yang beragama Kristen memberinya sesuatu yang bermakna dalam hal pengalaman keberagaman.[14] Pengalaman toleransi yang sama diceritakan Adriana Dina dari Sumba. Penganut Kristen dan Katolik merasakan pengalaman toleransi ketika mereka bersama-sama memotong babi dan anjing dalam rangka merayakan natal. Ia memaknai kerja gotong-royong ini sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meksipun tidak semua yang hadir memakan daging babi tersebut.

Pengalaman lain diungkap Brama, siswa Muslim dari Sekolah Madania, mengenai kehidupan dan per-sahabatannya di sekolah dengan teman-teman dari berbagai latar belakang agama, seperti dari agama Katolik, Protestan, Saksi Yehuwa, dll. Menurutnya,

[14] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

pengalaman bersahabat dengan teman-teman dari agama lain menjadikannya lebih kaya akan praktik keberagaman. Para murid bersatu, toleran, saling menghargai satu sama lain. Dalam urusan privasi maupun berpendapat, ditanamkan sikap saling menghargai serta tidak saling menjatuhkan.

Senada dengan Brama, adalah pengalaman dari Alexandra Alessia, siswa sebuah SMA Katolik, namun tidak semua siswanya beragama Katolik. Sekolah ini juga menerima siswa beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pelajaran agama yang diajarkan di sekolah tersebut cenderung merujuk pada nilai-nilai agama Katolik yang universal. Misalnya ajaran soal cinta kasih, yang juga diajarkan oleh semua agama, atau membaca aspek humanisme dari kitab suci. "Setiap hari Jumat, sekolah mengadakan Bina Iman. Yang Katolik, ada games dan doa bersama. Yang Kristen juga ada sendiri. Yang Islam dianterin ke Mesjid buat salat Jumat".[15]

Pengalaman lain dituturkan oleh Putri Cahyaning, siswi MA Madrasah Pembangunan (MP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Putri, meskipun di sekolahnya semua siswa beragama Islam, namun jika ada pentas seni, ia dan teman-temanya sering mengundang siswa Kristen untuk tampil. Karena di Madrasah Pembangunan terdapat nilai yang harus ditaati, di antaranya berpakaian sopan, maka siswa Kristen yang datang ke MP menyesuikan dengan nilai yang hidup di situ.[16] Suasana ini dinilainya semakin membuka wawasannya tentang keberagaman masyarakat Indonesia

---

[15] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

[16] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

untuk kemudian membiasakan diri hidup berdampingan dan bekerja sama dalam perbedaan.

Pengalaman Frudence sebagai satu-satunya siswa beragama Khonghucu di sekolah Kristen juga menarik disimak. Keberadaannya sebagai siswa penganut Khonghucu terasa ringan karena sikap teman-teman Kristen-nya yang merangkul. Ini juga yang membuatnya merasa berni untuk terbuka dan bertanya, serta membuka diri terhadap orang lain. Frudence merasa dihormati keberadaannya walau hanya sendiri. Frudence mengikuti kelas Kristen pada pelajaran agama, karena ia belum memiliki guru agama Khonghucu. Di dalam kelas ia belajar pelajaran agama Konghucu dari buku yang dikirim secara mandiri tanpa merasa terganggu dengan kegiatan teman-teman lainnya yang beragama Kristen.

Begitu halnya yang dialami Bernard Peter, siswa SMA, yang hingga kini belum mendapatkan ruang ibadah sebagaimana ketiak ia masih duduk di bangku SMP dulu, manakala ia diberi ruangan tersendiri untuk bernyanyi, berkhutbah dan berdoa. Namun ketika di SMA, dia tidak lagi mendapatkan fasilitas dan juga guru agama, sebagaimana didapatkannya di bangsu SMP.

I Putu Hari Wesnawa, siswa beragama Hindu yang bersekolah di sebuah SMA di Tangerang Selatan menyatakan bahwa ia pernah diminta ke Pura untuk belajar agama karena ketidaktersediaan guru agama Hindu di SMA tersebut. Namun ketika datang masa ujian, soal ujian yang diberikan kepadanya ternyata berbeda dengan apa yang dipelajarinya di Pura, keluhnya. Pada awalnya Putu merasa sendiri sebagai satu-satunya siswa beragama Hindu, namun lama kelamaan ia merasa nyaman karena terbisa brsahabat akrab dengan siswa dari

agama lain.

Dalam hal berdiskusi membahas sejumlah masalah, sebagian milenial mulai memiliki pemikiraan terbuka dan mampu berdiskusi secara dialogis. Mereka bahkan tidak canggung untuk mendiskusikan tema hangat seperti wacana khilafah, dan menariknya, suasana diskusi diwarnai perdebatan pro-kontra. Setidaknya, kebiasaan berdiskusi secara terbuka membiasakan generasi milenial, terutama mahasiswanya, untuk terbuka menerima berbagai pemikiran yang berbeda-beda. Begitu pula soal perbedaan pilihan, misalnya dalam pemilihan BEM, mereka belajar berdemokrasi dan menghormati apapun hasilnya. Meskipun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, tetapi mereka berusaha untuk tetap menjaga persatuan. Paska pemilihan, siapa pun yang terpilih dan dari kelompok atau golongan mana pun ia berasal, sebisa mungkin diterima dengan mengutamakan sikap saling merangkul, mendengarkan aspirasi pihak lain, serta saling berpartisipasi dalam penyusun program demi kemajuan bersama. Seperti digambarkan Fajar Syahrullah: "bagaimanapun, perlu tetap dewasa dalam menyikapi itu dan sama-sama menurunkan ego serta mengesampingkan kepentingan masing-masing, demi kemaslahatan bersama".[17]

Dalam pemilihan pemimpin, milenial belajar banyak dari kasus politik yang diwarnai perilaku diskriminatif terhadap warga khususnya terhadap kelompok minoritas. Salah satunya Vioni Puteri, Mahasiswa Sosiologi Universitas Indonesia beragama Katolik. Ia belajar dari kasus Ahok dimana banyak orang mendiskreditkan Ahok

[17] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

karena agama dan raasnya, tanpa melihat kinerjanya. Dalam kaitan ini, Vioni merasa jelas bahwa masyarakat tidak sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.

> Contoh kasus, yang saya ingat, terkait Pilkada DKI 2017. Demo 212 dan 411. Saya dulu tinggal di Pluit. Dan letaknya tidak begitu jauh dengan si Ahok ini. Terus banyak kan demo yang menolak dia. Tapi kalau yang saya lihat, mereka yang demo ini bukan menolak kinerja si Ahok, tapi yang dipermasalahkan adalah agama dan etnis dia.[18]

Palatal, menurutnya, perbedaan agama semestinya tidak dijadikan alasan menolak kepemimpinan seseorang, karena UUD 1945 mengakui kebebasan beragama dan melindungi hak setiap warga Negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Baginya, kepemimpinan adalah masalah publik yang harusnya diukur melalui kinerja beserta komitmen untuk memajukan kepentingan bersama. Lagi pula, demokrasi pada dasarnya menghendaki setiap kebijakan publik, termasuk pemilihan kepemimpinan, dibangun atas dasar kekuatan argumen sehingga melahirkan sesuatu yang berkualitas. Sebaliknya, demokrasi yang dibangun berdarkan sentimen apalagi menggunakan politisasi agama, berpotensial merusak demokrasi itu sendiri, serta memecah belah persatuan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Livia Amelia, bahwa di tengah keberagaman dan kompleksitas persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, seharusnya masyarakat lebih melihat kualitas kepemimpinan seseorang sebagai persyaratan utama,

---

[18] Wawancara Vioni Puteri, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

ketimbang faktor suku dan agamanya.

Masih berkaitan dengan demokrasi sebagai pengejawantahan sil ke-4, milenial Ester Utami selaku pengurus OSIS berpendapat pentingnya mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Walaupun Ester pengurus inti, tapi ia tidak pernah memaksakan pendapatnya ke orang lain, apalagi mengharuskan anggota OSIS mengikuti pemikiran atau kemauannya. "Jadi selalu mau dengerin apa masukan orang dan itu selalu diterima dan dilaksanakan dalam sehari-hari," tegasnya.[19]

Ester mendapatkan pelajaran dari orang tuanya yang mengajarkannya untuk selalu menghargai pendapat orang lain. Ia terbiasa dilibatkan dalam musyawarah keluarga, diminta mengemukakan pendapatnya, serta ikut bertanggung atas pendapat dan pilihan yang telah diambi. Setiap keputusan yang diambil lewat musyawarah, ia akan berusaha mengikuti dan menjalaninya meski kadang ia sendiri kadang tidak menyetujuinya. Sedangkan dalam hal toleransi, di sekolah, Ester menyadari bahwa perbedaan adalah realitas yang niscaya antar sesama siswa. Karena itu, sikap yang perlu dikembangkan ialah menerima, menghargai dan menghormati perbedaan itu serta saling mendukung satu sama lain. Jika Ester mendapati temannya berpuasa, ia mencoba memahami, mendukung ibadahnya serta tidak minum atau makan di depannya.[20]

Begitu juga pengalaman Brama Fawwas. Di sekolahnya,

---

[19] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.
[20] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

mayoritas siswanya beragama Islam dan Kristen. Meskipun beragam, Brama dan teman-temannya menghargai pendapat teman-temannya yang berbeda agama dengannya. Baginya, pendapat seseorang tidaklah dinilai dari agamanya, melainkan sejauhmana pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan serta berguna untuk kepentingan bersama. Untuk mencapai keputusan bersama, setiap orang diperlakukan adil, punya hak yang sama mengemukakan pendapat, menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan. Meskipun demikian, sebagai siswa, Brama dan teman-temannya mengaku masih harus banyak belajar agar tidak bersikap egois dan menjaga agar tidak mengedepankan kepentingan agamanya masing-masing.[21]

Betapa pun dinamika kehidupan milenial memberi gambaran optimistis bahwa milenial memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila secara sungguh-sungguh, namun bagi Frudence, proses untuk saling memahami ternyata tidaklah mudah. Dia sendiri masih sering mengalami bullying seperti kata-kata "Tionghoa hitam". Begitu juga dengan tiga temannya asal Papua, yang sering di-bully di sekolah dengan kata-kata "hitam" dan "kriting." Padahal, teman-teman asal Papua memiliki kepribadian yang baik dan ramah, serta tulus dalam menjalin pertemanan.[22] Dari sini ia kemudian belajar tentang kesediaan dan ketulusan menerima sesuatu yang given, atau pemberian Tuhan yang tidak bisa diubah, yang berbeda dari kebanyakan, seperti warna kulit dan sejenisnya. Soal "jelek" atau "buruk" juga "menyeramkan"

---

[21] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

[22] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

atau "menakutkan", hanyalah persepsi sesaat yang dikonstruksi oleh isu, rumur, dan desas-desus dari pihak yang tidak jelas.

Johanes Hasea, mantan anggota kerohanian SMAN 78, bercerita bagaimana persepsi semacam itu sempat menghantui dirinya. Pada saat kerohanian Protestan dan Muslim mengadakan kegiatan bersama di sekolah, ia awalnya merasa pesimis. Ia mengira tiap siswa akan mengikuti egonya sesuai latar belakang agama masing-masing. Namun setelah tiap tahapan dalam kegiatan itu dijalankan, ternyata anggapan itu keliru. "Saya juga awalnya berpikir mereka tidak mau bekerjasama, namun ternyata kolaborasi berjalan lancar," tandasnya.[23]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan milenial terbentuk perilakunya, termasuk penghayatan dan pengamalannya terhadap Pancasila, dari kebiasaan lingkungan sekitar yang tanpa disadari sarat dengan nilai-nilai Pancasila. Tetpi ada juga sebagian anak muda milenial yang berpendapat bahwa pengamalan Pancasila masih belum sepenuhnya diwujudkan dengan baik. Karenanya, perlu upaya lebih holistik agar anak muda milenial lebih memahami dan mengamalkan Pancasila secara sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka sehari-hari.

C. Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa dan Negara

Sebagaimana ditegaskan dari awal tulisan ini, Pancasila merupakan dasar Negara, ideologi, falsafah, dan pandangan hidup, sebagaimana dimaksudkan sejak awal

---

[23] Wawancara Johanes Hasea Sitorus, Siswa SMAN 82 Jakarta.

perumusannya. Pada tingkat operasional, posisi Pancasila tersebut berfungsi sebagai alat kontrol tindakan sosial. Di sini bisa dikatakan bahwa Pancasila adalah ideologi politik yang berfungsi sebagai alat kontrol yang mengendalikan perilaku serta menjamin kesetiaan warga negara. Jika ideologi itu bekerja maksimal, maka akan terjalin interaksi kehidupan warga negara yang harmonis, bersatu dan bergotong royong menuju arah yang dicita-citakan. Namun sebaliknya, jika ideologi itu tidak berfungsi, maka berbagai dampak negatif seperti tindakan di luar batas hukum dan norma sosial akan menjelma menjadi kekuatan perusak dan pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.[24]

Kesadaran atas fungsi ideologis semacam itu begitu kuat di dalam benak para pendiri bangsa. Sejak awal mereka menandaskan keberadaan Pancasila sebagai ligatur (pemersatu) kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno melukiskan urgensi ideologis Pancasila secara ringkas namun meyakinkan:

> Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat mempersatu bangsa yang juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun yaitu terutama, Imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara

[24] Chaider S. Bamualim (ed), "*Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*" (CSRC UIN Jakarta, 2018), hal. 166.

> berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadiaan yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya.[25]

Hingga kini, Pancasila masih dipandang sakti, terutama karena kemampuannya mempertahankan fungsinya sebagai dasar Negara dan alat pemersatu. Keberadaannya tak tergoyahkan, meskipun berbagai tantangan dan ujian datang silih berganti. Hal tersebut tidak lepas dari penghayatan warga negara yang tetap setia mengawal, melakukan internalisasi dan ekternalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Walaupun tingkat kesadaran warga berbeda satu sama lain, tetapi kesadaran itu memberi daya tahan dan resistensi atas berbagai upaya yang merongrong dan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.

Seluruh warga negara Indonesia masih meyakini Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Dari survei CSRC UIN Jakarta tahun 2018, ditemukan bahwa 99,5 persen masyarakat yakin bahwa Pancasila dapat menjadi ideologi pemersatu bangsa yang majemuk ini. Hanya 0,5 persen yang menilai sebaliknya.[26] Artinya, publik menyadari bahwa Pancasila telah berperan sebagai kekuatan pengikat kemajemukan dalam konteks

---

[25] Soekarno, P*antja-Sila sebagai Dasar Negara Jilid 1-4*, (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1958), h.3. Lihat pula Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, hal. 94-95.

[26] CSRC dan MPR RI, "*Survei Nasional Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI 2018*" hal.102.

berbangsa dan bernegara. Pada Pancasila mereka menemukan bahasa yang sama antar warga negara sekaligus meneguhkan harapan dan cita-cita bersama yang ditempuh melalui kerja kolektif bangsa.

Pandangan demikian juga diutarakan oleh milenial dalam kajian akademik ini. Salah satunya adalah Fajar Syahrullah, mahasiswa UIN Jakarta asal Betawi. Menurutnya, Pancasila kokoh sebagai alat pemersatu yang mampu mengakomodir semua kepentingan, baik suku maupun agama. Dia juga yakin bahwa Pancasila masih relevan untuk dijadikan pegangan hidup warga negara.[27] Baginya, sampai saat ini belum ada ideologi yang cocok dan menyatukan segenap elemen dari berbagai wilayah selain Pancasila.

Dengan argumentasi yang kurang lebih sama, Ahmad Saeroji, menyebut Pancasila merupakan cerminan dari keragaman masyarakat Indonesia.[28] Keberagaman nilai-nilai budaya, agama, keyakinan, dan adat istiadat terangkum dalam nilai-nilai prinsipal Pancasila yang merangkai perbedaan dalam persatuan. Jika nilai-nilai budaya, agama, keyakinan dan kebiasaan diaktualisasikan menurut ranah dan batasannya masing-masing, maka dalam Pancasila nilai-nilai itu dikontekstualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas kesatuan tumpah darah dan tanah air yang menjunjung bahasa persatuan.

Milenial menyadari fungsi ideologis Pancasila dari pengalaman hidup mereka. Misalnya, Roby Sugara memiliki pengalaman keberagaman secara langsung.

---

[27] Focus Group Discussion Kajian Akademik, 28 September 2019.
[28] Focus Group Discussion Kajian Akademik, 28 September 2019.

Masa kecilnya yang dilewatinya di Papua, menyaksikan masyarakat Jawa dan Papua dapat hidup berdampingan secara damai. Pengalaman keragaman Roby semakin kaya karena ia pindah ke Lombok dan tinggal disana semasa SMP dan berteman dengan anak-anak yang beragama Hindu, Budha, dan Islam. Pengalamannya makin kaya, karena ia menghabiskan masa SMA-nya di Tangerang, dimana ia memiliki teman yang beragama Konghucu.[29] Merasakan keragaman yang unik dan kaya, tentu menjadi modal sosial yang bagus bagi Roby yang merupakan mahasiswa STABN, beretnis Sasak dan beragama Budha. Ia merasa aman hidup di tengah perbedaan, dimana ia merasakan adanya ikatan persatuan sesama anak bangsa.

Berbeda dengan Roby, Alvin, mahasiswa Gunadarma yang beragama Khonghucu, mengalami masa-masa sulit, terutama ketika agamanya belum disahkan menjadi agama resmi negara. Ia sering disapa China dengan nada peyoratif, dan juga beribadah secara sembunyi-sembunyi. Komunitas Khonghucu bahkan sempat dilarang merayakan hari-hari besarnya seperti perayaan Tahun Baru Imlek dengan festival Barongsai-nya. Kondisi ini berubah setelah Presiden Abdurrahman Wahid menjadikan Khonghucu agama resmi negara. Dengan begitu, hak-hak beragama warga Khonghucu mendapatkan kedudukan yang setara di mata hukum. Selanjutnya mereka dapat beribadah dengan aman dan tenang, juga dalam hal mengembangkan tradisi dan identitas dirinya.[30]

Perkembangan ini makin menemukan momentumnya

---

[29] Focus Group Discussion Kajian Akademik, 28 September 2019.

[30] Focus Group Discussion Kajian Akademik, 28 September 2019.

yang lebih positif setelah pemerintah dan warga masyarakat secara bersama-sama mendukung revitalisasi atau penguatan kembali Pancasila, dalam artian perlunya segenap warga Negara kembali kepada Pancasila dengan cara mengamalkan nilai-nilainya secara sungguh-sungguh. Terhadap perkembangan ini, masyarakat meresponnya secara terbuka dengan lebih menghargai keragaman serta dengan berusaha mengokohkan toleransi dan kesadaran kewargaan. Dengan kokohnya toleransi dan makin kuatnya kesadaran kewargaan, persatuan antar akan terasa semakin kuat.

Pengalaman Desnita yang aktif pada Forum Anak Nias juga memberinya kesadaran akan arti penting persatuan dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di forum itu, semua anak, apa pun agamanya, memiliki hak yang sama, belajar menghargai, menggali potensi budaya, dan merasa tumbuh bersama. Meskipun penganut Protestan merupakan mayoritas, namun mereka hidup berdampingan secara damai dengan penganut Katolik dan Muslim. Penghargaan terhadap keragaman agama dan ras, menurutnya, kunci dari keberhasilan dalam mengamalkan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.[31]

Sedangkan dari pengalaman Nurhasana, Mahasiswa IPTIQ asal Pontianak Kalimantan Barat, yang merasakan persatuan dalam keberagaman sejak kecil, memberinya kesadaran dan pemahaman betapa pentingnya keragaman dan persatuan. Nurhasanah menemukan kesadaran ini melalui pertemanannya dengan teman seusianya dari latar belakang etnis dan agama yang

[31] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

beragam, mulai dari Melayu, Madura, Dayak sampai Tionghoa. Nurhasanah hidup berbaur, bermain bersama bahkan saling mengunjungi rumah ibadah satu sama lain.[32] Pengalaman itu sangat membekas sampai sekarang dan membuatnya menyadari betapa bangsa Indonesia sangat kaya serta beruntung memiliki Pancasila.

Sebagian milenial juga memiliki pengalaman berharga menghadapi perbedaan bahkan sejak dari lingkungan keluarga sendiri, sebagaimana dirasakan oleh Calvin dan Anastasia Juwita. Mereka tumbuh besar dari kasih sayang kedua orang-tua yang berbeda agama. Tetapi perbedaan itu tidak lantas menjadi penghalang untuk berbakti kepada orangtua. Yang terjadi justeru di antara mereka saling menghargai dan menghormati, saling mengingatkan untuk beribadah sesuai agama masing-masing, saling support dan bekerjasama.[33] Pengalaman yang hampir sama dimiliki Alexandra Alessia. Awalnya, dalam keluarga Alessia penganut Katolik sebagai agama leluhur. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi kawin campur, sehingga ada yang konversi menjadi Muslim. Jika datang lebaran Idul Fitri, mereka merayakannya secara bersama. Begitu juga kalau datang Paskah dan Natal, juga dirayakan secara bersama.[34] Tidak ada rasa yang menonjol selain kebersamaan.

D. Pancasila dalam Perspektif Ajaran Agama dan Nilai Kebangsaan

Seperti disinggung sebelumnya, Pancasila tidak lahir dari ruang hampa. Perumusannya melalui proses panjang,

---

[32] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.
[33] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.
[34] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai Pancasila digali dari kepribadian, gagasan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar itulah, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dan sistem nilai yang dikandung Pancasila relatif kompatibel dengan berbagai nilai termasuk nilai agama dan nilai budaya masyarakat Indonesia.

Terkait nilai agama, prinsip dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan akan pengakuan terhadap keberadaan dan peran vital agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Yudi Latif, Sila Ketuhanan menandaskan bahwa nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) berfungsi sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dan dianggap sangat penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukan lah negara sekuler yang secara ekstrim memisahkan "agama" dan "negara", tetapi bukan pula negara agama yang hanya memaksakan identits dan nilai-nilai agama tertentu.[35] Dengan kata lain, melalui sila ini, di satu sisi negara Indonesia diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, tetapi di sisi lain, agama diharapkan dapat memainkan peran publik berkaitan dengan penguatan etika sosial tanpa harus menjadi negara agama.

Dengan kerangka demikian, maka hubungan antara negara dan agama idealnya bersifat simbiosis mutualistis,

---

[35] Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara*. h. 95-96.

yaitu hubungan substansial yang saling menguatkan di ranah publik. Negara wajib melindungi, mendorong, dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama menjadi sumber inspirasi etik dan panduan moral dalam palaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran konkrit agama dapat diwujudkan dalam upaya membentuk kepribadian bangsa yang bermoral, berintegritas, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan antar sesama anak bangsa.

Milenial Citra Nurani menemukan argumen agama atas Pancasila dalam agama Islam. Menurutnya, sila pertama Pancasila sudah sesuai dengan Islam. "Dalam Islam, dari sila pertama saja sudah sesuai dengan surat al-Ikhlas. Jadi Allah itu satu. Jadi dari segi sila pertama saja sudah sesuai dengan Islam. Dan sila selanjutnya juga mengikuti, seperti keadilan, kesetaraan dan lain-lain,"[36] kata mahasiswa Institute Ilmu al-Quran Jakarta ini.

Dalam agama Protestan, bagi Johanes Hasea, tidak ada pertentengan antara Pancasila dengan agama Protestan. Di Gereja Hasea, yaitu HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), ada upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus 2019 yang diisi dengan kegiatan aneka lomba, dengan berupaya menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam khutbah pun, diingatkan bahwa pemimpin adalah wakil Tuhan yang harus berlaku adil dan karenanya harus ditaati.[37]

Dalam agama Katolik, Vioni menilai antara Pancasila dan Katolik tidak ditemukan adanya pertentangan. Di dalam Katolik, ada yang namanya 10 perintah Allah, dan dari

---

[36] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

[37] Wawancara Johanes Hasea Sitorus, Siswa SMAN 82 Jakarta.

sekian banyak perintah itu, yang ditekankan adalah mengkuduskan Tuhan dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Menurut Vioni, jika itu dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai-nilai Pancasila otomatis sudah terpenuhi, baik nilai keadilan, persatuan, ketuhanan, musyawarah dan kemanusiaan.[38]

Vioni menyadari arti penting Pancasila justru dari interpretasinya terhadap ajaran agamanya. Ia mendapatkan program "Amalkan Pancasila, Kita Bhineka Tunggal Ika" yang menjadi program Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) pada tahun ini. Vioni mengingat Pancasila justru di gereja, meski tidak hapal sepenuhnya lagu tentang Pancasila yang berjudul "Kita Bhineka, Kita Indonesia" yang dinyanyikan setelah misa. Melalui lagu itu, menurut Vioni, KAJ ingin menyampaikan pesan bahwa perbedaan itu bukan masalah, baik perbedaan suku, agama, bahkan keputusan politik.

Dalam rangka Perayaan Paskah tahun 2017, Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema "Amalkan Pancasila: Makin Adil, Makin Beradab". KAJ berpendapat bahwa Pancasila adalah wadah kesatuan dan persatuan nasional. Gereja Katolik menerima Pancasila sebagai landasan pemersatu keragaman yang ada di Indonesia.[39] Pada perayaan Paskah tahun 2019, KAJ mengusung tema sila ke empat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga, tema yang diangkat adalah "Kita berhikmat, Bangsa Bermartabat".[40] Dari tahun ke tahun, tema

---

[38] Wawancara Vioni Puteri, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

[39] Lihat https://www.beritasatu.com/megapolitan/425227/keuskupan-agung-jakarta-usung-tema-pengamalan-pancasila, akses 13 Nov 2019.

Pancasila diambil sebagai bagian dari peneguhan komitmen kebangsaan yang sudah dibangun lama.

Sementara dalam Hindu, I Putu Hari, ajaran seperti saling menghargai adalah bagian dari perwujudan sila perta Pancasila. Dari sila pertama, Putu kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk mengamalkan sila kedua, Kemanusian yang Adil dan Beradab. Ia menjalankan itu melalui keikutsertaannya dalam program pengobatan gratis yang mendatangkan seba, orang yang mengobati, dengan mengumpulkan orang-orang dari latar belakang sosial yang beragam.[41] Kegiatan itu dipahami sebagai satu kesatuan antara sila pertama dan sila kedua, yaitu sebagai perwujudan praktik ibadah.

Dalam agama Khonghucu, Alvin percaya pada ajaran "ada pendidikan, tiada perbedaan". Ia kemudian melihat arti penting ajaran itu dalam pendidikan PAUD. Ketika anak-anak dibiasakan hidup berbaur dan diajarkan saling menghargai sejak dini, maka hal itu akan menjadi sikapnya nanti setelah tumbuh dewasa.[42]

Mayoritas milenial dalam kajian ini memahami sila pertama sebagai hal yang tak terpisahkan dari sila-sila lainnya. Dalam artian, terdapat keyakainan di antara mereka bahwa dengan menghayati dan mengamalkan sila pertama secara konsisten, maka dengan sendirinya akan komit dengan sila kedua, ketiga, keempat sampai sila kelima.

Brama Fawwas, siswa SMA Madani Bogor, misalnya,

---

[40] Lihat di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190421124203-20-388197/uskup-agung-jakarta-ingatkan-nilai-pancasila-di-paskah-2019, akses 13 Nov 2019.

[41] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

[42] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

memahami sila pertama sebagai dasaar dari sikap toleransi beragama. Sedangkan toleransi, lanjutnya, merupakan salah satu inti ajaran Islam, yaitu bagaimana menghormati agama lain, tidak mengganggu atau memerangi mereka, serta memberikan rasa aman terhadap sesama.[43] Meskipun berbeda keyakinan, hal itu tidak lantas membuat orang beriman jadi bermusuhan, apalagi dengan menjelek-jelekkan atau merendahkan pemeluk agama lain. Sebaliknya, orang beriman justru harus menyebarkan esensi rahmat yang universal kepada semesta alam.

Hal senada diungkap Rahma, siswa Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta. Ia belajar sila pertama tidak hanya dengan menjalankan perintah agama seperti salat, puasa, mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Tetapi juga dengan belajar yang baik, menjalin persaudaraan, mengupayakan keadilan, menjaga persatuan, juga bermusyawarah di sekolah.[44] Menurutnya, semua itu juga merupakan bagian dari perintah Tuhan yang wajid diamalkannya sebagaimana nilai-nilainya terpatri kuat dalam Pancasila.

---

[43] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

[44] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

Bab IV

REVITALISASI PANCASILA DI KALANGAN ANAK MUDA MILENIAL

Berbeda dari generasi sebelumnya, anak muda milenial memiliki karakter dan kecenderungan yang khas, lebih terbuka serta lebih *literate* dalam hal teknologi komunikasi dan informasi. Tidak heran bila mereka piawai dalam menggunakan gawai (*gadget*), terutama *smartphone*, pandai mengakses informasi, mengirim pesan, berselancar di media *online* dan media sosial, menikmati hiburan *streaming*, bertransaksi *online*, serta memesan transportasi, dan sebagainya. Dari survei IDN Research Institute ditemukan tingginya ketergantungan generasi milenial terhadap teknologi informasi. Diilustrasikan bahwa mereka bagai tak bisa dipisahkan dari ponselnya, bahkan untuk semenit pun, setelah terbangun dari tidurnya.[1]

Literasi teknologi digital kaum milenial memberi mereka kemudahan berinteraksi lewat jejaring media sosial, dan dengan cepat dapat merespon berbagai peristiwa di dunia yang makin terkoneksi, bagai apa yang oleh Marshall McLuhan disebut global village.[2] Dengan kemudahan tersebut, mereka dapat menerobos masuk ke situs-situs komunitas dunia maya yang tersebar masif di Facebook, Whatsapp, Twitter, Line, dan

---

1 Hasil survei IDN Research Institute menemukan fakta bahwa sebanyak 79 persen milenial membuka smartphone 1 menit setelah bangun tidur. Lihat IDN Research Institute, "Indonesia Millenial Report 2019", h. 56. Dalam laporan itu juga dinyatakan bahwa 94,4 persen milenial telah terkoneksi dengan internet.

2 Marshall McLuhan, *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, (Toronto: University of Toronto Press, 1962), hal. 26.

lainnya. Tidak saja sekadar untuk berinteraksi dan berkomunikasi karena alasan pertemanan, tetapi juga untuk ikut andil dalam gerakan solidaritas sosial online, menandatangani petisi, merespon berbagai peristiwa sosial-politik, atau bahkan mendukung aksi penggalangan dana sosial. Intinya, berkat literasi teknologi, generasi milenial tidak saja menjelma menjadi generasi yang paling komunikatif dan terbuka (open minded), tetapi juga intens dalam social engagement, lintas komunitas maupun lintas wilayah. Alhasil, partisipasi mereka dalam proses-proses demokrasi makin nyata.

Temuan survei Institute of Public Policy Universitas Katolik Indonesia Atmajaya mengonfirmasi hal tersebut. Dari survei tersebut terungkap ketertarikan anak muda milenial pada demokrasi. Bagi mereka, demokrasi baik untuk Indonesia karena sejumlah alasan. Di antaranya, bahwa dalam demokrasi terdapat keterbukaan informasi (32%), diselenggarakannya pemilihan umum secara terbuka (28%), serta dijaminnya kebebasan berpendapat (26%).[3] Di mata mereka, demokrasi krusial karena menyediakan ruang gerak yang luas bagi mereka untuk berekspresi dan berkembang. Sebab itu, generasi milenial merasa optimis dengan penerapan demokrasi di Indonesia, meskipun dinilainya belum ideal.

A. Problem dan Kendala Penerapan Pancasila

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa literasi teknologi komunikasi berperan meningkatkan kemampuan interaksi sosial mileneal, dan untuk mereka, ini berdampak positif bagi peningkatan kapasitas social

---

[1] Lihat rilis survei, Institute of Public Policy Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2019.

engagement dan partisipasi demokrasi. Selanjutnya, berdasarkan data hasil FGD dan wawancara mendalam terhadap responden milenial, ditemukan fakta yang cukup positif bahwa kaum milenial memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik tentang Pancasila. Mereka berpegang teguh pada pendirian bahwa Pancasila merupakan dasar Negara. Pancasila dipandang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, multikultural, multi etnis, dan multi agama, dengan alasan bahwa sila-sila Pancasila, yang nilai-nilai dan esensinya, digali dan dirumuskan dari dalam jiwa masyarakat Indonesia, sehingga nyaris tidak ada pertentangan satu dan lainnya. Pancasila dinilai kompatibel dengan ajaran agama-agama; Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Khonghucu, aliran kepercayaan, juga dengan ragam budaya Indonesia.

Perlu juga dicatat bahwa anak muda milenial berpegang pada pandangan bahwa sebagai dasar Negara, Pancasila telah menjelma menjadi kekuatan pemersatu yang mengikat perbedaan ke dalam—meminjam istilah Yudi Latif—"universum simbolik" yang menjadi titik temu berbagai nilai dan berfungsi sebagai pijakan kebersamaan (*common denominator*).[4] Dengan demikian, milenial sadar akan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ruh bangsa, dasar pikiran, dan cita bangsa. Seluruh pengaturan berbangsa dan bernegara, sepatutnya mengacu pada prinsip-prinsip dasar Pancasila.

Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun memiliki kesadaran ber-Pancasila yang baik, pada nyatanya antara

---

[4] Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 321.

kesadaran dan sikap milenial, masih terdapat jarak, karena beberapa sebab. Antara lain, pemahaman yang belum benar-benar solid tentang arti dan makna dari sila-sila Pancasila, serta bagaimana menerapkannya dengan benar. Misalnya, sebagian milenial yang disurvei mendukung demokrasi, tetapi dalam kasus tertentu mereka menolak dipimpin oleh tokoh pemerintahan yang terpilih sesuai aturan dan demokratis, karena alasan beda agama. Tampaknya penolakan ini akibat pemahaman yang parsial, dan tidak utuh terhadap silai-sila Pancasila, ataupun karena pemahaman yang tidak tepat terhadap ajaran agamanya. Berikut adalah pandangan milenial tentang problem dan kendala penerapan Pancasila dalam masyarakat.

Pertama, kendala penerapan Pancasila karena alasan struktural-fungsional. Ini terkait dengan keberadaan institusi negara yang belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sesuai prinsip-prinsip Pancasila. Ada dua ranah yang disorot kalangan milenial terkait masalah ini, yaitu intitusi pemerintahan dan lembaga pendidikan. Milenial melihat adanya kebijakan pemerintahan yang belum sepenuhnya mencerminkan (bahkan kontradiktif dengan) esensi dari nilai-nilai Pancasila. Dalam hal kebijakan pendirian rumah ibadah, misalnya, milenial Anastacia Novlina, beragama Katolik dari Universitas Indonesia, berpendapat bahwa Pancasila belum benar-benar diacu dalam perumusan peraturan peundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Manurutnya, di beberapa daerah minoritas Kristen masih dipersulit terutama dalam pendirian rumah ibadah. Selain persoalan perijinan, seringkali rencana pendirian rumah ibadah mendapatkan penolakan dari warga

sekitar, terutama dari orang-orang Islam. Anastacia mengatakan:

> Saya melihat penerapan Pancasila ini ke dalam konteks yang ril, seperti peraturan dan undang-undang, itu masih kurang merata, misalnya izin pendirian tempat ibadah... Gereja Katolik saya di Depok, dapat izin itu setelah perjuangan 40 tahun. Baru keluar akhir-akhir ini. Saya lihat itu perjuangannya cukup sulit ya, tidak semudah di Bali. Kebetulan saya S1-nya di Bali. Saya lihat di Bali cukup lebih gampang lah.[5]

Menurut Anastacia, ini seharusnya tidak perlu terjadi. UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas perlakuan sama di depan hukum tanpa dibeda-bedakan suku atau agamanya. Begitu pula, penolakan dari warga Muslim juga tidak perlu terjadi karena Pancasila menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Selain di bidang keagamaan, kendala penerapan Pancasila juga masih ditemukan di dunia pendidikan. Aprilia Shakila dan Sabila Aisyah Putri, siswa SMA 5 Depok beragama Islam, menemukan sikap diskriminasi gura atas murid-muridnya, hanya karena faktor suka atau tidak suka (*like or dislike*).

> "Di sila kedua kan ada Kemanusian yang Adil dan Beradab. Kayak menghargai perbedaan gitu. Tapi contoh di sekolah kita, ada guru yang membeda-bedakan satu sama lain. Dia ngomongnya, saya ga menjelek-jelekkan yang ini ya, tapi nadanya sebenarnya menjelek-jelekkan yang ini,"—Aprilia

---

5 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik "Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Anak Muda Milenial Indonesia", CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 28 September 2019.

> Shakila. Pernyataan ini kemudian dilanjutkan Sabila Aisyah Putri, "Jadi guru ini guru... Dia selalu bilang ga boleh ngebeda-bedain satu sama lain. Tapi dia sendiri itu, kayak seakan-akan ngebedain, jadi dia itu ngedukung yang dia suka dan menjelek-jelekkan orang yang dia ga suka. Walapun dia bilang tidak menjelek-jelekkan, tapi perbuatan dia seakan-akan menjelek-jelekkan orang yang dia ga suka,"—Sabila Aisyah Putri.[6]

Dalam kaitan ini, sekolah belum secara maksimal menjalankan fungsi *latent pattern-mantenance*,[7] yaitu fungsi yang menjamin kesinambungan tindakan siswa sesuai dengan prinsip nilai-nilai Pancasila. Pengalaman semacam itu cukup membekas pada keduanya sehingga di sekolah mereka merasa kehilangan panutan. Padahal, perilaku seorang guru sangat berpengaruh terhadap pembentukan mental dan perilaku para siswa.

Kedua, kendala penerapan Pancasila karena persoalan politik identitas. Salah satu contohnya adalah mengeksploitasi sentimen suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) dalam perhelatan pilkada atau pemilu. Banyak milenial yang merasa terganggu dengan menguatnya politik identitas di panggung politik nasional. Di mata milenial, gerakan populisme 212 merupakan fenomena politik identitas dan tentu ini berpotensi mengganggu penerapan demokrasi secara sehat dan bermartabat. Dan fenomena ini juga dapat menjadi hambatan bagi penerapan dan pengamalan Pancasila. Selain itu, secara nasional, politik identitas berpotensi

---

6 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik , 5 Oktober 2019.

7 Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, h.180.

besar mengganggu persatuan dan kesatuan, karena secara esensial politik identitas mempolarisasi masyarakat ke dalam sekat-sekat agama, ras, dan suku.

Menurut milenial, permainan politik identitas perlu dihindari karena mengancam kerukunan. Ia memproduksi intoleransi, sebagai akibatnya, mengikis rasa persatuan. Milenial Kristian Apriadi Li, mahasiswa Budhi Dharma Kota Tangerang, mengatakan:

> Sila pertama, semenjak kejadian itu (Pilkada DKI Jakarta) akhirnya masyarakat terpecah, agama ini menyerang agama ini, begitu sebaliknya. Contohnya, umat Islam tidak suka kalau misalnya orang Kristen sedang berkhutbah menggunakan pengeras suara, sedangkan di Islam sendiri tiap jam 6 sore adzan maghrib, salat subuh, lima waktu. Jadi sila pertama jadi luntur. Sila kedua, sejak kejadian itu, manusia jadi kurang beradab. Misalnya, agama lho harusnya gak di sini, lho bukan Islam berarti lho kafir. Sila ketiga, semenjak kejadian itu persatuan kurang terlihat, ada yang ingin Indonesia tetap Pancasila, ada yang ingin menjadikan Indonesia negara khilafah seperti HTI.[8]

Bagi Kristian, politik identitas tidak akan segera berakhir, karena telah berwujud dalam gelombang primordialisme. Sebagai putra berdarah Tionghoa penganut Budha, Kristian merasa terganggu dengan fenomena politik identitas yang merasuki media sosial dan online. Bagi Kristian, Politik identitas berbahaya karena membangkitkan sentimen negatif dan intoleransi. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2018

---

[8] Wawancara Kristian Apriadi Li, Mahasiswa Semester V Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Budhi Dharma Kota Tangerang, 22 Oktober 2019.

menemukan adanya intoleransi yang meningkat. Pada tahun 2018, skor intoleransi kultural meningkat menjadi 54,2 persen, dibanding tahun 2017 (50,4 persen) dan tahun 2016 (48,6 persen). Begitu pula skor rata-rata intoleransi politik juga meningkat dari tahun sebelumnya. Menurut peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi, aksi-aksi populisme Islam telah berkontribusi terhadap peningkatan itu.[9]

Ketiga, problem mayoritas-minoritas. Ini terkait dengan dinamika hubungan antar umat beragama yang selama ini terjalin sebagai sesama warga negara. Jamak diketahui bahwa konstitusi menjamin hak dan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara. Dengan prinsip itu diharapkan setiap warga negara dapat hidup toleran, saling menghargai, menghormati, dan bekerjasama satu sama lain. Akan tetapi, dalam praktiknya, ternyata tidak selamanya demikian. Sebagian milenial berpandangan eksklusif, sebagai dampak negatif dari narasi mayoritas-minoritas.

Sebagai contohnya, milenial Muslim Intan Khairuzitni, berpandangan bahwa terkait masalah kepemimpinan, umat Islam wajib dipimpin oleh orang Muslim. Menurutnya ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Ketika dikontraskan dengan demokrasi dan HAM, Intan kemudian berargumen bahwa: di suatu daerah di mana umat Islam merupakan mayoritas, pemimpinnya harus Muslim. Sementara di daerah dimana Islam minoritas, maka orang Islam harus menerima dan menghargai pimpinan yang ada, serta tidak melakukan hal-hal yang

---

[9] Burhanuddin Muhtadi, "Menguatnya Intoleransi dan Politik Identitas" dalam artikel Media Indonesia, Kamis, 20 Desember 2019.

merugikan lingkungan sekitar.[10]

Milenial Syukur Marnolinetkuler, asal Nias, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis/Niaga Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek Kota Tangerang. Syukur mengaku sudah dua tahun tinggal di Cipondoh yang mayoritas Muslim. Tidak jauh dari tempat tinggalnya terdapat masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan yang biasanya dengan menggunakan pengeras suara. Ada suara adzan di tiap waktu sholat, serta suara ceramah dan lantunan salawatan di waktu lainnya. Pada awalnya Syukur merasa risih dengan suara yang jarang didengarkannya saat masih tinggal di kampung asalnya. Namun karena sadar dirinya pendatang dan minoritas, ia tidak berani mengadu. Ia kemudian berusaha membiasakan diri, memaklumi, menghargai dan menghormati kebiasaan mayoritas tersebut dengan menahan diri.[11]

Perlu jadi catatan disini bahwa narasi mayoritas-minoritas tidak boleh disalah-gunakan, apalagi bertentangan dengan konstitusi, yang memproteksi hak tiap warga Negara secara sama dan setara. Sebaliknya, narasi mayoritas –minoritas perlu dibangun di atas prinsip bahwa mayoritas hendaknya berbesar hati menerima dan melindungi minoritas secara tulus, apapun konsekuensinya. Sementara minoritas berkewajiban menunjukkan empati dan rasa hormatnya kepada mayoritas secara jujur. Artinya semua pihak perlu

---

[10] Wawancara Intan Khairuzitni, Mahasiswa Semester VII Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta.

[11] Wawancara Syukur Marnolinetkuler, Mahasiswa Semester V Jurusan Administrasi Bisnis, STISIP-Yuppentek Kota Tangerang, 27 Oktober 2019.

mendorong terwujudnya interaksi yang setara antara berbagai kelompok masyarakat atas dasar penghargaan pada prinsip-prinsip Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pihak mayoritas tidak perlu merasa berhak menuntut keistimewaan tertentu (*majority privilege*) di ruang publik, sementara pihak minoirtas harus lah berusaha untuk mengambil peran lebih engaged dan interaktif dengan mayoritas secara dewasa, saling mendukung, saling menghargai dan saling menghormati.

Keempat, konservatisme dan radikalisme. Ini terkait dengan fenomena sosial-politik keagamaan di mana seseorang memegang teguh dan mempertahankan keyakinan agamanya, tetapi dengan menyalahkan pemeluk agama lain. Eskpresi sikap semacam ini kadang menjelma menjadi kebencian terhadap perbedaan. Milenial merasa resah dengan fenomena saling mengafirkan serta tumbuhnya kebencian antara sesama kelompok. Gejala seperti ini tentu dapat mengganggu hubungan yang hangat antar warga Negara.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa konservatisme berpotensi memunculkan radikalisme, terutama bagi milenal yang sedang berproses mencari jati diri. Milenial Aditya Irnawan, siswa SMK PGRI 2 Cikokol, menunjukkan sikap ambivalen ketika ditnyakan apakah perlu Indonesia tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara atau diganti dengan khilafah. Pada mulanya, Aditya berpendapat bahwa Pancasila tidak perlu diubah karena sudah dirumuskan sejak dulu oleh pendiri bangsa. Tetapi sebagai Muslim, ia juga tidak menolak gerakan Khilafah karena mengatasnamakan Islam. Namun demikian ia sadar bahwa Khilafah kemungkinan akan dotolak kelompok non-Muslim.[12]

Kelima, hambatan penegakan Pancasila akibat rasisme dan SARA. Munculnya sikap rasisme selalu disertai sentimen mengenai identitas diri dan golongan. Sentimen semacam ini berpotensi mengungkit-ngungkit kembali polarisasi pribumi non-pribumi, warga asli dan pendatang, dan seterusnya. Sebagian milenial pernah mengalami atau menyaksikan tindakan rasisme, verbal maupun non verbal, yang mengancam eksistensi hidup mereka. Yang paling banyak ditemukan adalah tindakan verbal seperti kata "China" untuk memojokkan atau menghina warga dari etnis Thionghoa, atau "Dasar Arab" sebagai stereotype sentiment anti-Arab yang juga mulai muncul belakangan. Milenial menganggap rasisme dapat merongrong penerapan dan pengamalan Pancasila.

Menurut Milenial, dampak rasisme dan SARA begitu besar bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Contoh dari Frudence K Dylana, siswa Khonghucu SMAN 3 Tangerang Selatan, penting diperhatikan. Sebagai warga keturunan Tionghoa, ia dipanggil "China" oleh teman-temannya meskipun kulitnya agak gelap. Rasisme terhadap suku bangsa lain, seperti terhadap siswa Papua di sekolahnya juga terkadang ada. Ia terisolasi karena dijauhi, disebut hitam, kriting, bau dan sebagainya. Ia heran kenapa teman-temannya tidak menerima, padahal setelah mencoba ia dekati, ternyata kepribadiannya baik.[13] Cerita Frudence tersebut adalah gambaran kecil rasisme atas mahasiswa Papua di Surabaya yang

---

[12] Wawancara Aditya Irnawan, Siswa Kelas II Jurusan Otomotif Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik Indonesia/SMK PGRI 2 Cikokol, Kota Tangerang.

[13] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

kemudian menimbulkan gejolak besar beberapa waktu lalu.

Keenam, kendala penerapan Pancasila akibat hipernasionalisme. Ini berkaitan dengan pandangan dan ekspresi kekuatan otoritas atau kelompok tertentu mengenai nasionalisme secara berlebihan. Nasionalisme model ini lebih megedepankan simbol, lambang, upacara, dan bersifat agresif.[14] Nasionalisme yang didengungkan dengan klaim dan propaganda paling nasionalis, paling pribumi, paling berhak atas tanah air, sehingga cenderung memusuhi kelompok lain. Dalam politik, hipernasionalisme bisa disaksikan dari perilaku penguasa dan kelompok pendukungnya yang bereaksi atas gerakan populisme Islam seraya menuduh mereka anti-Pancasila, pro-khilafah, dan semacamnya.[15] Juga, dengan gejala munculnya "polisi Pancasila" yang membubarkan pengajian di luar kelompok mereka.

Fenomena semacam itu berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. I Wayan Eka Dharmaputra, milenial beragama Hindu, pendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019, mengaku tidak suka dengan fenomena tersebut. Menurutnya, tuduhan-tuduhan bahwa politik Prabowo-Sandi akan memberi angin pada bangkitnya Khilafah tidak berdasar. Menurutnya itu propaganda yang tidak berguna dan hanya akan memperdalam polarisasi masyarakat. Ia tahu

---

[14] Lihat Ariel Heryanto, "Ketegangan di Papua dan Hiper-Nasionalisme di Indonesia" dalam https://theconversation.com/ketegangan-di-papua-dan-hiper-nasionalisme-di-indonesia-123179. Artikel diakses 22 Oktober 2019.

[15] Vedi Hadiz, "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?" dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, Volume 53, No. 3, 2017, h. 261-262.

bahwa dalam barisan pendukung Prabowo-Sandi terdapat ex-anggota HTI (yang dibubarkan pemerintah) yang secara ideologis mengusung ide khilafah. Tetapi, menciptakan stigma seolah-olah semua pendukung Prabowo-Sandi pro-khilafah dan anti-Pancasila adalah politik yang tak bisa diterima akal sehat.[16]

B. Bentuk-bentuk Praksis Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Kajian ini mencoba menggali pengalaman praksis milenial dalam rangka revitalisasi Pancasila. Berdasarkan wawancara dengan milenial, dan dari hasil berdiskusi dengan mereka, terungkap sejumlah pemikiran dan masukan perihal model praksis revitalisasi Pancasila yang mungkin dapat dikembangkan di kemudian hari.

Pertama, literasi politik di lingkungan keluarga. Literasi politik dalam keluarga adalah usaha-usaha sederhana yang dilakukan di lingkungan keluarga dengan tujuan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait pengelolaan aspek-aspek sederhana dari politik dan demokrasi dalam keluarga. Jadi, komunitas keluarga diibaratkan sebagai miniatur bangsa. Orang-tua memainkan peran lebih besar sebagai role model, adapun anak-anak bertindak sebagai masyarakat keluarga. Dalam miniatur komunitas bangsa ini, nilai-nilai fundamental Pancasila bisa coba dipraktikkan. Misalnya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai-nilai persatuan serta gotong-royong, nilai-nilai permusyawaratan dan keadilan, nilai-nilai kesantunan, toleransi, serta nilai-nilai

---

[16] Wawancara I Wayan Eka Dharmaputra, Mahasiswa Semester akhir Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia (ITI), Kota Tangerang Selatan, 9 November 2019.

HAM, dst.

Dalam setting ini, orang tua berperan tidak saja mengajarkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai tersebut untuk anggota keluarganya. Misalnya, dengan mempraktikkan tata-cara berkomunikasi dan berinteraksi yang santun, rukun, hangat dan damai. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, dimana tiap anggota keluarga dihormati pandangan dan pendapatnya. Penghargaan terhadap HAM, juga dapat dipraktikkan dengan cara memberi tanggungjawab dan hak-hak yang sama serta setara untuk semua anggota keluarga. Ringkasnya, keseluruhan anggota keluarga dilatih untuk membiasakan diri hidup dengan kebiasaan yang baik, memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi, saling menghormati, saling mendengarkan pendapat, disiplin dan toleran, serta saling mendukung satu dan lainnya. Pekerjaan-pekerjaan rumah-tangga dikerjakan secara bersama-sama, dengan membagi tanggungjawab secara merata. Namun, betapapun setara hak-hak anggota keluarga, nilai-nilai tradisional semisal kesantunan terhadap orang tua atau anggota keluarga yang lebih senior, senantiasa tetap terpelihara dengan baik.

Ester Tri Utami, siswa SMA Katolik Mater Dei, membuat testimoni bahwa dirinya terbiasa menghargai orang dalam kehidupan sosialnya, sebagai hasil didikan keluarga sejak masa kecil. Dalam keluarganya, Ester selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, terutama menyangkut kepentingannya, seperti pemilihan sekolah dan jurusan. Ia mengaku saat ini ia kuliah dengan mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Tetapi setelah ia bermusyawarah dan

mengemukakan pendapat mengenai jurusan yang diinginkan, orang tuanya setuju. Dalam lingkup keluarga, ia belajar banyak soal bagaimana menghargai perbedaan pendapat serta menerima keputusan musyawarah meski kadang disetujuinya.[17]

Begitu pula yang terjadi dengan Anastasia Juwita, mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Sejak kecil ia diajarkan menerima perbedaan dalam keluarga. Bapak dan ibunya beragama Islam, sementara neneknya beragama Kristen. Anastasia sejak SD ikut agama sang Nenek sebagai Protestan. Meski begitu, jalinan keluarganya tetap harmonis, saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Seringkali orang tuanya mengingatkan Anastasia untuk beribadah bahkan kadang mengantarkannya ke gereja.[18]

Kedua, literasi politik di sekolah. Tidak jauh beda dengan literasi politik dalam keluarga, di sekolah penanaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan formal di kelas maupun kegiatan di luar kelas. Bagi sekolah umum di mana siswanya berasal dari latar belakang sosial-budaya yang beragam, tidak sulit mendidik siswa untuk saling menghargai, berbaur, dan bekerjasama satu sama lain, meskipun berbeda suku atau agama. Namun bagi sekolah yang cenderung seragam, penanaman Pancasila bisa dijalankan melalui kegiatan ekstra-kulikuler, dengan berkunjung ke sekolah-sekolah yang memiliki siswa dengan sosio-budaya yang lebih beragam. Cara seperti ini efektif untuk mendidik siswa lebih terbuka serta menghargai perbedaan.

---

17 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik , 5 Oktober 2019.

18 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

Pengalaman Sabila Aisyah Putri, siswi SMA 5 Depok, yang duduk sebangku dengan teman beda agama di, juga bisa dijadikan pelajaran. Dari pertama sekadar kenal, berlanjut dengan belajar bareng, kemudian bekerjasama hingga berdiskusi mengenai agamanya masing-masing, serta mengenali perbedaan-perbedaannya. Meskipun berbeda keyakinan, tidak pernah terbersit di benak Sabila untuk tidak menghormati keyakinan temannya, apalagi untuk mengajaknya pindah agama. Yang ada justeru sikap saling menghargai dan menghormati.[19]

Dari Putri Cahyaning, siswa Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dapat diambil pelajaran tentang bagaimana siswa-siswi madrasah tersebut, yang semua siswanya beragama Islam, berusaha untuk merasakan pengalaman toleransi. Meski berada di lingkungan sekolah Islam, mereka sebenarnya juga merasakan keragaman intra-agama, namun tidak merasakan pengalaman antar-agama di sekolahnya. Keterbatasan ini kemudian diatasi dengan mengundang siswa-siswi dari sekolah Kristen untuk ikut dalam kegiatan madrasah, semisal pentas seni, olah raga, dst. Dalam kegiatan seperti itu, mereka berusaha berkomunikasi dan berbaur, saling mengapresiasi, dan belajar banyak tentang pentingnya kebhinnekaan.[20] Bagi Putri, Pancasila bukan sekadar teori di kelas melainkan praktik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, ekstra-kulikuler Empat Pilar. Ini merupakan bagian dari literasi politik di sekolah. Kegiatan ini

---

[19] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik , 5 Oktober 2019.

[20] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik , 5 Oktober 2019.

berbentuk diskusi yang dikemas semenarik mungkin, membahas Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dst. Seperti cerita Frudence, setiap hari ia bersama temannya berkumpul, membahas pasal dalam undang-undang, TAP MPR dan semacamnya. Model diskusi yang dijalankan tidak hanya terbatas pada buku, melainkan juga mendiskusikan film mengenai kebangsaan, sejarah, budaya Indonesia, dan kekayaan aneka alam Indonesia. Peserta ekskul kemudian diikutkan lomba mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi bahkan nasional, yang diadakan oleh MPR RI. Kegiatan tersebut selain menarik minat siswa juga berhasil membuka wawasan mereka tentang keindonesiaan dan kebhinekaan.

Keempat, literasi politik di kegiatan sosial-keagamaan. Dalam lingkup ini, literasi dapat mengambil bentuk penanaman nilai-nilai Pancasila yang disisipkan dalam acara keagamaan seperti kegiatan peribadatan, ceramah keagamaan, peringatan hari besar agama, dan kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut, jika memang memungkinkan, dapat dimulai misalnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau lagu lainnya. Pengalaman Vioni Puteri, Mahasiswa Universitas Indonesia, yang menyanyikan lagu "Kita Bhinneka, Kita Indonesia" yang disosialisasikan KAJ (Keuskupan Agung Jakarta) setelah Misa, cukup membekas di benaknya. Walaupun acara bersifat keagamaan, tetapi lagu itu telah menggugahnya betapa keberagaman Indonesia adalah rahmat Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan disyukuri.[21]

---

[21] Wawancara Vioni Puteri, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia.

Kelima, dialog antar agama. Ini sebuah upaya membuka jembatan komunikasi antar agama untuk lebih saling mengenal dan memahami satu sama lain. Seringkali munculnya prejudice atau anggapan yang salah terhadap agama lain, disebabkan karena tertutupnya pintu komunikasi. Karena itu, melalui dialog anggapan semacam itu perlahan-lahan dapat dikikis, sebab pada dasarnya setiap agama mengajarkan nilai-nilai universal.

Livia Amelia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta, mengaku semakin lebih terbuka dan tulus menerima dan menghargai pemeluk agama lain setelah aktif dalam komunitas lintas agama. Ia terlibat aktif di Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC), yang beranggotakan pemuda lintas agama, dimana di antara kegiatannya meliputi kajian-kajian serta kunjungan ke gereja-gereja. Di komunitas tersebut, Livia mendapat kesempatan untuk menjelaskan spektrum pemahaman dalam Islam. Mengapa, misalnya, ada orang yang berpandangan tidak boleh bersalaman dengan menyentuh tangan, dan sebagainya. Begitu pula ia banyak bertanya tentang agama lain sehingga menjadi lebih paham dan bisa menerima perbedaan.[22]

Keenam, membuat wadah kajian dan pergerakan yang fokus pada pengembangan nilai-nilai inklusif. Terutama di lingkungan kampus, wadah semacam itu diperlukan untuk mempromosikan pandangan keagamaan moderat yang sesuai dengan Pancasila. Kampus adalah pasar kebebasan akademik di mana pikiran diuji, diperdebatkan, dan dikontestasikan. Kultur kehidupan kampus yang menjunjung tinggi intelektualitas dan

---

[22] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik , 28 September 2019.

keilmuan, seharusnya tidak memberi tempat bagi pikiran dangkal dan artifisial. Namun sayangnya, kondisi kampus yang saat ini lebih terobsesi mengejar output keahlian bidang profesi tertentu, biasanya fakultas dan jurusan umum, terkadang lalai dengan pengembangan pikiran mahasiswa. Akibatnya, tidak ada daya tangkal intelektual sehingga paham keagamaan konservatif, radikal, dan ekstrem dari berbagai organisasi dan gerakan keagamaan mudah masuk.

Karena itu, wadah kajian dan pergerakan itu penting dihidupkan sebagai wahana critical thingking untuk mengimbangi dan meng-counter narasi yang dibawa organisasi tersebut. Ini pula yang dilakukan Fajar Syahrullah, mahasiswa jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia membentuk Gerakan Ikatan Pesantren (GIP) yang konsen melakukan kajian keislaman yang moderat dan inklusif. Tidak hanya itu, ia dan teman-teman juga gencar mempromosikan Islam moderat, melakukan kegiatan di masjid kampus, dan memberi pendampingan keagamaan terutama kepada mahasiswa yang berasal dari sekolah umum.[23] Ia lakukan itu karena sadar masjid kampus saat ini banyak dikuasai oleh kalangan Islam konservatif, seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah.

Ketujuh, pendidikan dan pelatihan yang menekankan pada upaya mencetak aktor, pelatih atau guru Pancasila. Selama ini pengajaran Pancasila bersifat imperatif, yaitu lebih menitik-beratkan pada penanaman nilai, moral dan budi pekerti. Meski baik bagi pembentukan karakter,

---

[23] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik , 28 September 2019.

tetapi metode ini tidak cukup menyiapkan aktor Pancasila yang mampu mengidentifikasi, meng-counter, dan mengatasi persoalan yang berlawanan dengan Pancasila. Padahal tantangan dan persoalan itu begitu nyata, tetapi karena tidak adanya keahlian maka masyarakat seperti tidak punya daya tolak. Model pelatihan seperti Pesantren for Peace yang diadakan CSRC UIN Jakarta dapat menjadi contoh bagaimana mencetak kader pesantren yang peka terhadap perdamaian, juga mampu mengidentifikasi dan melakukan counter narasi radikalisme dan ekstremisme. Milenial Ahmad Saeroji menjadi salah satu peserta aktif yang terkesan dengan program tersebut.

Pasca pelatihan itu, ia terbiasa melakukan counter narasi lewat diskusi dengan anggota HTI di kelas, juga melalui tulisan di media. Bahkan ia mengaku pernah dicari-cari dan diancam karena tulisannya yang menentang gerakan 212. Namun ia tak pernah gentar dengan ancaman itu. Juga, tidak pernah membenci orang yang berseberangan dengannya. Bagi Saeroji, narasi harus dihadapi dengan narasi. Selama masih dalam tataran pendapat, semua wajib saling menghargai tanpa menyisakan alasan untuk membenci.[24]

C. Pancasila versus Khilafah

Mengindentifikasi ancaman Pancasila tidak akan lepas dari isu pendirian khilafah yang diusung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Sejak dibubarkan secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 19 Juli 2017 melalui

---

[24] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik , 28 September 2019.

[25] Lihat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Kementerian Hukum dan HAM[25], isu khilafah semakin kencang dibicarakan. Isu itu bahkan ditarik dalam kontestasi politik pemilihan presiden 2019 sebagai labelisasi terhadap kelompok pendukung kandidat tertentu. Maka muncullah narasi bahwa Pilpres 2019 adalah "pertarungan Pancasila versus khilafah". Sejak saat itu banyak yang familiar dengan kata "khilafah" meski belum tentu sepenuhnya memahami ideologi tersebut, tak tekecuali kalangan milenial. Yang jelas dalam pengetahuan umum, ada gerakan (HTI) yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah dengan dasar hukum syariat Islam.

Bagaimana tanggapan milenial dalam studi ini terhadap gerakan dan upaya tersebut? Secara garis besar ada tiga sikap yang megemuka. Pertama, tidak setuju dengan khilafah. Ini adalah sikap mayoritas dengan sejumlah argumen yang mendasari. Umumnya argumen itu menitik-beratkan pada keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Bila khilafah yang didasarkan pada agama tertentu ditegakkan di bumi pertiwi, maka berpotensi terjadi perpecahan. Agama di luar Islam, akan menuntut pisah mendirikan negara sendiri hingga akhirnya Indonesia hancur dan bubar.

Eskpresi atas ketidaksetujuan itu tergambar dari informan I Putu Hari Wesnawa, siswa SMK 2 Mei, pemeluk agama Hindu. Ia menyatakan dengan tegas dan terbuka: "Saya tidak setuju banget Pancasila diganti. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau misalkan khilafah itu terjadi, maka kita kan ga akan bisa tinggal, cotohnya di Jakarta. Maka kita harus pindah ke Bali. Terus kalau Khilafah itu terjadi, Bali akan menjadi negara".[26] Sebagai seorang

siswa, ia memang tidak bisa berbuat banyak. Tetapi atas keresahannya, minimal ia sudah pernah mendiskusikan isu itu dengan guru di sekolah. Karena itu, sikap Putu bukanlah reaksi amatiran siswa kemarin sore melainkan sebuah keyakinan yang realistik.

Argumen lain yang juga sering muncul ialah Pancasila sudah tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tidak ada yang perlu diganti karena Pancasila selama ini terbukti sakti, menjadi perekat persatuan, mengakomodir pelbagai kepentingan dalam nafas dan cita yang sama. Pancasila adalah ruh bangsa. Mengganti Pancasila berarti memisahkan badan dan ruh, negara dan warga negara. Argumen ini begitu kuat di kalangan anak muda milenial sehingga bagi mereka seharusnya tidak ada celah bagi siapa pun untuk mengganti Pancasila. Sebagai konsekuensinya, mereka mendukung kebijakan pemerintah yang membubarkan ormas HTI.

Hanya saja, dalam mengungkap dukungannya, mereka berbeda sikap soal bagaimana memperlakukan eks anggota HTI yang terus mengampanyekan khilafah. Sebagian tetap memperlakukan layaknya warga negara lain seraya menghargai hak mereka berpendapat soal khilafah. Di sini sikap dan upaya yang kemudian diambil adalah meng-counter narasi eks-HTI. Sebagian berharap kepada pemerintah agar melakukan pendekatan persuasif dan meluruskan pandangan mereka soal khilafah. Sebagian lagi berharap pemerintah lebih tegas memberikan sanksi seandainya mereka tetap bersikukuh mewujudkan pandangannya.

---

[26] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik , 5 Oktober 2019.

Kedua, setuju khilafah tapi tetap Pancasila. Sikap ambivalen sepeti ini datang dari milenial junior yang masih dalam proses pencarian jati diri dan belum memiliki pemahaman yang utuh. Sikapnya dipengaruhi oleh ketegangan nilai dalam dirinya: antara menerima khilafah yang dianggap islami (setidaknya mengatasnamakan Islam) dengan Pancasila yang sudah dirumuskan sejak dulu dan terbukti menjadi perekat persatuan nasional. Ini seperti tergambar dari sikap informan Aditya Irnawan, sebagimana disinggung pada penjelasan sebelumnya. Satu-satunya alasan kekhawatiran bila khilafah diterapkan, dan karenanya ia tetap memilih Pancasila, ialah: reaksi non-Muslim yang kemungkinan besar tidak menolak. Sebab, ia juga tidak ingin negara Indonesia tercerai berai, meletus konflik antar sesama warga negara.

Ketiga, tidak setuju tapi ragu dengan tekad HTI yang ingin mengganti Pancasila. Sikap seperti ini dipengaruhi oleh permainan narasi politik yang dibangun pada saat Pilpres 2019. Contohnya I Wayan Eka Dharmaputra di atas. Menurutnya, fenomena HTI dan khilafah baru booming belakangan di masa pemerintahan Jokowi. Secara tersirat, ia ingin menegaskan bahwa walaupun punya pandangan soal khilafah, tetapi pergerakan HTI selama ini dianggap biasa saja—tidak membahayakan semisal gerakan separatis yang memengaruhi dan mengorganisir massa menggunakan cara-cara kekerasan. Ia lebih memahami fenomena mencuatnya isu HTI juga FPI sebagai gejala politik semata. Sebuah gejala yang oleh kalangan sarjana sosial-politik disebut sebagai pemainan politik "oligarki" untuk menguasai sumber daya material dan kekuasaan.[27]

Di luar sikap itu, bagaimana pandangan milenial terhadap

kemungkinan terwujudnya negara khilafah? Selain tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, sistem khilafah juga dianggap mengandung utopia kompleks di dalam dirinya. Sistem pemerintahan khilafah mengandaikan wilayah kekuasaan yang tidak terbatas pada satu negara melainkan banyak negara di bawah satu kepemimpinan. Sistem seperti ini dinilai tidak sesuai dengan konsep nation state yang saat ini dianut oleh negara-negara di dunia. Lagi pula mewujudkan kepemimpinan Islam yang terbentang dari ufuk barat Maroko sampai ufuk timur Filipina Selatan, sebagaimana cita-cita pendiri HTI Taqiuddin Al-Nabhani, bukan perkara mudah dan realistik. Apalagi menurut penilaian Saeroji, dengan merujuk pada sejarah penerapan khilafah, tidak ada yang baku dalam sistem khilafah. Bahkan HTI sekali pun cenderung berubah-ubah mengemukakan konsep mengenai kepemimpinan dalam khilafah.

Walaupun demikian, gerakan HTI bukan berarti diabaikan sama sekali. Dalam kerangka ideologis yang berhadap-hadapan dengan Pancasila, ia perlu dianggap penting agar Pancasila tetap vital dan perwujudan cita-cita bangsa dapat diupayakan bersama. Harapannya, agar Pancasila dibicarakan secara kritis di tengah ideologi lain yang

---

[27] Vedi Hadiz mendefinisikan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang ditandai dengan menyatunya kepentingan politik birokratis dengan kepentingan bisnis yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan. Sementara Jeffrey Winters menyebut oligarki sebagai sistem "politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material" untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Jika Vedi menekankan pada relasi kekuasaan, maka Winter lebih mengarah kepada aktor. Lihat Vedi Hadiz, "Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia", Prisma, Vol.33 No.1 Tahun 2014, h.37. Lihat pula Jeffrey Winters, Oligarki, terj. (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 8-10.

beroposisi terhadapnya sehingga menumbuhkan kesadaran ideologis yang semakin kuat pada kalangan anak muda. Sebab, menyitir pandangan Martin Slinger dalam John B. Thomson, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia, ideologi sebagai sistem kepercayaan memuat sejumlah elemen, yaitu deskripsi faktual, analisis situasi, preskripsi moral, preskripsi teknis, implement, dan *rejection*.[28]

Menurut Slinger, seluruh ideologi mencampur-adukkan secara bersama antara deskripsi faktual dan analisis situasi dengan preskripsi moral tentang apa yang benar dan baik serta pertimbangan teknis tentang kehati-hatian dan efisiensi. Selanjutnya, ideologi membimbing tindakan seseorang yang diperlihatkan melalui elemen yang disebut implement (aturan-aturan yang memberikan cara dan alat untuk mengimplimentasikan komitmen dan menyesuaikannya dengan keperluan keadaan) dan rejection (penolakan terhadap prinsip dan kepercayaan lain yang beroposisi terhadap ideologi bersangkutan). Dengan mengacu penjelasan tersebut, maka seharusnya tidak ada kekhawatiran untuk menyemarakkan kajian ideologi Pancasila di tengah ideologi dunia, termasuk HTI, karena di dalamnya terdapat elemen rejection yang dibangun di atas berbagai konsep dan argumentasi. Ini penting sebagai salah satu pilihan strategi revitalisasi Pancasila ketimbang bersikap reaktif di bawah propaganda hiper-nasionalisme.

Dengan starategi itu, maka setiap narasi yang dikampanyekan HTI baik di dunia nyata maupun dunia

---

[28] Martin Slinger dalam John B. Thomson, *Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia, terj. Haqqul Yaqin*, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hal. 129-133.

maya, seperti di media sosial, sebaiknya tidak dihadapi secara paranoid dengan membangun sentimen nasionalisme penuh kebencian. Lebih penting adalah melakukan counter narasi secara kritis dengan menunjukkan elemen-elemen yang menjadi kelemahannya, paradoks konseptual serta utopia idelogis yang terkandung di dalamnya. Semakin wacana itu dibuka dan dipertandingkan di ruang publik, maka intelegensia warga negara akan semakin meningkat. Dengan demikian, daya tahan ideologi Pancasila akan makin mengakar, dan di saat bersamaan, daya tolak terhadap ideologi lain juga makin kuat.

D. Revitalisasi Pancasila di Media Sosial

Salah satu medium kampanye yang sering digunakan HTI untuk memengaruhi pandangan anak muda milenial adalah media sosial. Mereka biasanya menggunakan tokoh muda berpengaruh sepeti Ustadz Felix Siauw yang banyak diganderungi anak muda sebagai influencer. Melalui akun yang dimiliki terutama di Instagram dan Twitter, ia memposting pandangannya soal masalah kekinian yang lekat dengan anak muda, kata-kata motivasi, termasuk kegiatan-kegiatannya dalam berdakwah. Tak terkecuali, pandangannya mengenai masalah politik dengan dasar dan semangat keislaman. Kehadirannya seperti menawarkan kesalehan individual dan sosial yang membimbing anak muda untuk berhijrah.

Tidak hanya HTI, tren kampanye di media sosial juga banyak digunakan oleh mereka yang punya kepentingan politik dengan menyebar meme, video pendek, foto kegiatan, link berita, dan sebagainya. Mereka menggunakan jasa buzzer bayaran dengan ratusan bahkan ribuan akun robot dan anonim untuk menggiring

dan memanipulasi opini publik.[29] Biasanya akun-akun tersebut digerakkan oleh akun influencer dengan *follower* ribuan sampai ratusan ribu yang memberi guide seputar isu yang akan dimainkan. Contoh kekuatan buzzer yang paling fenomenal ialah munculnya istilah "cebong" (pendukung Jokowi) dan "kampret" (pendukung Prabowo). Selama Pilpres, dua pasukan buzzer itu sangat dominan di twitter sehingga layar trending topic setiap harinya dikuasi oleh isu politik kedua kubu.

Dari sisi marketing, tren kampanye di media sosial memang efektif memengaruhi opini netizen (warga jagad maya), atau setidaknya, menjadikan mereka tahu mengenai isu apa yang sedang ramai diperbincangkan. Namun begitu, terdapat ekses yang membahayakan keakraban berwarga negara, memicu perilaku intoleran bahkan cenderung memecah belah persatuan, antara lain dengan maraknya hoaks, ujaran kebencian, bullying hingga fenomena post truth. Perilaku di media sosial seperti tak terkendali demi menggiring opini yang menyesatkan dengan memproduksi fitnah dan berita bohong. Opini dan berita itu dimainkan dan disebar berulang-ulang sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) melakukan survei tentang wabah hoaks nasional pada tahun 2017. Survei tersebut salah satunya mengungkap bentuk dan saluran hoaks yang selama ini bekerja. Hasilnya, ternyata media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram

---

[29] Lihat laporan berita Kumparan, "Riset Oxford: Politikus Indonesia Bayar Buzzer untuk Manipulasi Publik", di https://kumparan.com/kumparansains/riset-oxford-politikus-indonesia-bayar-buzzer-untuk-manipulasi-publik-1rzWKzl4kyv. Diakses 10 Oktober 2019.

menjadi saluran yang paling banyak ditemukan penyebaran hoaks, yaitu mencapai 92,40 persen diikuti oleh aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) 62,80 persen. Adapun bentuk hoaks yang paling banyak diterima berupa tulisan (62,10%) dan gambar (37,50%). Sedangkan jenis hoaks yang paling populer ialah berkaitan dengan sosial politik seperti Pilkada dan pemerintahan (91,80%), disusul hoaks mengenai SARA (88,60%). Survei yang sama juga dilakukan pada tahun 2019 di mana hasilnya tidak ada perbedaan signifikan kecuali hanya pada perubahan angka dan skala jawaban.[30]

Hasil survei tersebut menarik untuk dicermati, terutama jika dihubungkan dengan aktivitas penggunaan media sosial. Menurut data Hootsuite dan We Are Social, pada Januari tahun 2018 aktivitas media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Youtube (43%), Facebook (41%), Whatsapp (40%), Instagram (38%), Line (33%), BBM (28%), Twitter (27%). Angka ini meningkat pada tahun 2019 dimana urutannya menjadi Youtube (88%), Whatsapp (83%), Facebook (81%), Instagram (80%), Line (59%), dan Twitter (52%). Media sosial lain seperti BBM, Linkedin, Pinteres, Skyp dan sebagainya di bawah 50 persen.[31] Artinya, mengacu pada data ini, semestinya penyebaran hoaks lebih banyak dioperasionalkan melalui Youtube dan aplikasi Whatsapps. Namun nyatanya, kenapa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter-lah yang justeru paling sering ditemukan?

---

[30] Lihat "Hasil Survei Mastel tentang Wabah Hoaks Nasional", Masyarakat Telematika Indonesia, Jakarta, 13 Februari 2017. Liha pula hasil survei oleh lembaga yang sama dalam "Hasil Survei Wabah Nasional Hoaks 2019".

[31] Lihat Global Digital Report 2019 di https://wearesocial.com/global-digital-report-2019. Diakses tanggal 20 Oktober 2019.

Jawaban atas pertanyaan itu berkaitan erat dengan sifat, kegunaan, dan pola interaksi yang berbeda antara Youtube dan Whatsapp dengan Facebook, Instagram, dan Twitter. Media Youtube seringkali hanya dijadikan kanal tontonan untuk mencari hiburan ketimbang mencari informasi yang dibutuhkan. Begitu pula Whatsapp, kegunaannya lebih sebagai media interaksi yang bersifat pribadi dengan orang-orang sekitar, meski di dalamnya informasi yang bersifat publik dapat disebar dan diakses (semi publik). Berbeda halnya dengan Facebook, Intagram, dan Twiiter. Pengguna dapat berinteraksi secara sosial bahkan dengan orang yang tidak dikenal sekali pun. Ketiga media sosial tersebut juga memudahkan pengguna untuk mencari dan mendapatkan informasi, memberi tanggapan atas informasi itu, juga menyebarkannya ke khalayak yang lebih luas. Sebab itu, tidak heran jika penyebar hoaks kerap menyasar tiga medium itu karena daya sebar dan resonansinya begitu cepat dan kuat.

Namun begitu, meski tiga media sosial tersebut paling banyak dijadikan saluran penyebaran hoaks, tetapi dilihat dari segi efektifitasnya ternyata Twitter masih menempati urutan pertama. Hal ini antara lain karena, menurut Direktur PT. Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, Twitter masih menyediakan fasilitas search ke seluruh status atau tweet yang dimilikinya. Sedangkan Facebook dan Instagram hanya menyediakan akses terhadap public page saja.[32] Melalui fasilitas itu, netizen dapat mencari status tweet sebuah akun, menelusuri dan merekam

[32] Ismail Fahmi, "Perilaku Masyarakat Indonesia terhadap Hoaks, Media, dan Budaya Baca", disampaikan dalam Diskusi dan Bedah di Auditorium FIB UNDIP Semarang, 9 Maret 2017.

perbincangan di antara akun, hingga ambil bagian dalam perbincangan. Di fasilitas search itu juga netizen dapat melihat perbincangan apa yang sedang populer di papan trending topic, asal usul tweet dan kronologi isu, untuk kemudian masuk ke dalamnya.

Lalu bagaimana hoaks bekerja di Twitter? Dari mana isu itu pertama kali muncul dan bagaimana pola penyebarannya? Setidaknya terdapat dua sumber serta pola penyebaran hoaks yang saling terkait satu sama lain. Pertama, dari pemberitaan media online, terutama situs media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Oleh situs semacam itu, hoaks sengaja diproduksi untuk kepentingan tertentu dengan membuat berita yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Ironisnya, jumlah situs produsen hoaks begitu banyak. Berdasarkan data Kementerian Informasi dan Informatika, pada tahun 2016 terdapat 800 ribu situs berita di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoaks.[33] Link berita itu lantas disebar di Twiiter menggunakan beberapa akun dengan menyertakan sejumlah akun *influencer*.

Ismail Fahmi, pemilik sekaligus pimpinan media monitoring dan analisis sosial media Drone Emprit, mengungkap bagaimana pemberitaan media online menjadi viral walaupun bukan datang dari media maintream terpercaya. Ia mengangkat contoh kasus soal isu serbuan 10 juta tenaga kerja China ke Indonesia yang mencuat pada akhir tahun 2016. Dalam penelusurannya, isu itu pertama kali dihembuskan oleh portal berita

---

[33] Lihat pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika di https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia. Diakses tanggal 20 Oktober 2019.

posmetro.info dan liputan77.com dengan memelintir penandatanganan kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Padahal, inti kesepahaman itu ialah undangan pemerintah untuk mendatangkan 10 juta wisatawan (bukan pekerja) asal negara RRT ke Indonesia hingga tahun 2019. Namun karena daya sebar berita itu begitu cepat, di-retweet dan dikomentari secara emosional oleh akun-akun influencer, maka banyak publik yang percaya. Bahkan klarifikasi dari pemerintah yang diberitakan media mainstream cenderung ditolak atau diragukan kebenarannya.[34] Banyak publik terperangkap, asyik-masyuk dalam fenomena post truth, yaitu fenomena dimana seseorang tidak lagi peduli kebenaran sebuah fakta melainkan mencari afirmasi dan dukungan atas keyakinan yang dimiliki.

Kedua, dari kicauan akun influencer, terutama akun yang memiliki kepentingan politik-ekonomi tertentu. Di sini berlaku ungkapan, "pendapat seseorang tergantung pendapatannya", atau "tingkah polah seseorang sesuai dengan kepentingannya". Akun influencer yang berdiri di atas kepentingan politik tertentu akan selalu mencari afirmasi dan dukungan atas posisi dirinya dan di saat bersamaan mencari kesalahan lawan untuk melemahkannya. Begitu pula, akun influencer bayaran akan selalu membela tuannya dan menyalak kesalahan pihak yang berseberangan dengan 'junjungan'-nya. Dengan memanfaatkan jumlah follower di atas rata-rata, ribuan hingga ratusan ribu, akun-akun itu berupaya menggiring opini lewat serial kuliah twitter (kultwit)

---

[34] Ismail Fahmi, "Perilaku Masyarakat Indonesia terhadap Hoaks, Media, dan Budaya Baca"

dengan narasi cukup meyakinkan. Narasi yang bersandar pada opini pribadi, kasus privat yang tidak bisa dikroscek kebenarannya, juga dibangun di atas emosi nasionalisme dan primordialisme sempit. Perilaku akun-akun itu di Twitter sangat reaktif atas suatu berita atau kejadian serta mudah menyebarkannya. Dan, lingkaran hoaks semakin menebal ketika kicauan akun tersebut dikutip oleh media online tanpa melakukan verifikasi data, juga konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

Salah satu contohnya ialah isu PKI (Partai Komunis Indonesia) di sekitar Jokowi dan isu khilafah di sekitar Prabowo. Isu PKI yang sudah dihembuskan sejak Pilpres 2014 lalu kembali muncul pada perhelatan Pilpres 2019, tepatnya sesudah acara debat ke-4 calon Presiden, Maret 2019. Sebuah akun influencer dengan follower ratusan ribu mengunggah foto salah satu pendukung Jokowi yang hadir di lokasi acara itu menggunakan peci berlogo palu arit. Sontak unggahan itu viral, disebar ribuan akun, dan jadi pemberitaan yang seolah meneguhkan opini selama bahwa Jokowi terkait dengan PKI. Namun setelah ditelusuri, foto itu ternyata hasil editan di mana dalam foto aslinya tidak ada logo tersebut. Pun demikian halnya serangan hoaks menimpa Prabowo yang digerakkan oleh sejumlah akun influencer dengan menyebut pro-khilafah, penghianat Pancasila, dan sebagainya. Penggiringan opini dari kedua kubu sempat mewarnai trending topic dengan tagar #PKIvsPancasila dan #KhilafahvsPancasila.[35]

---

[35] Lihat di https://www.kominfo.go.id/content/detail/17670/hoaks-pendukung-jokowi-diacara-debat-memakai-pin-ditopi-lambang-pki/0/laporan_isu_hoaks. Lihat juga tulisan Nadirsyah Hosen, "Pilpres 2019: Perang Komunisme vs Khilafah? di https://www.matamatapolitik.com/opini-pilpres-2019-perang-komunisme-vs-khilafah/. Artikel diakses 20 Oktober 2019.

Perilaku para penyebar hoaks di Twitter telah menjadikan suasana pertemuan dan perbincangan antar warga negara di jagad maya serba hita putih, terkotak-kotak, dan dipenuhi kebencian. Suasana semacam itu pada tataran lebih lanjut tanpa disadari telah ikut membentuk perilaku sebagian pemuda milenial di media sosial. Salah satunya, gampang menyebar informasi hoaks serta reaktif terhadap hal-hal yang tidak disukai. Interaksi antar netizen selalu dipandang dalam kacamata oposisional yang saling berhadap-hadapan. Dalam mengomentari berita atau postingan status suatu akun, misalnya, tak jarang mereka menghujat hanya karena beda pandangan atau keyakinan.

Itu pula yang dirasakan oleh I Wayan Eka Dharmaputra. Suatu waktu, ia menemui salah satu akun di Twitter, Instagram, dan kanal Youtube yang mengunggah informasi soal agama Hindu. Namun tak dinyana, tiba-tiba muncul beberapa komentar yang menyerang dan mendiskreditkan. Padahal, menurutnya, pemilik akun yang berkomentar negatif itu tidak benar-benar mengetahui apa maksud informasi tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkannya merasa tidak asik lagi bermedia sosial. Baginya, perilaku sebagian netizen membuat pengap suasana kehidupan dunia maya serta potensial merusak tenun kebangsaan.[36] Apalagi jika perilaku itu berlanjut pada tindakan persekusi di dunia nyata bahkan berujung pada kekerasan fisik.

Oleh karena itu, revitalisasi Pancasila di media sosial dianggap penting untuk mengarahkan netizen agar lebih dewasa, selektif menyebarkan berita serta menghargai

---

[36] Wawancara I Wayan Eka Dharmaputra, 9 November 2019.

perbedaan pendapat atau keyakinan. Salah satu caranya adalah dengan mengetengahkan pentingnya literasi media di kalangan milenial, yaitu kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, menganalisis, dan mengomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya.[37] Dengan kata lain, perlu ada upaya serius dari pemerintah melalui lembaga-lembaga di dalamnya untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap kritis khalayak media khususnya kalangan milenial. Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, literasi media mesti dijalankan di atas prinsip bahwa setiap warga negara adalah wartawan (netizen journalist) yang terlibat dalam kegiatan mencari, menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Karenanya, setiap warga negara harus diberdayakan sehingga punya kemampuan kritis mengarungi ruang virtual dan tidak hanyut dalam arus informasi media.

Apa yang dilakukan oleh milenial Kristian Apriadi Li bersama teman-temannya di kelas dapat dijadikan sekelumit inspirasi. Sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Universitas Budhi Dharma, ia berdiskusi tentang bagaimana membangun kesadaran kritis di tengah mewabahnya informasi hoaks. Dari diskusi itu ia menemukan beberapa langkah sederhana untuk mendeteksi apakah sebuah berita dikategorikan benar atau hoaks.

> Contoh kita dapat berita, dari detik.com, itu kan sudah lembaga berita yang kompeten dan bisa dipercaya, bisa dilihat sumber beritanya. Tapi

[37] Patricia Aufderheide, *Media Literacy, A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy* (Queenstown Maryland: The Aspen Institute Wye Center, 1992), h.6

> kalau misalnya sumber beritanya gak jelas, sekadar dari Whatapps atau dari mana itu bisa dikatakan sebagai hoaks, jika gak jelas siapa pembuatnya, bagaimana redaksinya, editornya siapa. Kalau dia sendiri tidak konsisten dengan bahasanya, berarti berita hoaks.[38]

Pernyataan tersebut menyasar empat elemen pemberitaan sekaligus, yaitu sumber berita, pembuat berita, redaksi berita, dan editor berita. Bagi Kristian, sumber berita penting untuk melihat seberapa besar keseriusan media mengikuti kaidah pemberitaan yang dikontrol oleh lembaga Dewan Pers. Di sini sebuah media harus terverifikasi terlebih dahulu agar berita yang diturunkan dapat dipercaya. Sebab berdasarkan pengalaman yang ia temui, hoaks marak diproduksi oleh media yang tidak jelas, tidak terverifikasi, karena tidak ada beban kelembagaan untuk mengikuti prosedur dan kaidah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Langkah selanjutnya, berita harus jelas pembuatnya agar bisa dikonfirmasi dan dipertanggungjawabkan. Minimal, media bersangkutan mencantumkan alamat pengaduan dan pembuat berita tercatat sebagai wartawan.

Bagian terpenting, menurutnya, redaksi berita harus sesuai dengan kaidah jurnalistik di mana keseluruhan berita setidaknya memuat prinsip 5-W 1-H yang dapat diklarifikasi. Redaksi berita juga harus konsisten dari segi pilihan kata dan susunan kalimat mulai paragraf awal hingga paragraf akhir. Tak cukup sampai di situ, langkah terakhir untuk mengetahui kebenaran berita ialah dengan memeriksanya melalui search engine, yaitu mencari perbandingan berita baik melalui Google maupun mesin

[38] Wawancara Kristian Apriadi Li, 22 Oktober 2019.

pencarian lainnya. Ini dilakukan karena, kata Kristian, sebuah informasi atau kejadian di era digital cepat beredar sehingga memungkinkan diketahui khalayak ramai. Apalagi, jika informasi dan kejadian itu menggungah perhatian publik, maka sudah dipastikan akan banyak media yang memberitakannya.

Selain melalui literasi media, revitalisasi Pancasila di media sosial juga bisa dilakukan dengan cara praktis dan sederhana, yaitu dengan menggaet influencer, membuat dan menyebarkan meme, karikatur atau video pendek yang mengarusutamakan prinsip-prinsip etik Pancasila. Di sini prinsip seperti kerukunan antar sesama warga negara, persaudaraan, persatuan, dan sebagainya dapat terus dikampanyekan sebagaimana dilakukan oleh Desnita Gulo, mahasiswa Universitas Pamulang asal Nias. Selama beberapa bulan terakhir ini ia terbiasa membuat quote atau meme berisi kata-kata sederhana namun menyentuh. Misalnya lewat kata-kata: "perbedaan adalah alasan kita bersatu" yang di bagian paling bawah diberi tulisan "Indonesia" dan kemudian disebar di media sosial.[39] Terutama di hari-hari besar nasional, ia pasti menyebar meme yang didesain menarik dan cenderung disukai milenial. Ia merasa senang ketika meme itu dibaca, disukai, disebar ulang apalagi jika samapai dijadikan foto profile oleh netizen.

Pengalaman praksis lain diungkap oleh Rahma, siswa Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta. Dia menceritakan, setiap tahun di sekolahnya diadakan pentas SPS yang salah satu kegiatannya ialah lomba membuat film pendek. Temanya bermacam-macam

[39] *Focus Group Discussion*, 28 September 2019.

seperti Sang Saka Merah Putih atau tema lain yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Hasil karya itu kemudian diunggah di Youtube dan disebar ke teman-temannya di media sosial.[40] Cara itu dianggap efektif menanamkan nilai-nilai Pancasila karena kebanyakan milenial lebih suka hal-hal visual ketimbang membaca buku.

[40] *Focus Group Discussion,* 5 Oktober 2019.

Bab V

STRATEGI REVITALISASI PANCASILA UNTUK KALANGAN MUDA MILENIAL

Sebelum membahas dan menganalisis strategi revitalisasi Pancasila untuk kalangan muda milenial, adalah perlu untuk mempelajari berbagai hasil penelitian terkait Pancasila dan kalangan muda milenial dari berbagai pihak. Walaupun tidak secara spesifik mengandung penjelasan strategi revitalisasi Pancasila di kalangan muda milenial, beberapa penelitian berikut ini dapat menggambarkan persepsi kalangan muda milenial mengenai Pancasila. Di antaranya adalah penelitian CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang melibatkan 935 responden kaum muda Muslim milenial di 18 kota/kabupaten di Indonesia selama pertengahan kedua tahun 2017.

Dari penelitian tersebut ditemukan tingginya dukungan aktivis muda Muslim terhadap Pancasila. Setidaknya terdapat tiga tipologi sebagai berikut. *Tipologi pertama*, bahwa kaum muda Muslim mengakui dan menerima Pancasila secara bulat tanpa syarat sebagai simbol perekat bangsa yang majemuk. Ada dua argumen yang digunakan untuk mendukung posisi mereka. *Pertama*, bahwa Pancasila merupakan simbol perekat dan pemersatu bangsa dan negara, dan kedua, bahwa Pancasila menyediakan dasar yang kokoh bagi tumbuhnya keragaman dan kebangsaan.[1]

---

[1] Chaider S. Bamualim, Hilman Latief, dan Irfan Abubakar (eds.), *Kaum Muda Muslim Milenial; Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme* (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 167-179.

Tipologi kedua adalah penggunaan argumen Islam untuk mendukung Pancasila. Bahwa kaum muda Muslim mengakui Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara dengan keyakinan bahwa Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai keislaman. Tipologi ketiga adalah pengakuan dan penerimaan kaum muda Muslim atas Pancasila secara ambigu. Dalam tipologi ini terdapat dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengakui Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, tetapi memiliki agenda ideologi tersendiri, berupa 're-islamisasi Pancasila' dengan berusaha mengembalikan Pancasila pada spirit Piagam Jakarta. Kedua, kelompok yang mengakui Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara tetapi mempunyai agenda ganda sekaligus, yaitu penerapan syariah dan khilafah.[2]

Penelitian lain, yaitu survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada tanggal 23-30 Agustus 2017, yang dilakukan secara proporsional di 34 provinsi, terhadap kaum milenial berusia antara 17-29 tahun dan non milenial berusia 30 tahun ke atas. Survei tersebut menemukan bahwa dukungan kalangan muda milenial dan non milenial terhadap Pancasila sangat kuat, yaitu sebanyak 90,5% (milenial) dan 85,4% (non milenial). Dalam survei nasional ini generasi milenial dengan tegas menolak digantikannya Pancasila dengan ideologi lain.[3]

Senada dengan survei CSIS, survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun

---

[2] Chaider S. Bamualim, Hilman Latief, dan Irfan Abubakar (eds.), *Kaum Muda Muslim Milenial; Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 167-179.

[3] Centre for Strategic and International Studies (CSIS), "*Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik*", Rilis dan Konferensi Pers Survei Nasional CSIS, Jakarta, 2 November 2017.

2017 juga menemukan bahwa mayoritas (90,16%) responden dari kalangan siswa dan mahasiswa berpendapat bahwa pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sebanyak 80,74% dari mereka tidak setuju terhadap pernyataan bahwa pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut adalah kafir dan *thaghut*.[4]

Dari tiga penelitian di atas jelas terbaca bahwa persepsi, argumen, dan pandangan kalangan muda milenial terhadap Pancasila tegas dan beragam, terutama mereka yang beragama Islam. Keragaman ini mungkin dipengaruhi latar belakang pendidikan, lingkungan sekitar dimana mereka bergaul, dan informasi yang mereka peroleh, baik dari bangku sekolah dan universitas maupun pengaruh dari luar sekolah.

Selanjutnya, untuk memberi makna strategis pada agenda revitalisasi Pancasila, maka proses ini perlu diterjemahkan ke dalam kerangka penguatan budaya dan karakter bangsa. Diantaranya dengan penanaman nilai-nilai etika. Franz Magnis-Suseno, filosof dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, berpendapat bahwa etika bukan hanya sebuah rumusan melainkan merupakan prasyarat agar bangsa Indonesia bisa maju bersama, damai, sejahtera, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Dalam konteks Pancasila, Franz Magnis-Suseno merumuskan etika Pancasila dalam lima pedoman. Kelima pedoman tersebut adalah: 1) tak boleh ada tekanan, ancaman atau paksaan dalam hal agama; 2) dalam situasi apa pun kita tetap perlu bertindak secara beradab; 3) kita maju dan kita maju bersama; 4) mari kita sukseskan

---

[4] Rangga Eka Saputra, *Convey Report* "Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z" (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. 1. No. 1 Tahun 2018, hal. 16.

demokrasi kita; dan 5) mari kita dahulukan yang miskin dan lemah agar dapat hidup secara manusiawi.[5] Kelima pedoman di atas muncul sebagai reaksi atas perilaku masyarakat yang cukup memprohatinkan, juuh dari Pancasila dan nilai-nilai agung yang dikandungnya.

Sebagai bagian dari laporan kajian akademik, bab ini mengulas secara spesifik temuan lapangan tentang strategi revitalisasi Pancasila di kalangan muda milenial dari berbagai latar belakang pendidikan, agama, dan suku atau etnis di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bahasan dalam bab ini meliputi empat bagian: *pertama*, strategi revitalisasi Pancasila melalui ajaran nilai-nilai agama; *kedua*, strategi revitalisasi Pancasila melalui nilai-nilai budaya dan kebangsaan; *ketiga*, strategi revitalisasi Pancasila melalui dunia digital; dan keempat, strategi revitalisasi Pancasila melalui kurikulum pendidikan di sekolah.

A. Strategi Revitalisasi Pancasila melalui Ajaran Nilai-Nilai Agama

Dalam bukunya *Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan*, Fokky Fuad Wasitaatmaja memaparkan ulasan rinci mengenai hubungan Pancasila dan Islam, yaitu melalui pemahaman dan interpretasi ayat Al-Quran, dalam memaknai sila-sila Pancasila.[6] Mengaitkan ayat Al-Qur'an dengan membedah sila Pancasila memiliki tujuan untuk melihat titik taut di

---

5 Franz Magnis-Suseno, "Etika Bangsa Berbudaya di Abad ke 21: Keharusan Kalau Indonesia Mau Maju", *makalah pada Seminar Nasional Membangun Karakter Bangsa melalui Pemantapan Kebudayaan Nasional dan Kesadaran Historis*, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, 30 Mei 2012.

6 Fokky Fuad Wasitaatmaja, *Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan* (Depok: Prenadamedia Group), 2018.

antaranya, sebagai pegangan filosofis dan teologis dalam memaknai sila-sila Pancasila, termasuk pengamalannya. Menurutnya, mulai dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Pancasila mempunyai keselarasan dengan ayat Al-Qur'an. Karena itu, adalah sangat relevan bila revitalisasi Pancasila bagi kalangan muda milenial dilakukan melalui ajaran nilai-nilai agama, termasuk agama Islam.

Menurut ahli politik LIPI, Anas Saidi, agama membutuhkan Pancasila untuk mengatasi keterbatasannya, khususnya dalam mempertemukan kehendak bersama antar agama dan/atau mereduksi ikatan primordial yang berpotensi mengundang konflik. Secara sosiologis, agama berfungsi sebagai "pemecah" (*out group*) sekaligus sebagai "perekat" (*in group*). Fungsi laten ini, oleh Anas Saidi diangggap sebagai sisi lemah agama, tapi mungkin dapat dijembatani dengan menghadirkan pedoman dan konsensus bersama, yaitu Pancasila.[7]

Selanjutnya, agar tidak terjadi ketegangan antara Pancasila dan agama, perlu diciptakan hubungan simbiosis mutualistik antara keduanya. Dalam hal ini, Pancasila membutuhkan agama sebagai sumber etika atau norma yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, agama membutuhkan Pancasila dalam rangka mempertemukan nilai-nilai universal agama-agama, seperti: keadilan, kesamaan, kesetaraan, kemanusiaan dan sebagainya. Ketegangan agama dan Pancasila hanya bisa direduksi jika para

---

[7] Anas Saidi, "Relasi Pancasila, Agama, dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi", *Jurnal Masyarakat & Budaya,* Volume 11. No. 1 Tahun 2009, hal. 27.

pendukungnya tidak saling menyalahkan dan memaksakan kehendak, serta tidak saling klaim atas dasar egonya masing-masing.[8]

Intinya, dapat disimpulkan bahwa hampir semua narasumber, yang diwawancarai maupun dilibatkan dalam Focus Group Discussion (FGD), berpandangan bahwa Pancasila bisa diamalkan melalui ajaran nilai-nilai agama. Namun, secara operasional upaya ini masih perlu disederhanakan agar sesuai dengan selera, minat, dan taste kalangan muda milenial. Kesimpulan ini diperoleh dari Focus Group Discussion (FGD) Kajian Akademik "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Anak Muda Milenial Indonesia", yang diadakan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 28 September 2019 untuk mahasiswa, dan FGD 5 Oktober 2019 untuk kalangan siswa. Termasuk juga dalam wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang berasal dari kalangan siswa maupun mahasiswa.

Salah satu responden asal Nias, Desnita Gulo, mahasiswi Akuntansi Universitas Pamulang berpandangan bahwa ia sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui ajaran agama. Contohnya, seperti membuat quotation "perbedaan adalah alasan kita untuk bersatu", yang di bawahnya diberikan tulisan "Indonesia". Quotation ini kemudian disebar di jaringan media sosial miliknya.[9]

Desnita juga bercerita pada suatu masa ia pernah bekerja di toko tekstil di Kota Depok, Jawa Barat. Teman-temannya

---

8 Anas Saidi, "Relasi Pancasila, Agama, dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi", *Jurnal Masyarakat & Budaya,* Volume 11. No. 1 Tahun 2009, hal. 32.

9 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Anak Muda Milenial Indonesia", CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 28 September 2019.

yang satu kantor dengan dia berasal dari berbagai agama, ada orang India yang beragama Hindu dan ada juga Muslim. Sementara ia sendiri beragama Kristen. Dalam prakteknya, mereka yang beragama selain Islam memberikan dan mempersilahkan kepada pegawai Muslim di toko tersebut untuk menunaikan shalat 5 waktu. Terkadang, di sela-sela bekerja, mereka melakukan diskusi ringan terkait agama masing-masing dan saling mengingatkan bahwa dengan Pancasila mereka harus saling menghargai antara satu dengan lainnya.

Dari penuturan Desnita terlihat bahwa implementasi Pancasila bisa dilakukan dalam keseharian warga negara, dalam kondisi dan profesi apapun, termasuk melalui ritual agama masing. Mengakui dan menghargai perbedaan dalam keragaman dan keberagamaan juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila melalui nilai-nilai keagamaan.

Bagi Ahmad Saeroji, asli Sunda dan Muslim, mahasiswa Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, implementasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan berdiskusi dan berdialog, yang dapat dihubungkan dengan tema agama. Kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk mengakomodir semua golongan dan semua agama. Menurutnya, gesekan yang terjadi antar pemeluk agama adalah bentuk kecurigaan satu sama lain. Tanpa adanya diskusi dan dialog, kecurigaan yang ada akan semakin besar. Karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, semua pihak harus diundang, kalau perlu juga mengundang yang berbeda pendapat. Saeroji juga menegaskan bahwa bila ada perbedaan dalam memaknai Pancasila dikaitkan dengan nilai-nilai agama, yang harus dilakukan terlebih dahulu

adalah menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut untuk kemudian ditemukan persamaannya. Dengan begitu, ia optimis kalangan muda milenial bisa memahami dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hal ini juga bisa dilakukan melalui kanal-kanal media sosial.[10]

Bagi siswa SLTA, pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila selain dilakukan secara langsung di sekolah melalui pembelajaran budaya keagamaan (*religious culture*), juga bisa dilakukan dengan membuat video pembelajaran. Video pelajaran agama bisa memuat nilai-nilai Pancasila dan agar ditonton secara terus menerus, khususnya oleh siswa sekolah, yang bisa dilakukan pihak sekolah, siswa itu sendiri, maupun orang tua. Isinya tidak hanya tentang agama saja, tapi juga tentang nilai-nilai Pancasila. Hal ini sangat dibutuhkan, karena menurut Brama Fawwaz Aydin, siswa SMA Madania Bogor, kalangan muda milenial adalah merupakan anak rumahan. Mereka lebih sering bersosialisasi lewat media sosial.[11]

Sementara Intan Khairuzitni, mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, dalam sebuah wawancara mengemukakan bahwa kalangan muda milenial lebih tertarik melihat Pancasila dalam hal implementasi nilai-nilai kemanusiaannya bila dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Menurutnya, hal itu yang menjadi prioritas saat ini, karena kalangan muda

---

[10] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.
[11] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

milenial akan terlibat dalam menyuarakan hak-hak kemanusiaan yang harus diperjuangkan. Namun ia memberi catatan, itu semua jangan sampai terlepas dari agama, karena agama sebenarnya sudah mengatur bagaimana hubungannya dengan Pancasila.[12]

Intan juga menegaskan bahwa ritual keagamaan tidak bertentangan dengan Pancasila, walaupun berbeda tapi bisa saling menguatkan. Bagi kalangan muda milenial, mereka cenderung lebih bisa membaur. Menurutnya, anak-anak muda milenial tidak memandang apa agama seseorang. Yang penting mereka bergaul satu sama lain. Terkait strategi revitalisasi Pancasila melalui ajaran nilai-nilai agama, Intan mengusulkan agar lebih mengedepankan permasalahan yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan implementasinya, dan haruslah dibuat dengan sederhana serta muda dicerna. Karena hal tersebut lebih dekat ke pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, nilai-nilai kemanusiaan ada di dalam ajaran dan nilai-nilai agama apapun, yang di dalamnya meliputi nilai-nilai Pancasila.

Bagi Vioni Puteri, mahasiswi Sosiologi Universitas Indonesia yang beragama Katolik, dalam upaya dan strategi revitalisasi Pancasila melalui nilai-nilai agama, ada baiknya mencontoh apa yang dilakukan Gereja Katolik. Alasan Vioni cukup masuk akal. Karena menurutnya, "bahasa" Pancasila dan "bahasa" agama Katolik adalah bahasa yang universal. Lebih lanjut dalam sebuah wawancara Vioni menyatakan:[13]

---

[12] Wawancara Intan Khairuzitni, mahasiswi Semester VII Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta.

[13] Wawancara Vioni Puteri, mahasiswi Sosiologi Universitas Indonesia.

> "Menurut saya, boleh juga dibikin kayak yang Katolik ini. Kalau Katolik kan mengusung Pancasila dan Katolik ini kan sifatnya universal. Jadi semua gereja Katolik menerapkan itu. Dari Persatuan Katolik Indonesia sudah menetapkan itu. Jadi di setiap gereja akan mendengar lagu yang sama. Terus kayak membaca hal yang sama. Kalau menurut saya, kalau dikoordinasi seperti itu ada baiknya juga."

Namun di sisi lain, Johanes Hasea Sitorus, siswa Kelas XII SMAN 82 Jakarta, yang beragama Kristen Protestan merasa bahwa ajaran agama di sekolah maupun di lingkungan rumah masih banyak yang belum sejalan dengan Pancasila, ataupun sebaliknya. Namun demikian, ada juga yang tetap mempraktekkannya. Johanes menuturkan:[14]

> "Kalau saya lihat kadang-kadang masih banyak. Seperti masih banyak yang tidak menghargai pendapat orang lain, egois. Tetapi masih lebih banyak yang menjalankan."

Karena itu, dalam praktek agama Kristen Protestan, Johanes melihat bahwa nilai-nilai Pancasila ada dalam ajaran agama Kristen. Yaitu istilah/frasa "kasihanilah sesama manusia". Dalam bahasa Johanes, bila kita berbuat baik kepada seluruh teman-teman kita bisa diibaratkan kita berbuat baik juga untuk diri kita sendiri. Demikian juga dengan "kalau kita mengasihi diri sendiri harus sama juga dengan mengasihi orang lain".

Pengalaman praktik beragama dan relevansinya dengan Pancasila sebagaimana yang dialami Johanes di gerejanya,

---

[14] Wawancara Johanes Hasea Sitorus, siswa Kelas XII SMAN 82 Jakarta. Johanes juga pernah menjadi Ketua Rohis Protestan di sekolahnya selama 2018-2019.

yaitu Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), langsung ke implementasinya, sebagaimana juga umumnya dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti pelaksanaan Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus setiap tahun dimana Gereja HKBP melakukan upacara bendera dan perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Praktek baik yang lain yang dipraktekkan oleh kalangan muda milenial, yang menurut Johanes sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, di antaranya, bila dalam ada event tertentu, mereka saling tolong menolong, saling bahu membahu. Itu semua dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada.[15]

B. Strategi Revitalisasi Pancasila melalui Nilai-Nilai Budaya dan Kebangsaan

Bambang Suteng Sulasmono, dalam tulisannya Peluang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, menegaskan bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan melalui dua pendekatan komplementer, yaitu (1) pendekatan kultural; dan (2) pendekatan struktural. Pendekatan kultural hendaknya dilakukan untuk menyemai benih, menumbuhsuburkan dan menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan pembiasaan (habituasi) bagi segenap komponen bangsa, terlebih generasi muda agar semakin kuat komitmen kebangsaannya. Upaya kultural juga sekaligus untuk memerangi beberapa kendala revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang kerap kita hadapi: (a) kuatnya in-group

---

[15] Wawancara Johanes Hasea Sitorus, siswa Kelas XII SMAN 82 Jakarta. Johanes juga pernah menjadi Ketua Rohis Protestan di sekolahnya selama 2018-2019.

feeling di kalangan suku-suku bangsa; (b) etnosentrime; dan © eksklusivisme.[16]

Sementara pendekatan struktural hendaknya dilakukan melalui pendidikan dan pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib ditopang oleh penciptaan struktur kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Seolah ingin menunjukkan praktek secara langsung, sebagaimana diutarakan Bambang di atas, temuan kajian akademik terkait strategi revitalisasi Pancasila melalui nilai-nilai budaya dan kebangsaan memperlihatkan bahwa kalangan muda milenial mempunyai beragam argumen, ide dan gagasan dengan variasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Desnita Gulo, mahasiswi Akuntansi Universitas Pamulang yang beragama Kristen dan berasal dari Pulau Nias Sumatera Utara, misalnya, mengatakan bahwa strategi revitalisasi Pancasila melalui penanaman nilai-nilai budaya dan kebangsaan dapat dilakukan dan dimulai dari dan di rumah. Menurutnya, karena hampir setiap rumah di Indonesia mempunyai televisi, alangkah baiknya bila lagu-lagu kebangsaan diputar secara reguler di semua stasiun televisi yang ada. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita sebagai warga negara.[17]

Namun demikian, Desnita mengingatkan agar pemutaran lagu-lagu kebangsaan tidak hanya diputar di hari-hari besar (hari libur) nasional saja. Tapi juga bisa di hari-hari

---

[16] Bambang Suteng Sulasmono, "Peluang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Satya Widya*, Volume XXXV No. 1, Juni 2019, hal. 80.

[17] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

lain. Itu semua bertujuan agar rasa kebangsaan kita, khususnya dari kalangan muda milenial, tumbuh dan tersemai dengan baik.

Aldi Destian, mahasiswa Universitas Bina Nusantra, yang beragama Konghucu dan berasal dari etnis Tionghoa, menambahkan bahwa penyaluran dan penanaman nilai-nilai Pancasila, selain dilakukan melalui media sosial juga bisa dengan dialog, pertemuan, dan lain sebagainya, yang sifatnya offline (istilah lain, kopi darat). Menurutnya, kalau beberapa waktu lalu ada program "jelajah geraja", hal itu bisa dilakukan dan diterapkan lagi. Dengan begitu, milenial bisa keluar dari zona nyaman. Dalam pengamatan Aldi selama ini, bukan Pancasila yang salah, tapi sistem dan metode penerapannya yang mesti diperbaiki agar lebih baik. Ia mencontohkan terkait keadilan rakyat, sambil mengilustrasikan bahwa wakil rakyat (DPR) didemonstrasi oleh mahasiswa atau rakyat itu sendiri. Dalam hal ini, ia kembali menandaskan dalam FGD bahwa bukan Pancasila yang salah.[18]

Senada dengan Aldi, Brama Fawwaz Aydin, siswa SMA Madania Bogor, mengutarakan selain membuat konten-konten menarik tentang Pancasila, mungkin juga bisa dibuat forum diskusi dimana anak muda milenial bisa ikut andil. Forum diskusi harus fokus membahas isu yang berhubungan dengan Pancasila. Dengan begitu, diharapkan kalangan muda milenial bisa bergabung membahas Pancasila.[19] Teman Brama, Alexandra Alessia, siswi SMA Katolik Meter Dei yang beragama Kristen Protestan, menambahkan bahwa forum diskusi bagi

---

[18] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

[19] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

kalangan muda milenial juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi negara, apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak.[20]

Vioni Puteri, mahasiswi Sosiologi Universitas Indonesia, menyarankan agar penanaman Pancasila melalui budaya bisa menarik bagi kalangan muda milenial harus melalui kesenian atau sarana hiburan yang bertujuan mengajarkan Pancasila. Dengan begitu diharapkan kalangan muda milenial bisa lebih aware. Jadi dalam hal ini menurut Vioni, nilai-nilai budaya harus disandingkan dengan kesenian atau hiburan. Tapi harus dikemas dengan lebih menarik. Salah satu contohnya, misalnya melalui audio visual.[21]

Bagi Intan Khairuzitni, mahasiswi Semester VII Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Uhamka Jakarta, sebenarnya dalam mengamalkan Pancasila bagi kalangan muda milenial cukup berat. Namun demikian, di sisi lain ada optimisme. Intan mengusulkan revitalisasi Pancasila dapat dilakukan melalui strategi kebudayaan, yaitu dengan terlebih dahulu mengubah mindset kita bahwa kalangan muda milenial harus "didekati" dengan cara dan gaya mereka yang sangat akrab dengan dunia digital, informasi instan, dan gadget. Itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa kebudayaan Indonesia saat ini masih relatif lemah dan mudah terkikis dan di sisi lain kalangan muda milenial juga sangat plural, terutama dari segi minat dan bakat.[22]

---

[20] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

[21] Wawancara Vioni Puteri, mahasiswi Sosiologi Universitas Indonesia.

[22] Wawancara Intan Khairuzitni, mahasiswi Semester VII Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta.

Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan yang membahas seputar cinta tanah air, juga dapat dilakukan di lingkungan keagamaan. Misalnya dalam khutbah-khutbah keagamaan di lingkungan gereja. Sebagaimana dialami Johanes Hasea Sitorus, siswa Kelas XII SMAN 82 Jakarta yang beragama Protestan, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dimana ia sebagai jamaahnya. Menurutnya:[23]

> "... Misalnya tentang pemimpin adalah perwakilan Tuhan di dalam bernegara. Itu biasanya disinggung ketika suasana perpolitikan mulai memanas. Jadi kita selalu diingatkan bahwa pemimpin itu merupakan wakil dan pilihan Tuhan yang harus kita patuhi."

Johanes juga menekankan bahwa strategi revitalisasi Pancasila melalui kebudayaan dan nilai kebangsaan bagi kalangan muda milenial harus lebih banyak ditekankan dalam aspek pergaulan. Aspek ini sangat berhubungan dengan pemberian contoh (teladan), khususnya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Strategi Revitalisasi Pancasila melalui Dunia Digital

Umum diketahui bahwa kalangan muda milenial saat ini sangat akrab dengan dunia digital, atau dalam bahasa lain sering juga disebut dunia maya (dumay) yang akrab dan terkoneksi dengan internet. Sebagai sebuah gambaran, dalam rilis Hootsuit Indonesia Digital Landscape yang dirilis Januari 2018 menempatkan Indonesia sebagai pengguna internet terbesar keempat di dunia. Dengan populasi penduduk kurang lebih 265,4 juta jiwa, dengan pengguna aktif internet sebanyak 132,7 juta, pengguna

---

[23] Wawancara Johanes Hasea Sitorus, siswa Kelas XII SMAN 82 Jakarta.

aktif media sosial sebanyak 130 juta. Dari sebanyak itu, yang mengakses dari gadget kurang lebih sebesar 120 juta dengan rerata akses harian selama kurang lebih 8 jam 51 menit. Ini berarti tidak kurang dari 53,3% penduduk Indonesia mengakses media online setiap hari. Indonesia juga pengguna media sosial (medsos) terbesar di dunia, dimana medsos notabene didominasi pengguna aktif dari kelompok muda milenial.[24]

Kenyataan di atas menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk pasar digital yang sangat potensial, ditambah lagi dengan percepatan pembangunan teknologi dan dukungan infrastruktur penunjang yang menyatukan hampir seluruh plosok kawasan Indonesia yang terkoneksi secara baik dengan internet.

Terkait dengan lingkup dunia milenial, dalam Indonesia Millenial Report 2019 yang dirilis IDN Research Institute, para instagrammers dan youtubers sangat mempertimbangkan para tokoh muda dari kalangan milenial. Mereka mempunyai kekuatan influensi dalam proses pengambilan keputusan kalangan muda milenial. Laporan IDN Research Institute menemukan bahwa 94,5% kalangan muda milenial terhubung dengan internet, yang umumnya dikenal dengan internet addicted atau i-generation. Yang cukup mengejutkan, 79% milenial membuka smartphone mereka 1 menit setelah mereka bangun tidur.[25] Laporan ini menunjukkan bahwa betapa kalangan muda milenial saat ini sangat susah untuk tidak terhubung dengan internet dan tidak menggenggam

---

[24] Kamilia Hamidah, "*Jihad Digital Generasi Milenial: Merebut Ruang Publik dengan Narasi Positif*", makalah dipresentasikan dalam Ceramah Ilmiah Ngaji Sosmed: Jihad Digital Generasi Milenial di Pesantren Putri Al-Badi'iyyah, Kajen Margoyoso, Pati, 21 November 2018.

smartphone, khususnya yang berhubungan dengan dunia media sosial.

Generasi milenial merupakan generasi di usia produktif. Generasi yang akan memainkan peranan penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di masa depan. Generasi ini memiliki kreativitas tinggi, penuh percaya diri serta terkoneksi antara satu dengan lainnya. Namun, hal penting yang harus menjadi perhatian terkait generasi milenial menurut Mayjen TNI Joni Supriyanto, adalah karena generasi milenial hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi. Hal inilah yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita.[26]

Sebelum ulasan lebih jauh di bagian ini, ada baiknya menyimak paparan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dalam sebuah seminar di Universitas Mataram April 2018. Prof. Mahfud memberikan catatan penting terkait tantangan milenial dalam memaknai Pancasila, adalah masalah dari media sosial (medsos). Menurutnya, melalui medsos kita bisa mengambil manfaat tapi juga bisa merusak bangsa kita sendiri. Jangan sampai ada berita hoax yang tersebar melalui medsos yang dapat menyudutkan satu kelompok tertentu dengan menyuarakan ujaran kebencian. Prof.

---

[25] IDN Research Institute, "Indonesia Millenial Report 2019", https://cdn.idntimes.com/content-documents/indonesia-millennial-report-2019-by-idn-times.pdf (diakses 5 November 2019).

[26] Mayjen TNI Joni Supriyanto, "Nilai-Nilai Pancasila bagi Generasi Milenial di Zaman Now", Opini Media Indonesia, 2 Juni 2018, https://mediaindonesia.com/read/detail/163965-nilai-nilai-pancasila-bagi-generasi-milenial-di-zaman-now (diakses 6 November 2019).

Mahfud bahkan menyarankan penggunaan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila.[27]

Sejalan dengan gambaran besarnya pengguna internet dan media digital di Indonesia dari kalangan masyarakat secara umum dan kalangan muda milenial serta tantangan besar bagi generasi milenial sebagaimana dipaparkan di atas, hampir semua narasumber dalam kajian akademik ini baik dalam wawancara mendalam maupun FGD, merekomendasikan agar revitalisasi pemaknaan akan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan implementasinya dilakukan dengan memberi penekanan lebih melalui kanal (saluran) yang diminati dan banyak digrandrungi oleh kalangan muda milenial saat ini, yaitu melalui media digital, khususnya media sosial. Kanal media sosial tersebut yang "lekat" dengan kalangan muda milenial dalam kajian akademik ini: youtube dan instagram.

Mereka sangat menekankan hal tersebut sembari memberikan catatan penting terkait strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui dunia digital. Aldi Destian, misalnya, salah satu peserta FGD 28 September 2019, menyatakan bahwa kalangan milenial indentik dengan media sosial. Pastinya untuk menyalurkan nilai-nilai Pancasila sangat bisa dilakukan melalui dan dengan media sosial. Menurutnya, Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai yang harus diimplementasikan. Tapi lebih lanjut

---

[27] "Membumikan Pancasila di Era Milenial" dalam https://unram.ac.id/membumikan-pancasila-di-era-milenial/ (diakses 6 November 2018). Lihat juga Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, "Mengokohkan Ideologi Pancasila Menyongsing Generasi Z-Alpha", Disampaikan pada Kuliah Umum Universitas Soegiyopranoto, Semarang, 8 Oktober 2018.

ia menandaskan bahwa penyaluran dan penanaman nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dilakukan melalui dan dengan media sosial. Tapi bisa juga melalui dialog, pertemuan, dan lain sebagainya, yang sifatnya offline. Aldi Destian adalah mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara yang beragama Konghucu dan berasal dari etnis Tionghoa.[28]

Sementara Brama Fawwaz Aydin, siswa SMA Madania Bogor, yang beragama Islam dan beretnis Jawa, memberikan catatan penting dalam hal mencari informasi terkait Pancasila di internet. Menurut pengalamannya, ia pernah mendapat tugas PPKN dari gurunya, yaitu terkait lembaga/institusi negara dan kewenangannya (MPR). Brama menjelaskan dalam mencari informasi tersebut di internet tidak cukup hanya berasal dari satu sumber saja, tapi harus mencari sumber yang lain. Termasuk mengunjungi website MPR. Informasi-informasi tersebut perlu juga disaring agar mendapatkan intisari yang paling pas dan paling bagus menurut kita. Selain itu, siswa juga harus kritis dalam mencari informasi di internet. Kritis, dalam penjelasan Brama, adalah:[29]

> "Sebagai milenial kita harus kritis. Maksudnya kritis kita harus pinter-pinter mengambil informasi dari internet. Soalnya masih banyak banget hoax-hoax yang benar-benar yang dibuat diplintir sedemikan rupa. Jadi check and recheck, terus kita jangan semena-mena. Sumber yang valid lah intinya. Yang dipercaya. Anak muda ini kan gampang diprovokasi. Jadi kita harus benar-benar kritis untuk menanggapi semua hal."

---

[28] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

[29] Focus Group Discussion Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

Namun demikian, apapun terkait Pancasila dan strategi revitalisasinya, tidak bisa tidak harus mengetahui dengan seksama waktu-waktu tertentu kiriman di media sosial. Hal ini dilakukan agar posting tentang Pancasila tidak mubazir alias tidak mendapat tanggapan berarti dari publik netizen, khususnya kalangan muda milenial. Tabel berikut dapat memberikan gambaran kapan waktu-waktu terbaik mem-posting kiriman terkait Pancasila di media sosial.

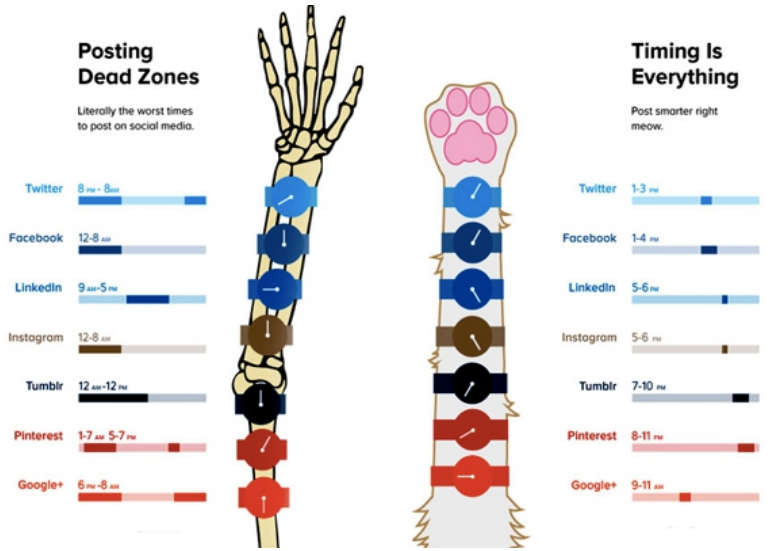

Sumber: Irfan Amalee, "Masjid, Generasi Milenial, dan Dakwah Digital", dipresentasikan dalam Seminar dan Peluncuran Buku Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan, Jakarta, 6 Februari 2019.

Secara umum, temuan lapangan dalam kajian akademik ini merangkum lima bentuk strategi sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui dunia digital yang direkomendasikan oleh narasumber, baik wawancara

mendalam maupun FGD, yang dapat menjadi rekomendasi strategis bagi MPR RI dalam upaya dan strategi revitalisasi Pancasila bagi kalangan muda milenial. Empat bentuk strategi tersebut diurai dalam bahasan berikut.

1. Video dan Film Pendek tentang Pancasila

Dari data wawancara dan FGD dalam kajian akademik ini, strategi revitalisasi Pancasila melalui pembuatan video adalah yang paling banyak disinggung dan direkomendasikan oleh narasumber, termasuk pembuatan film. Pembuatan video dan film yang dimaksud harus dengan durasi pendek, tidak seperti video dan film pada umumnya yang mencapai minimal 30 menit sampai 3 jam. Durasi video dan film pendek tentang Pancasila yang mereka rekomendasikan adalah sekitar 5-10 menit. Bahkan ada yang menyarankan durasi video atau film pendek cukup 2-5 menit saja. Karena kalau durasi video dan film yang ditayangkan melalui media digital lebih dari 10 menit akan membosankan bagi penonton, khususnya kalangan muda milenial.

Sementara terkait strategi diseminasi dan sosialisasi video pendek tersebut, mau tidak mau harus mendekat ke kanal (saluran) yang lekat dengan dunia muda milenial, utamanya adalah media sosial (medsos). Di antara yang paling banyak disebut narasumber adalah: youtube, instagram, dan facebook. Video-video dan film pendek tersebut bisa disosialisasikan dan dikampanyekan melalui akun resmi media sosial milik pemerintah/lembaga negara (misal: MPR RI), milik lembaga kampus, milik organisasi kemasyarakatan (ormas), atau pun

bekerjasama dengan akun selebriti media sosial, yang umumnya mereka dikenal sebagai *influencer*.

Menurut Roby Sugara, mahasiswa Dharmacarya STABN Sriwijaya yang beragama Buddha dan berasal dari etnis Sasak, bagi mahasiswa saat ini film-film pendek cukup penting dan sangat strategis. Penanaman nilai-nilai Pancasila juga bisa menempuh cara ini. Film-film pendek tentang Pancasila harus diposting di channel youtube, baik melalui akun youtube milik lembaga maupun perorangan. Selain itu, Roby juga merekomendasikan penanaman nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan dengan cara dan dalam bentuk kegiatan dialog.[30]

Terkait channel youtube, senada dengan Roby, Anastacia P. Novlina, mahasiswi Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang beragama Katolik dan berasal dari Flores Nusa Tenggara Timur, mengusulkan agar dalam proses sosialisasi dan kampanyenya dapat bekerjasama dengan selegram dan selebtwit. Menurut Anastacia, walaupun selebgram dan selebtwit tidak setenar artis televisi dan artis film, tapi paling tidak mereka bisa diajak kerjasama dalam membuat konten tentang Pancasila dan di-posting di akun milik mereka (bisa youtube, instagram, atau pun media sosial lainnya), yang bisa dilakukan dengan membuat video animasi, motion chart, dan lain sebagainya.

Terkait ini, Anastacia menambahkan bahwa pesan yang ingin disampaikan dengan menggandeng

---

[30] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

selebgram dan selebtwit tidak ujug-ujug. Menurutnya:[31]

> "... Karena biasanya kalo kita kasih ide utamanya ke mereka, mereka biasanya langsung dapet ide lanjutannya. Sehingga lebih banyak dapat like. Dan di sini pesannya tidak ujug-ujug Pancasila, tapi nilai-nilai Pancasila yang diselipkan."

Selebgram yang direkomendasikan Anastacia bisa dilibatkan dalam kampanye dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, misalnya Ria Ricis, Awkarin, dan yang lain yang memungkinkan untuk diajak kerjasama. Bisa dengan cara memasukkan unsur-unsur Pancasila di dalam video mereka, bisa juga di video instagram mereka, ataupun melalui iklan-iklan di video mereka, yang selanjutnya para selebgram tersebut mem-postingnya di akun media sosial mereka masing-masing.

Senada dengan para mahasiswa di atas, Frudence K Dylana, siswi SMAN 3 Tangerang Selatan, yang beragama Konghucu, memaparkan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila harus dengan pendekatan yang millenial taste. Hal ini sangat diperlukan karena kalangan muda milenial sangat dekat dengan teknologi, terutama teknologi informasi. Menurutnya, Pancasila harus dikembangkan menjadi konten yang menarik minat milenial yang bisa diakses di media sosial, misalnya dibikin quotes yang bisa dibuat dalam gambar dan bisa juga dijadikan video pendek. Semuanya diposting

---

[31] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

di media sosial, termasuk instagram. Bagi Frudence, foto-foto pendidikan Pancasila di instagram sangat penting diketahui anak-anak. Jangan sampai yang dikonsumsi oleh mereka adalah informasi-informasi *hoax*.[32]

Hal senada juga diungkapkan Raditya Naufal Daniswara dan Robby Surya Januar, keduanya siswa SMA 1 Depok yang beragama Islam. Menurut mereka, video pendek tentang pembelajaran agama dan nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi kalangan muda milenial. Tapi dengan syarat bahwa video tersebut ditonton dan dipelajari tanpa henti. Karena bagi mereka, kalangan muda milenial malas membaca buku dan selain itu, internet tidak pernah tidur dan menyediakan banyak informasi, di antaranya informasi mengenai Pancasila harus lebih banyak dibanding sebelumnya. Dengan begitu, kalangan muda milenial punya pilihan untuk bisa mengambil sisi baik dari keberadaan internet dengan video-video pendek yang tampil dan mereka konsumsi (tonton).[33]

Terkait revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui video pendek yang diunggah di kanal youtube juga dipertegas oleh Sabila Aisyah Putri, siswa SMA 1 Depok, yang beragama Islam dan berasal dari etnis Jawa. Menurutnya:[34]

> "Sama sih, jadi karena anak milenial udah jarang buka buku, buat video sudah paling tepat. Dan di sekolah juga pembelajaran sudah

---

[32] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.
[33] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.
[34] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

nonton video, kayak dari youtube. Dan menurut saya membuat video di media sosial itu emang udah paling tepat karena anak milenial lebih mudah memahami dengan melihat video daripada baca buku. Terus videonya yang mudah dipahami, dan gampang dimengerti oleh anak milenial."

Hampir semua peserta FGD Revitalisasi Pancasila baik dari kalangan mahasiswa maupun siswa SLTA menyarankan agar video pendek tentang Pancasila yang dibikin jangan terlalu panjang, karena akan membosankan. Saran mereka, agar bisa dinikmati oleh kalangan muda milenial dan tidak membosankan.

2. Meme Pancasila

Selain membuat video dan film pendek tentang Pancasila baik yang diproduksi langsung oleh kementerian/lembaga negara, kelompok masyarakat, kalangan kampus, maupun perorangan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda milenial, strategi lain revitalisasi Pancasila melalui media digital adalah dengan membuat meme tentang Pancasila. Di era serba digital saat ini, meme telah menjadi bagian dari cara berkomunikasi generasi milenial. Bahkan lebih dari sekedar cara berkomunikasi, meme juga mampu memberikan pengaruh yang sangat besar.

Limor Shifman, Profesor Komunikasi dan Jurnalisme dari Hebrew University of Jerusalem, yang juga penulis buku Memes in the Digital Culture mengatakan bahwa meme menjadi bagian yang sangat penting dari cara manusia berkomunikasi

antara satu dengan yang lain. Meme telah menjadi ekonomi yang nyata di internet, meski sebenarnya mereka bukanlah sebuah produk ekonomi.[35]

Dalam perkembangan saat ini, meme muncul di berbagai media sosial, di hampir di setiap isu yang muncul di tengah masyarakat dan membuatnya menjadi satir yang menggelitik. Meme sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Adalah Richard Dawkins, seorang penulis Inggris, evolusionis, dan seorang atheis, yang menulis buku The Selfish Gene. Menurutnya, sebuah meme dianggap setara dengan budaya sebagai gen bagi manusia. Mereka dinilai mampu mendorong evolusi budaya, seperti Darwinisme budaya pop. Tapi definisi asli meme dari Richard Dawkins ini tidak cukup sesuai dengan standar modern saat ini. Menurut Shifman, "gagasan umum yang ada dalam pernyataan tersebut adalah, meme merupakan gagasan yang menyebar di dalam budaya. Tapi itu tidak benar-benar membantu mendefinisikan apa itu meme dan apa yang tidak ada di dunia sekarang ini. Ini adalah ungkapan yang sangat luas".[36]

Pada tahun 1993, Wired mendefinisikan meme sebagai sebuah gagasan yang menular, sama seperti virus yang melompat dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Namun istilah meme saat itu tidak populer, sampai akhirnya pada tahun 2012 istilah meme mencapai puncak popularitasnya. Hal ini terbukti

---

[35] *"Asal Usul Meme Pertama di Internet" dalam https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01285092/asal-usul-meme-pertama-di-internet-408114 (diakses 8 November 2019).*

[36] *Ibid.*

dalam Google Trends Graph, yang memperlihatkan tren peningkatan meme yang luar biasa.[37]

Sebagaimana hoaks, yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dari versi aslinya hoax, kata meme juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, Februari 2017. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata meme dikategorikan sama seperti dalam bahasa Inggris, yakni sebagai nomina, dengan varian dua makna. Meme bisa berarti ide, perilaku, atau gaya yang menyebar dari satu orang ke orang lain dalam sebuah budaya. Meme juga bermakna cuplikan gambar dari acara televisi, film, dan sebagainya atau gambar-gambar buatan sendiri yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan untuk tujuan melucu dan menghibur.[38]

Ulasan di atas dapat memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan meme dan apa langkah yang dapat dilakukan serta bagaimana strategi yang efektif dalam upaya revitalisasi Pancasila bila dilakukan dengan cara menempuh pembuatan meme. Dalam kajian akademik ini, temuan dalam proses wawancara dan FGD memang tidak banyak narasumber yang mengungkapkan bagaimana seharusnya meme dibuat agar punya nilai lebih,

---

[37] *"Asal Usul Meme Pertama di Internet" dalam https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01285092/asal-usul-meme-pertama-di-internet-408114 (diakses 8 November 2019).*

[38] "Kata 'Hoaks' dan 'Meme' Sudah Tercatat di Kamus Bahasa Indonesia", dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.sudah.tercatat.di.kamus.bahasa.indonesia (diakses 10 November 2019). Dapat dilihat juga dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meme (diakses 10 November 2019).

edukatif dan dapat menarik bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda milenial.

Aldi Destian, mahasiswa Universitas Bina Nusantara, yang beragama Konghucu dan berasal dari etnis Tionghoa, mengutarakan bahwa meme tentang Pancasila tidak harus spesifik tentang Pancasila, tapi bisa juga dilakukan dengan membuat meme tokoh moderat seperti Gus Dur, Cak Nur (Nurcholish Madjid). Karena menurutnya, saat ini paham-paham mereka sudah mulai hilang dan sulit dikenali oleh kalangan muda milenial, atau bahkan tidak dikenali. Karena itu hal tersebut bisa disosialisasikan lagi dengan cara yang lebih menarik lagi,[39] di antaranya dengan mengutip pernyataan dan pemikirian mereka terkait dengan Pancasila dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan.

Bagi Brama Fawwaz Aydin, siswa SMA Madania Bogor, meme tentang Pancasila juga sangat penting bagi kalangan muda milenial. Meme tersebut bisa di-posting di media sosial, seperti instagram. Hal ini dilakukan untuk memfilter kalangan muda milenial dari provokasi dan hoaks yang bertebaran di media sosial.[40]

Johanes Hasea Sitorus, siswa Kelas XII SMAN 82 Jakarta, juga menekankan pembuatan meme tentang Pancasila yang dapat disebarluaskan di media sosial, baik youtube berupa video pendek, facebook, twitter, whatsapp, maupun instagram. Dengan catatan bahwa postingan tersebut menarik untuk dilihat dan

---

[39] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.

[40] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

dinikmati serta mudah dicerna, khususnya oleh kalangan muda milenial.

Walaupun temuan data kajian akademik ini yang terkait dengan meme masih sangat umum, tapi dapat menjadi gambaran awal bagaimana seharusnya meme tentang Pancasila dapat diproduksi dengan baik dan punya nilai lebih dan edukatif. Inilah yang menjadi tantangan ke depannya.

Sebagai panduan umum, terkait produksi dan penyebarluasan meme tentang Pencasila harus mempunyai tujuan, yang dapat diringkas menjadi dua tujuan utama: pertama, popularitas. Ilustrasinya, netizen bila menyukai meme dan kemudian membagikannya di media sosial miliknya, artinya netizen tersebut menyukai meme yang ia bagikan. Jika temannya juga menyukainya maka kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Pola ini akan terus menerus seperti itu dan akhirnya meme tersebut viral. Inilah yang dimaksud popularitas dalam hal penyebarluasan meme; Kedua, sebagai media marketing. Dengan melihat fenomena saat ini dimana meme yang beredar di internet cepat menyebar, tentunya hal tersebut dapat digunakan sebagai sebuah alat marketing (pemasaran). Hal ini perlu diperhatikan dalam memproduksi dan penyebarluasan meme tentang Pancasila.[41]

Selain itu, faktor-faktor berikut menjadi penting agar produksi dan penyebarluasan meme tentang Pancasila, khususnya melalui dunia digital, internet,

[41] "Apa itu Meme Sebenarnya? Dari Meme Budaya sampai Meme Internet", dalam https://saintif.com/apa-itu-meme/ (diakses 10 November 2019).

dan media sosial bisa sukses sebagaimana diharapkan. Pertama, berumur panjang. Meme yang diproduksi dan disebarluaskan haruslah berumur panjang agar dapat dinikmati oleh netizen. Kedua, faktor fekunditas, adalah kemampuan suatu entitas untuk bereproduksi (dalam hal lajunya). Dalam kasus meme reproduksi artinya penyebaran. Di sisi lain fekunditas jauh lebih penting daripada umur panjang suatu salinan (individu). Misalkan, meme adalah ide. Tingkat penyebarannya dapat dilihat sejauh mana orang-orang menerima ide tersebut. Jika ide tersebut mampu diterima oleh masyarakat luas dan diterapkan maka bisa dikatakan ide tersebut memiliki fekunditas tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jika ide dianggap aneh dan cenderung dihindari maka fekunditasnya rendah. Ketiga, ketepatan replikasi. Sesuatu yang akan direplikasi, misalnya meme tentang Pancasila, haruslah mirip atau tidak jauh berbeda dengan aslinya. Sehingga meme tersebut dapat tertanam di dalam memori netizen ketika mereka mengaksesnya.[42]

3. Instagram Pancasila

Dunia digital, internet, dan media sosial, khususnya youtube dan instagram saat ini sangat identik generasi milenial dan kalangan muda milenial. Kendati temuan kajian akademik ini terkait dengan penggunaan instagram dalam menyebarluaskan tentang Pancasila masih sangat umum, tapi dapat menjadi gambaran awal bagaimana seharusnya

---

[42] "Apa itu Meme Sebenarnya? Dari Meme Budaya sampai Meme Internet", dalam https://saintif.com/apa-itu-meme/ (diakses 10 November 2019).

instagram dapat digunakan, agar dapat dengan mudah diakses dan dipelajari kalangan muda milenial. Sebagian ulasan mengenai instagram ini telah dibahas sebelumnya di bagian awal.

Sebagaimana dipaparkan dalam temuan kajian akademik sebelumnya, salah satu media sosial yang banyak disinggung oleh narasumber kajian akademik ini adalah instagram. Dalam proses wawancara mendalam dan FGD, semua narasumber dari kalangan muda milenial memiliki akun media sosial, terutama instagram. Hal ini menjadi menarik bila ke depannya ditempuh strategi revitalisasi Pancasila melalui instagram, khususnya bagi kalangan muda milenial.

Senada dengan usulan teman-teman sebayanya, Intan Khairuzitni, mahasiswi Semester VII Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, berpendapat bahwa revitalisasi Pancasila melalui dunia digital bisa dilakukan melalui selebgram dan influencer. Menurutnya, influencer punya pengaruh yang besar di dunia maya. Dia mencontohkan gerakan donasi saja mereka bisa menggerakkan followernya untuk melakukan donasi. Dengan begitu, influencer bisa mengarahkan revitalisasi Pancasila yang dilakukan kepada *follower*nya.[43]

Ester Tri Utami, siswi SMA Katolik Mater Dei yang beragama Katolik dan berasal dari etnis Jawa, pihak kementerian, dalam hal ini Kemendikbud, melalui

[43] Wawancara Intan Khairuzitni, mahasiswi Semester VII Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta.

akun instagram bisa memuat ejaan-ejaan sederhana tentang Pancasila. Termasuk bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.[44]

Vioni Puteri, mahasiswa sosilogi Universitas Indonesia melontarkan kritik terhadap upaya revitalisasi Pancasila yang selama ini dilakukan tidak menyentuh dan menyasar dengan baik kalangan muda milenial. Menurutnya sampai saat ini belum ada gerakan teknis dan strategis yang mengusung revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. Bagi Vioni, tantangan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di masa yang akan datang cukup berat, khususnya yang dilakukan via media sosial, lebih spesifik lagi instagram. Berikut ilustrasi Vioni terkait tantangan tersebut:[45]

> "*It's too far*. Mungkin kemasannya kurang menarik. Kalau saya ingat-ingat lagi di sosmed, ada sih yang posting tentang Pancasila. Tapi bahkan saya sendiri aja langsung scroll ke atas gitu karena kurang menarik. Mungkin bisa dibikin menarik dan kreatif lagi, supaya saya bisa mau liat gitu. Misalnya, di IG."

Pengalaman Johanes Hasea Sitorus, siswa Kelas XII SMAN 82 Jakarta, yang mempunyai akun media sosial seperti line dan instagram, pernah menemukan konten yang berkaitan dengan Pancasila. Terutama di Instagram. Yaitu tentang Hari Pancasila dan peringatan agar masyarakat tidak terpecah belah walaupun berbeda pandangan atau pilhan.

---

[44] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

[45] Wawancara Vioni Puteri, mahasiswi Sosiologi Universitas Indonesia.

Menurutnya konten ini sempat menjadi trending topic. Akun yang menyebarkan konten Pancasila tersebut adalah akun kelompok. Tapi ke depannya, menurut Johanes, dalam rangka sosialisasi dan kampanye nilai-nilai Pancasila via media sosial, khususnya instagram, tidak menutup kemungkinan juga bisa dilakukan oleh akun-akun personal.[46]

4. Komik Pancasila

Tidak semua narasumber dari kalangan muda milenial dalam kajian akademik ini menyinggung secara spesifik hal yang berkaitan dengan komik Pancasila sebagai strategi dan upaya dalam revitalisasi Pancasila. Komik tentang Pancasila, khususnya yang dibuat dalam bentuk cetak (printed) dan disebarluaskan ke masyarakat umum, khususnya kalangan muda milenial. Mereka lebih cenderung mengingingkan komik tentang Pancasila dibuat secara online dan disebarluaskan melalui media digital, khususnya media sosial yang lekat dengan mereka, baik melalui facebook, youtube, dan instagram. Bagi mereka, komik yang dicetak, apalagi tentang Pancasila, tidak menarik dan akan membosankan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Frudence K Dylana, siswi SMAN 3 Tangerang Selatan, yang beragama Konghucu dalam FGD Revitalisasi Pancasila dari kalangan siswa. Ia mengusulkan pembuatan komik terkait Pancasila harus dibuat semanarik mungkin bagi kalangan milenial. Tapi komik yang ia maksud bukan komik yang berbentuk buku, melainkan bentuk

[46] Wawancara Johanes Hasea Sitorus, siswa Kelas XII SMAN 82 Jakarta.

digital. Karena menurutnya, bila komik dalam bentuk buku, kalangan muda milenial akan malas membacanya, apalagi membelinya. Menurutnya, komik Pancasila dengan format digital akan mudah diakses dan dinikmati oleh mereka.[47]

Sebagaimana dipaparkan di bagian sebelumnya, Frudence juga menambahkan bahwa komik tentang Pancasila juga bisa disebarluaskan dengan menggandeng para influencer di media sosial: selebgram dan selebtwit. Karena peran mereka sebagai influncer di media sosial sangat membantu dalam upaya penyebarluasan Pancasila khususnya bagi kalangan muda milenial.

Hal senada juga disampaikan Intan Khairuzitni, mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Uhamka Jakarta. Menurut Intan:[48]

> "Sekarang ini media sosial itu kan ada selegram, influncer. Menurut saya influncer itu punya pengaruh yang besar, kayak misalnya gerakan donasi saja mereka bisa menggerakkan flower-nya melakukan donasi. Jadi dari influncer itu bisa mengarahkan revitalisasi Pancasila kepada *follower*-nya."

Apa yang disampaikan Frudence dan Intan di atas dapat menjadi gambaran besar terkait upaya dan strategi revitaliasi Pancasila melalui pembuatan komik tentang Pancasila bagi kalangan muda milenial, khususnya melalui dunia digital, yakni

---

47 *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

48 Wawancara Intan Khairuzitni, mahasiswi Semester VII Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta.

media sosial yang lekat dengan generasi milenial. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan lembaga negara lainnya.

D. Strategi Revitalisasi melalui Kurikulum Pendidikan Sekolah

Selain *concern* yang ditunjukkan kalangan muda milenial yang menjadi narasumber kajian akademik ini dalam upaya revitalisasi Pancasila lebih banyak di ranah media digital, termasuk melalui kanal-kanal media sosial, mereka juga tetap menaruh harapan sangat besar di dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal. Hal ini tidak terlepas dari bahwa saat ini mereka masih menempuh pendidikan baik di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas maupun di perguruan tinggi.

Namun demikian, argumen mereka dalam melakukan revitalisasi Pancasila bagi kalangan muda milenial tetap harus menyentuh dunia digital, karena dunia tersebut saat ini sangat lekat dengan generasi milenial dan tidak bisa dilepaskan dari mereka. Dalam hal ini, dunia digital tidak bisa diabaikan bila program revitalisasi Pancasila ingin menyentuh generasi milenial. Tapi tentunya dengan tidak mengesampingkan peran pendidikan formal yang ada.

Strategi dan upaya revitalisasi Pancasila di dunia pendidikan, khususnya sekolah adalah penting, sebagaimana disampaikan peserta FGD pada tanggal 28 September 2019. Alvin Septian, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Gunadarma yang beragama Buddha dan berasal dari etnis Tionghoa, merekomendasikan agar revitalisasi Pancasila dilakukan di dunia pendidikan melalui pelajaran PPKN dan pendidikan budi pekerti.

Selain juga pendidikan tentang Pancasila penting dilakukan di lingkungan keluarga. Selama FGD berlangsung, Alvin sangat menekankan hal tersebut. Lebih lanjut Alvin menyatakan ada persoalan terkait pluralisme di Indonesia saat ini. Hal ini terungkap sebagaimana ia tandaskan bahwa:[49]

> "... Soalnya sikap kita yang ga pluralisme itu tergantung kita dididik gimana oleh keluarga. Kalau dididik sebagai anak yang berbakti, kita bisa menghargai, terutama orang tua. Dan ketika sudah menghargai orang tua, kita menghargai orang lain juga. Jadi dimulai dari keluarga".

Bagi siswa tingkat SLTA, sudah ada pendidikan PPKN yang menjadi mata pelajaran dan sudah diajarkan di sekolah. Hal ini diamini oleh peserta tingkat SLTA dalam FGD 5 Oktober 2019. Namun bagi Frudence K Dylana, siswi SMAN 3 Tangerang Selatan, yang beragama Konghucu, pendidikan Pancasila melalui mata pelajaran PPKN tidak cukup hanya diajarkan di dalam kelas (di atas kertas) dan dibaca. Karena menurutnya, kalangan muda milenial paling malas kalau membaca buku. Ia menyarankan agar hal ini bisa didukung dengan kegiatan ekstra kurikuler, seperti misalnya, membahas isu-isu yang sedang hangat terkait pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi yang berhubungan dengan Pancasila.[50]

Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud Frudence di antaranya adalah, diskusi tentang empat pilar dan konstitusi. Di sekolahnya, SMAN 3 Tangerang Selatan, misalnya, sudah ada perlombaan debat antar siswa terkait

---

[49] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 28 September 2019.
[50] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

Pancasila dan empat pilar yang diselenggarakan bekerjasama dengan MPR RI, yang pernah ia ikuti. Dalam prakteknya di SMAN 3 Tangerang Selatan, ada mentor guru PPKN. Informasi yang disampaikan Frudence, dia dan teman-temannya yang tertarik mengikuti jenis ekskul ini setiap hari berkumpul, berdiskusi, dan membahas pasal dalam Undang-Undang yang sudah dihapal. Di minggu selanjutnya hapal berapa Tap (Ketetapan) MPR. Begitu terus yang dilakukan sampai pada hari pelaksanaan perlombaan debat.[51] Dalam mengikuti lomba debat empat pilar ini, Frudence sendiri selalu menang sampai pada tingkat provinsi.

Lebih lanjut Frudence merekomendasikan beberapa hal terkait bagaimana strategi pendidikan Pancasila di sekolah. Pertama, selain diajarkan, di sekolah juga harus ada teladan/panutan. Baginya, panutan sangat penting karena bisa dicontoh. Jadi siswa tidak hanya belajar dan membaca buku saja, tapi juga mempunyai orang yang diteladani, bisa orang tua, guru di sekolah dan lingkungan, dan pejabat pemerintah. Kedua, selain itu, agar tidak membosankan, penanaman nilai-nilai Pancasila di sekolah bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi (salah satunya seperti FGD saat ini). Hanya saja kegiatan tersebut harus dikemas dengan menarik dan variatif agar para siswa di sekolah tidak bosan dan punya kemauan untuk hadir.[52]

Agar pembelajaran PPKN di sekolah tidak membosankan, peserta FGD siswa menyarankan agar guru PPKN (atau PKN) membuat presentasi (ppt) yang di dalamnya ada video pendek atau film tentang bagaimana cara para siswa

[51] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.
[52] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

dalam melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan lain.[53] Video dan film pendek ini lebih bersifat tutorial.

Terkait kurikulum pendidikan di sekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA), Brama Fawwaz Aydin, siswa SMA Madania Bogor, lebih setuju agar mata pelajaran PPKN diganti dengan PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Dia beralasan, walaupun pada faktanya PPKN saat ini diajarkan di sekolah negeri dan swasta, tapi materi tentang Pancasila hanya satu bagian (chapter) saja dalam pelajaran tersebut. Karena menurut Brama, poin utama dalam mata pelajaran PPKN adalah pendidikan moral berkehidupan dan berbangsa. Kalau diganti dengan mata pelajaran PMP, langsung merujuk dan membahas tentang Pancasila.[54]

Dalam konteks pendidikan, peserta FGD yang dari siswa juga merekomendasikan jenis perlombaan lain terkait Pancasila, tidak hanya perlombaan debat. Misalnya, lomba membuat caption menarik yang berhubungan dengan Pancasila. Hal ini bisa menarik bagi kalangan muda milenial, agar mereka juga bisa ikut berpikir dan menuliskan caption yang sesuai dengan Pancasila.[55]

Selain itu, bisa juga dilakukan melalui pendidikan alternatif lainnya, yaitu lomba membuat film. Berdasarkan cerita Rahma, siswi Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta, di sekolahnya pernah ada kegiatan tahunan "Pentas SPS". Dalam kegiatan ini siswa diharuskan membuat film pendek. Sejak tiga tahun lalu,

---

[53] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.
[54] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.
[55] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

temanya seputar "Bela Negara dan Sang Saka Merah Putih". Dalam "Pentas SPS" di tahun-tahun selanjutnya temanya banyak mengarah ke tema-tema seputar itu. Bahkan pihak sekolah pernah ditawari untuk ikut lomba membuat film di Pusat Pengembangan (Pusbang) Film.[56] Tentu yang diceritakan Rahma merupakan pengalaman menarik yang bisa dicontoh dan ditularkan kepada kalangan muda milenial lainnya.

Lain halnya dengan Vioni Puteri, mahasiswi Sosiologi Universitas Indonesia. Vioni berpendapat bahwa agar nilai-nilai Pancasila bisa tumbuh, berkembang, dan diimplementasikan dengan baik oleh anak muda haruslah dimulai dari struktur yang paling bawah. Karena menurutnya, bila kita ingin mempengaruhi masyarakat umum, terutama individunya, maka harus dimulai dari struktur yang paling bawah. Selain Sekolah Dasar, struktur yang paling bawah adalah keluarga. Pendidikan nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari keluarga merupakan sarana sosialisasi yang paling primer. Hal ini bisa dimulai dari orang tua agar mengajarkan anak-anaknya bahwa nilai-nilai dan perbuatan baik yang dilakukan juga sejalan dan sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila akan kuat jika didengungkan secara terus menerus, baik melalui/dari keluarga maupun pendidikan formal sekolah/universitas.

Terkait strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila di Universitas agar membekas dan dapat diamalkan generasi milenial, berdasarkan pengalamanannya, Vioni merekomendasikan agar selalu ada tugas tentang

---

[56] *Focus Group Discussion* Kajian Akademik, 5 Oktober 2019.

Pancasila dari dosen bagi mahasiswa, yang terkadang mahasiswa juga harus "dipaksa" mengerjakan tugas tentang Pancasila tersebut. Dalam wawancara Vioni menerangkan:[57]

> Kalau menurut saya, yang bisa membuat saya sadar dengan Pancasila adalah tugas dari kuliah. Jadi sesuatu yang saya tidak tahu dan saya dalami itu ketika saya mengerjakan tugas. Nyiapin kuis, nyiapin presentasi. Jadi bagus juga sih tugas-tugas dari sarana pendidikan. Jadi anak-anak terpaksa ngerjain. Dan awalnya terpaksa tapi seenggaknya, orang harus mengerti sih. Ya awalnya terpaksa ya gapapa. Kadang manusia memang butuh dipaksa.

Bagi Johanes Hasea Sitorus, siswa kelas XII SMAN 82 Jakarta yang beragama Kristen Protestan, revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui kewajiban mata pelajaran Pancasila di semua jenjang pendidikan masih belum terlalu efektif. Hal ini dikarenakan belum tentu semua orang, khususnya kalangan siswa, mau mengetahui dan membaca tentang nilai-nilai kebangsaan, termasuk Pancasila. Di sisi lain, Johanes menambahkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaan yang dipelajari di sekolah juga belum cukup. Penerapannya harus melalui hal-hal yang bisa diterima oleh kalangan muda milenial. Walaupun demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih tetap diperlukan di semua jenjang pendidikan.[58]

Karena itu, agar nilai-nilai Pancasila bisa tumbuh, berkembang, dan dihayati dan diamalkan dalam kehidupan kalangan muda milenial, tidak hanya sebatas

---

[57] Wawancara Vioni Puteri, mahasiswi Sosiologi Universitas Indonesia.

[58] Wawancara Johanes Hasea Sitorus, siswa Kelas XII SMAN 82 Jakarta.

dipelajari di sekolah saja, tetapi harus dibarengi dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksudkan Johanes adalah tidak hanya teori (mata pelajarannya) saja yang dipelajari tapi juga dipraktekkan. Namun demikian, tantangan terbesar dalam upaya revitalisasi Pancasila, menurut Johanes, terletak pada pola pikir kalangan muda milenial. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa bila dulu masalah yang dihadapi lebih kepada isu SARA, tapi saat ini melebar kepada pemikiran-pemikiran liar yang dalam perkembangannya membuat masyarakat terpolarisasi.[59]

[59] Wawancara Johanes Hasea Sitorus, siswa Kelas XII SMAN 82 Jakarta.

Bab VI
PENUTUP: KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan tujuan dan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kunci di pendahuluan laporan ini, pada bagian ini akan disampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan studi, hasil dari analisis, generalisasi dan simpulan atas temuan-temuan, sebagaimana telah diulas pada bab-bab terdahulu, tanpa bermaksud menghilangkan arti penting dari setiap temuan yang bersifat khusus dan lebih rinci.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kajian akademik ini berhasil menjawab sejumlah pertanyaan survei. *Pertama*, mengenai padangan anak muda milenial tentang Pancasila. Dari hasil kajian, disimpulkan bahwa secara normatif kaum milenial mendukung Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, multikultural, multi etnis, dan terdiri dari berbagai macam agama. Terdapat dua argumen yang menyertai pandangan itu: (1) prinsip nilai yang termuat dalam sila-sila Pancasila bersumber dan digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga tidak ada pertentangan di dalamnya, kompatibel dengan ajaran agama dan keyakinan, serta cocok dengan nilai budaya dan kebiasaan masyarakat, (2) Pancasila terbukti menjadi kekuatan pemersatu, menjadi titik temu keberagaman berbagai anasir nilai dan

kepentingan.

Dalam kehidupan sehari-harinya, anak muda milenial mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai spektrum perilaku dan pengamalan. Perilaku seperti menghormati dan berbuat baik kepada orang tua atau orang lain, tidak diskriminatif dalam pertemanan, toleran terhadap yang beda agama, gotong royong dan kerja bakti di lingkungan keluarga atau sekolah, musyawarah dalam organisasi sekolah/kampus, dan sebagainya menjadi nilai-nilai yang hidup dalam keseharian mereka. Begitu pula kebiasaan seperti rajin beribadah, rajin belajar, menghadiri kegiataan sosial juga dimaknai sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Praktik semacam itu banyak termotivasi baik oleh nilai-nilai Pancasila atau maupun terbentuk karena kebiasaan.

Namun demikian, pada sebagian milenial masih ditemukan jarak antara kesadaran terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan sikap mereka. Jarak itu muncul karena beberapa sebab, antara lain: pemahamannya belum benar-benar utuh dan solid tentang makna sila-sila Pancasila sehingga sikapnya belum konsisten, dan; sebagian milenial masih dalam tahap pencarian jati diri, terutama milenial junior berusia 16 sampai 25 tahun, sehingga cenderung labil dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti mengabaikan satu sila dan menekankan sila lainnya.

Beberapa problem dan kendala penerapan Pancasila menurut milenial: (1) problem struktural-fungsional, terkait dengan keberadaan institusi-institusi negara termasuk lembaga pendidikan yang belum menjalankan fungsinya dengan baik sesuai prinsip Pancasila, (2) politik

identitas, terkait dengan fenomena maraknya politisasi agama semenjak Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019, (3) problem mayoritas-minoritas, terkait dengan dinamika hubungan antar umat beragama yang berlangsung di bawah paradigma superior-inferior, dominan-subordinat, di mana mayoritas merasa punya hak keistimewaan lebih dibanding minoritas, (4) konservatisme dan radikalisme, terkait dengan fenomena sosial-politik keagamaan di mana seseorang memegang teguh dan mempertahankan keyakinan agamanya sembari menyalahkan pemeluk agama lain serta potensial bertindak kekerasan, (5) rasisme dan SARA, terkait dengan perasaan dan tindakan suatu kelompok/individu dalam kelompok yang didasarkan pada primordialisme ras, suku, agama atau golongan dan menganggap lebih unggul dibanding kelompok lain, (6) hiper-nasionalisme, berkaitan dengan pandangan dan ekspresi kekuatan otoritas atau kelompok tertentu mengenai nasionalisme secara berlebihan dengan membenci kelompok yang berbeda serta menuduh anti-Pancasila.

Kedua, mengenai bentuk praksis yang mendukung revitalisasi Pancasila di kalangan anak muda milenial. Kajian ini berhasil menggali pengalaman praksis milenial dalam kerangka revitalisasi Pancasila. Pengalaman itu dapat dijadikan sumber inspirasi dan role model bagi upaya menghidupkan kembali Pancasila di kalangan anak muda milenial. Jika dikategorikan, terdapat beberapa bentuk model praksis revitalisasi yang bisa dikembangkan dalam skala luas.

Model pertama, literasi politik dalam keluarga. Yaitu, dengan menjadikan keluarga sebagai medium dan agen sosialisasi Pancasila. Ini dapat dilakukan dengan cara

bagaimana orang tua mendidik anak, sikap dan perilaku orang tua terhadap anak, interaksi semua anggota keluarga, pelibatan anak dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, merangsang anak mengemukakan pendapat, membiasakan anak menghargai perbedaan pendapat, pembagian tugas gotong royong dalam keluarga, termasuk bagaimana menghormati dan menghargai tamu.

Model kedua, literasi politik di sekolah. Dapat dilakukan melalui pendidikan formal di kelas maupun kegiatan di luar kelas. Di dalam kelas, selain mengajarakan Pancasila, guru sebisa mungkin mendorong siswanya agar biasa berbaur. Bisa dengan cara mengatur tempat duduk siswa atau memberi tugas kelompok pada siswa berdasarkan keberagaman latar belakang suku atau agama. Di luar kelas, khususnya bagi sekolah di mana siswanya cenderung seragam, guru atau pihak sekolah termasuk organisasi siswa dapat mengadakan kegiatan yang mendorong terjadinya interaksi siswa dengan kultur dan suasana yang berbeda. Bisa dengan cara melakukan kegiatan kunjungan ke sekolah lain, atau mengundang perwakilan sekolah lain untuk tampil pada acara yang diadakan sekolah.

Model ketiga, ekstrakulikuler khusus Empat Pilar. Ini berisi kegiatan diskusi yang dikemas semenarik mungkin membahas tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, juga diskusi film yang menggugah keindonesiaan. Peserta kemudian diikutkan lomba di tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Model keempat, literasi politik di kegiatan sosial-keagamaan. Di sini, literasi dapat berupa penanaman nilai-nilai Pancasila yang disisipkan dalam acara keagamaan seperti kegiatan

peribadatan, ceramah keagamaan, peringatan hari besar agama, dan kegiatan lainnya. Dalam kegiatan itu, jika memang memungkinkan untuk melakukannya, dapat dimulai misalnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau lagu sejenis.

Model kelima, dialog antar agama. Ini untuk membuka jembatan komunikasi antar pemeluk agama agar lebih saling mengenal dan memahami satu sama lain. Dapat dilakukan dengan membuat forum lintas agama yang diisi dengan kegiatan diskusi, kunjungan, silaturrahim, saling bertanya ajaran agama masing-masing dengan titik tekan pada upaya mencari persamaan universal yang menjadi inti dari setiap agama. Model keenam, membuat wadah kajian dan pergerakan yang fokus pada pengembangan nilai-nilai inklusif terutama di lingkungan kampus. Ini semacam critical thingking untuk meng-counter wacana yang diusung organisasi atau kelompok konservatif, radikalis, dan ekstremis yang bertentangan dengan Pancasila. Kegiatan dari wadah tersebut dapat berupa kajian di masjid kampus, memberi bimbingan keagamaan bagi mahasiswa jurusan umum, membuat buletin keagamaan, dan sebagainya.

Model ketujuh, pendidikan dan pelatihan yang lebih menekankan pada upaya mencetak aktor, pelatih atau guru Pancasila. Ouput utamanya adalah bagaimana menyiapkan aktor, pelatih, dan guru yang tidak hanya mampu mengajarkan nilai-nilai Pancasila melainkan juga punya keahlian mengidentifikasi, meng-counter, dan mengatasi persoalan yang berlawanan dengan Pancasila di lingkungannya.

Secara khusus, dalam kajian ini juga digali tanggapan milenal terhadap gerakan pengusung khilafah yang ingin

mengganti Pancasila, seperti organisasi HTI. Tanggapan itu mengemuka dalam tiga sikap: tidak setuju dengan khilafah (sikap mayoritas); setuju khilafah tapi tetap memilih Pancasila; tidak setuju tapi ragu dengan tekad HTI yang ingin mengganti Pancasila. Argumen yang tidak setuju khilafah umumnya menitikberatkan pada keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Bila khilafah yang didasarkan pada agama tertentu ditegakkan, maka potensial terjadi perpecahan. Umumnya, mereka yang berada dalam sikap ini setuju dengan langkah pemerintah membubarkan HTI.

Sikap yang setuju khilafah tapi tetap memilih Pancasila datang dari milenial junior yang masih dalam proses pencarian jati diri, juga belum memiliki pemahaman utuh mengenai Pancasila. Sikapnya dipengaruhi oleh ketegangan nilai dalam dirinya: antara menerima khilafah yang dianggap islami (setidaknya mengatasnamakan Islam) dengan Pancasila yang sudah dirumuskan sejak dulu dan terbukti menjadi perekat persatuan nasional. Sedangkan sikap yang tidak setuju khilafah tapi sekaligus ragu dengan tekad HTI untuk mengganti Pancasila dilatari oleh permainan narasi politik yang dibangun pada saat Pilpres 2019. Fenomena HTI dan khilafah booming karena dijadikan alat politik, penggiringan isu untuk mendiskreditkan calon tertentu. Gerakan HTI juga dinilai tidak seseram apa diisukan saat kampanye. Artinya, walaupun punya pandangan soal khilafah, tetapi pergerakan HTI selama ini dianggap biasa saja—tidak membahayakan semisal gerakan separatis yang memengaruhi dan mengorganisir massa menggunakan cara-cara kekerasan.

Meski demikian, mengingat kampanye khilafah eks HTI saat ini sering ditemukan di media sosial dengan menggunakan influencer tokoh muda, maka muncul kekhawatiran bila ide mereka diterima massif oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan strategi untuk menangkal pengaruh kampanye mereka. Adapun salah satu strategi yang dianggap paling tepat menurut milenial adalah melalui counter narasi. Yakni, dengan membuka diskursus untuk menunjukkan elemen-elemen yang menjadi kelemahan ide khilafah, paradoks konseptual, utopia ideologis serta keusangan kontekstual di tengah kondisi keberagaman bangsa Indonesia maupun di tengah konsep nation state yang dianut negara-negara dunia saat ini. Di saat bersamaan, menunjukkan kekuatan dan keutamaan ideologi Pancasila termasuk mempromosikan dan mengampanyekan nilai-nilai itu dengan kemasan sederhana di media sosial.

Yang menarik, revitalisasi nilai-nilai Pancasila di media sosial saat ini dianggap sangat penting oleh kalangan milenial. Hal ini tidak lepas dari realitas kehidupan di dunia maya yang di samping memberikan berbagai macam kemudahan dalam hidup mereka, juga melahirkan ekses yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya dengan maraknya hoaks, ujaran kebencian, bullying hingga fenomena *post truth*. Perilaku di media sosial seperti tak terkendali demi menggiring opini yang menyesatkan lewat produksi fitnah dan berita bohong.

Dituntun oleh arus kepentingan politik tertentu, perilaku sejumlah netizen telah menjadikan suasana pertemuan dan perbincangan antar warga negara di jagad maya serba hita putih, terkotak-kotak, dan dipenuhi kebencian.

Suasana semacam itu pada tataran lebih lanjut tanpa disadari telah ikut membentuk perilaku sebagian pemuda milenial menjadi reaktif, gampang menyebar informasi hoaks, mudah mencaci dan membuat perundungan. Tak jarang, dalam mengomentari berita atau postingan status suatu akun, mereka langsung menghujat hanya karena beda pandangan atau keyakinan.

Oleh sebab itu, revitalisasi Pancasila di media sosial dipandang perlu dengan aksentuasi dan arahan agar netizen bersikap lebih dewasa, selektif menyebarkan berita serta menghargai perbedaan pendapat atau keyakinan. Salah satu caranya adalah dengan menekankan pentingnya literasi media. Startegi ini dapat dijalankan melalui pendidikan atau pelatihan untuk menumbuhkan kemampuan milenial dalam mengakses, mengevaluasi, menganalisis, dan mengomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya. Literasi media dijalankan di atas prinsip: setiap warga negara adalah wartawan (*netizen journalist*) yang terlibat dalam kegiatan mencari, menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi.

Selain itu, revitalisasi Pancasila juga bisa dilakukan dengan cara praktis dan sederhana, yaitu dengan menggaet influencer, membuat dan menyebarkan meme, karikatur, komik, atau video pendek yang mengarusutamakan prinsip-prinsip etik Pancasila. Di sini prinsip seperti kerukunan antar sesama warga negara, persaudaraan, persatuan, dan sebagainya dapat terus dikampanyekan.

Influencer media sosial yang umumnya dikenal sebagai selebgram, selebtwit dan youtuber dapat diajak bekerjasama untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila

di akun masing-masing, membuat dan menyiarkan kegiatan yang merefleksikan Pancasila. Model kerjasama dapat dirumuskan lebih lanjut oleh lembaga sosialisasi Pancasila MPR maupun pemerintah. Sementara, untuk durasi video pendek yang digemari milenial tidak lebih dari 1-5 menit, dan untuk film pendek tidak lebih dari 5-10 menit, yang bisa di*posting* melalui kanal youtube, instagram, maupun facebook.

Meskipun kebanyakan kalangan muda milenial menganggap lebih penting pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi revitalisasi Pancasila, namun demikian mereka juga berharapi agar revitalisasi Pancasila dapat tetap dilakukan melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan kebangsaan, dan melalui pendidikan di sekolah, khususnya pendidikan formal. Diskusi-diskusi formal, kegiatan seminar, kegiatan kebudayaan, perlombaan (debat, kesenian, membuat video dan film pendek, dan sebagainya), membuat meme tokoh-tokoh bangsa, dikaitkan dengan Pancasila, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya tetap dapat ditempuh untuk melakukan revitalisasi Pancasila.

Ketiga, mengenai strategi revitalisasi Pancasila di kalangan anak muda milenial dan rekomendasi kebijakan, disimpulkan bahwa pendekatan revitalisasi Pancasila perlu disesuaikan dengan karakteristik milenial sebagai digital native. Artinya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat diarus-utamakan di dunia maya melalui pembuatan konten informasi, aplikasi, akun, forum atau komunitas online di berbagai *platform* media sosial terutama Youtube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Diseminasi informasi tersebut disajikan dalam lini masa dan perbincangan netizen dengan kemasan

menarik sesuai millenial *taste*. Meski begitu, pendekatan konvensional lewat dunia nyata (*offline*) seperti pendidikan, pelatihan, dialog, diskusi, seminar, lomba, *outbond*, *field trip*, pagelaran seni budaya dan sebagainya tetap diperlukan. Tak kalah penting, perlu juga adanya teladan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai role model yang dapat diteladani. Keberadaan dan kehadiran mereka sangat penting guna menampilkan wujud nyata Pancasila dalam kehidupan yang aktual. Teori yang dipelajari di sekolah dianggap tidak cukup sebagai panduan pengamalan Pancasila, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolah/kampus.

Secara garis besar, temuan dalam kajian ini di satu sisi menggambarkan tingginya kesadaran milenial atas kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, namun di sisi lain juga menunjukkan problem dan kendala penerapannya yang dialami, dilihat, dan dirasakan langsung oleh mereka. Problem dan kendala itu merupakan tantangan implementasi Pancasila yang perlu menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi program revitalisasi Pancasila ke depan.

Dalam kerangka menghadapi tantangan itu, maka kajian ini merumuskan sejumlah rekomendasi yang dianalisis dari pandangan, pengalaman, juga aspirasi dan kehendak anak muda milenial tentang bagaimana seharusnya strategi revitalisasi Pancasila. Rumusan itu akan dibahas tersendiri dalam sub-bab rekomendasi berikut ini.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan hasil kajian akademik ini, maka hal-hal yang menjadi rekomendasi kebijakan untuk dijalankan dalam rangka revitalisasi Pancasila di kalangan

anak muda milenial Indonesia adalah:

1. Metode penanaman nilai-nilai Pancasila harus disesuaikan dengan karakter milenial sebagai digital natif: simpel, mudah dicerna, dan lebih mengedepankan aspek visualisasi di media sosial.
2. Perlu memfasilitasi terbentuknya wadah lintas agama di kalangan milenial yang menitikberatkan pada kegiatan diskusi, *field trip*, *outbond* dan sejenisnya yang kemudian disiarkan dan disebar di komunitas media sosial.
3. Perlu mengetengahkan literasi media dalam bentuk pendidikan dan pelatihan media kritis dalam mencari, menerima, mengolah, menganalisis, dan menyebarkan pesan di media sosial.
4. Perlu menggaet influencer seperti selegram, selebtwit, dan youtuber di media sosial yang dapat dijadikan contoh atau penutan yang secara aktif mengajak dan memengaruhi milenial untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
5. Perlu mendorong terbentuknya esktrakulikuler Pancasila atau Empat Pilar di semua sekolah yang diisi dengan kegiatan seperti diskusi materi terkait Pancasila (buku, novel, dll), diskusi film kebangsaan (film perjuangan, film pergulatan anak muda, dll) yang dikemas menarik dan kemudian dilombakan (lomba debat dan menulis terkait Pancasila).
6. Perlu mengadakan lomba pembuatan film pendek bertemakan Pancasila mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional.
7. Perlu membuat akun Youtube Komunitas Pancasila

yang aktif membuat dan mengunggah film pendek, video kegiatan- yang merefleksikan Pancasila, wawancara dengan keluarga cerminan Pancasila, dan lain-lain yang dipandu langsung oleh youtuber.

8. Perlu membuat pelatihan aktor, pelatih, dan guru Pancasila yang menekankan pada kemampuan mengidentifikasi ancaman Pancasila, counter narasi, resolusi konflik, dll, sehingga berbagai upaya dan aksi nyata yang diperlukan menghadapi tantangan Pancasila dapat dilakukan secara sistematis dan mandiri di berbagai daerah dan lapisan masyarakat.
9. Revitalsiasi Pancasila melalui pendekatan keagamaan. Dalam hal ini, MPR RI dapat bekerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Agama, dan organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama, kalangan kampus keagamaan, dan tokoh-tokoh agama untuk menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif bagi kalangan muda milenial.
10. Revitalisasi Pancasila melalui pendekatan budaya. Nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah di Indonesia dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang dapat diformulasikan dan disinergikan dengan nilai-nilai Pancasila. Pos-pos budaya tersebut juga bisa dibuat dan dimaksimalkan melalui kanal-kanal media sosial, baik youtube, instagram, dan facebook, serta kanal media sosial lainnya yang "digandrungi" generasi milenial.

11. Penguatan (internalisasi) nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan (semua level). MPR RI bekerjasama dengan Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional, khususnya pendidikan formal, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SLTP, SLTA, hingga perguruan tinggi. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi, baik sekolah tinggi, institut, dan universitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: LP3ES, 2009.

Bamualim, Chaider S., dkk (ed), "Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme". Tangerang Selatan: CSRC UIN Jakarta, 2018.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*., 2013.

Dodo, dkk (ed), *Konsistensi Nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya*. Yogyakarta: PSP Press, 2010.

Domminic, Joseph R., *The Dynamic of Mass Communication.* New York: McGraw Hills, 2009.

Eko , Indrajit Richardus, *E-Commerse: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.

Ismaun, *Tinjauan Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia.* Bandung: Carya Remaja, 1978.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Paradigma, 2000.

Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: Gramedia, 2011.

Marshall McLuhan, *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*. Toronto: University of Toronto Press, 1962.

MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.

Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer,* terj. Tim penerjemah Yasogama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Rindjin, Ketut, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Simpatisan Pembela Pancasila, *Bung Karno & Pancasila: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*.

Soekarno, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara Jilid 1-4.* Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1958.

Strauss, William dan Neil Howe, *Millennials Rising: The Next Great Generation.* 2000.

Thomson, John B. *Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, terj. Haqqul Yaqin. Yogyakarta: Ircisod, 2003.

Wasitaatmaja, Fokky Fuad, *Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan.* Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Winters, Jeffrey, *Oligarki*, terj. Jakarta: Gramedia, 2011.

DISERTASI, MAKALAH, ARTIKEL

Andriyadi, Fayakhun, "Demokrasi Era Digital: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial dalam Partisipasi Politik oleh Pendukung Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017", Disertasi Universitas Indonesia 2015.

Aufderheide, Patricia, *Media Literacy, A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy*. Queenstown Maryland: The Aspen Institute Wye Center, 1992.

Hadiz, Vedi, "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?" dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, Volume 53, No. 3, 2017.

------, "Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia", *Prisma*, Vol.33 No.1 Tahun 2014.

Hamidah, Kamilia, "Jihad Digital Generasi Milenial: Merebut Ruang Publik dengan Narasi Positif", makalah dipresentasikan dalam Ceramah Ilmiah *Ngaji Sosmed: Jihad Digital Generasi Milenial* di Pesantren Putri Al-Badi'iyyah, Kajen Margoyoso, Pati, 21 November 2018.

Hidayat, Arief, "Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)" makalah disampaikan pada Kongres Pancasila IV di UGM Yogyakarta 2012.

------, "Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum" dalam Seminar Nasional Hukum, Vol.3 No.1 Tahun 2016.

Ismail Fahmi, "Perilaku Masyarakat Indonesia terhadap Hoaks, Media, dan Budaya Baca", bahan tayang disampaikan dalam Diskusi dan Bedah di Auditorium FIB UNDIP Semarang, 9 Maret 2017.

Magnis-Suseno, Franz, "Etika Bangsa Berbudaya di Abad ke 21: Keharusan Kalau Indonesia Mau Maju", makalah pada Seminar Nasional Membangun Karakter Bangsa melalui Pemantapan Kebudayaan Nasional dan Kesadaran Historis, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, 30 Mei 2012.

Mahfud MD, Moh., "Mengokohkan Ideologi Pancasila Menyongsing Generasi Z-Alpha", Disampaikan pada Kuliah Umum Universitas Soegiyopranoto, Semarang, 8 Oktober 2018.

Muhtadi, Burhanuddin, "Menguatnya Intoleransi dan Politik Identitas" dalam artikel Media Indonesia, Kamis, 20 Desember 2019.

Prasetyo, Banu dan Umi Trisanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial" dalam Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0".

Rosyidin, Iding, "Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi Arus Globalisasi Informasi", artikel tanpa keterangan dan tahun.

Saidi, Anas, "Relasi Pancasila, Agama, dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi", Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 11. No. 1 Tahun 2009.

Saputra, Rangga Eka, dalam Convey Report "Api dalam Sekap: Keberagamaan Generasi Z" (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. 1. No. 1 Tahun 2018.

Sulasmono, Bambang Suteng, "Peluang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", Jurnal Satya Widya, Volume XXXV No. 1, Juni 2019.

RILIS RESMI PEMERINTAH DAN HASIL SURVEI

Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia 2018". Jakarta: BPS 2018.

Bappenas, BPS, dan UNFPA, "Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045: Hasil SUPAS 2015, Jakarta: BPS 2018.

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) dan MPR RI, "Survei Nasional Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI 2018.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), *"Ada apa dengan Milenial?, Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik Generasi Milenial",* (Jakarta, CSIS, 2 November, 2017.

IDN Research Institute, "Indonesia Millenial Report 2019".

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BPS, "Statistik Gender Tematik: Profile Generasi Milenial Indonesia 2018".

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), "Hasil Survei Mastel tentang Wabah Hoaks Nasional", Jakarta, 13 Februari 2017.

------, "Hasil Survei Wabah Nasional Hoaks 2019".

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

ARTIKEL DAN BERITA INTERNET

Ariel Heryanto, "Ketegangan di Papua dan Hiper-Nasionalisme di Indonesia" dalam https://theconversation.com/ketegangan-di-papua-dan-hiper-nasionalisme-di-indonesia-123179. Artikel diakses 22 Oktober 2019.

Global Digital Report 2019 di https://wearesocial.com/global-digital-report-2019. Diakses tanggal 20 Oktober 2019.

Nadirsyah Hosen, "Pilpres 2019: Perang Komunisme vs Khilafah? di https://www.matamatapolitik.com/opini-pilpres-2019-perang-komunisme-vs-khilafah/. Artikel diakses 20 Oktober 2019.

Tim Berners-Lee, *Information Management: A Proposal,* Maret 1989, *www.cds.cern.ch*, (Diakses pada 4 November 2013)

Kumparan, "Riset Oxford: Politikus Indonesia Bayar Buzzer untuk Manipulasi Publik", di https://kumparan.com/kumparansains/riset-oxford-politikus-indonesia-bayar-buzzer-untuk-manipulasi-publik-1rzWKzl4kyv. Diakses 10 Oktober 2019.

IDN Research Institute, "Indonesia Millenial Report 2019", https://cdn.idntimes.com/content-documents/indonesia-millennial-report-2019-by-idn-times.pdf. Diakses 5 November 2019.

Mayjen TNI Joni Supriyanto, "Nilai-Nilai Pancasila bagi Generasi Milenial di Zaman Now", Opini Media Indonesia, 2 Juni 2018, https://mediaindonesia.com/read/detail/163965-nilai-nilai-pancasila-bagi-generasi-milenial-di-zaman-now. Diakses 6 November 2019.

"Membumikan Pancasila di Era Milenial" dalam https://unram.ac.id/membumikan-pancasila-di-era-milenial/ diakses 6 November 2018.

"Asal Usul Meme Pertama di Internet" dalam https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01285092/asal-usul-meme-pertama-di-internet-408114. Diakses 8 November 2019.

"Apa itu *Meme* Sebenarnya? Dari *Meme* Budaya sampai *Meme* Internet", dalam https://saintif.com/apa-itu-meme/ diakses 10 November 2019.

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia. Diakses tanggal 20 Oktober 2019.

https://www.beritasatu.com/megapolitan/425227/keuskupan-agung-jakarta-usung-tema-pengamalan-pancasila, Diakses 13 November 2019.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190421124203-20-388197/uskup-agung-jakarta-ingatkan-nilai-pancasila-di-paskah-2019, akses 13 Nov 2019.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/17670/hoaks-pendukung-jokowi-diacara-debat-memakai-pin-ditopi-lambang-pki/0/laporan_isu_hoaks.

https://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.sudah.tercatat.di.kamus.bahasa.indonesia diakses 10 November 2019.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meme diakses 10 November 2019.